



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 061/SP.HCP/LPPM/UNIJA/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 19%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 25 Februari 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 24-Feb-2022 10:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1769633136

File name: 0715017702-2648-Artikel-Plagiasi-21-02-2022.pdf (1.03M)

Word count: 38056

Character count: 244179

Pengantar
**EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN**



Mohammad Hidayatullah

Pengantar
**EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN**

Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom



PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Author:

Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom

Layouter:

Dewi

Editor:

Dr. Ika Devy Pramudiana S.IIP M.KP

1

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2021

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : Agustus 2021

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : viii + 193 halaman

ISBN: 978-623-6665-15-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur milik Allah SWT, Tuhan makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, seru sekalian alam. Berkah nikmat dan karunia yang diberikan, kita semua dapat menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan ibadah menyembah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan dan jasa beliau, kita semua bisa merasakan manisnya Islam dan Iman. Semoga shalawat dan salam juga akan senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat.

Politik menjadi perbincangan hangat dan menarik sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, karena memperbincangkan kekuasaan, baik dari sisi orang-orang yang berkuasa, proses mendapat kekuasaan, membagi kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Betapapun banyak kalangan yang tidak menyukai obrolan tentang politik, namun tetap saja, siapapun tidak bisa menghindari dari persoalan politik. Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak memiliki kaitan dan momen politik, mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala desa.

Demikian pula dengan perbincangan ekonomi lebih menarik lagi, karena menyangkut persoalan hajat hidup, urusan kebutuhan mendasar manusia. Selain sebagai makhluk politik (*zoon politicon*) manusia juga merupakan makhluk berekonomi (*zoon economicus*). Jika politik erat hubungan dengan kekuasaan, maka ekonomi erat hubungan dengan kepuasan. Kepuasan untuk dapat makan, dapat minum, dapat berpakaian, dapat rumah, dapat kesenangan untuk jalan-jalan dan menikmati wisata. Ekonomi dapat memenuhi hal tersebut. Maka

perbincangan ekonomi politik dan pembangunan menjadi semakin menarik. Buku ini secara sederhana menjelaskan ekonomi politik pembangunan dan derivasinya.

231

Terima kasih kepada rekan sejawat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan secara umum di Universitas Wiraraja Madura. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *Center for Indonesia Reform* (CIR). Penulis berharap, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Mohon maaf jika ada materi di dalam buku ini tidak tepat, kurang relevan dan segala kekurangan lainnya.

41

Madura, 17 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

BAB I PENGANTAR EKONOMI POLITIK

PEMBANGUNAN.....	3
A. Sejarah Ekonomi Politik.....	5
B. Pengertian Ekonomi	7
C. Pengertian Politik.....	9
D. Pengertian Ekonomi Politik.....	10
E. Pengertian Pembangunan.....	11
F. Sejarah Pembangunan.....	13
Soal dan Latihan.....	16

BAB II EKONOMI POLITIK SOSIALISME.....19

A. Sejarah Sosialisme.....	21
B. Pengertian Sosialisme.....	23
C. Prinsip Dasar Sosialisme.....	25
D. Ciri Khas Sosialisme.....	26
Soal dan Latihan.....	28

BAB III EKONOMI POLITIK KAPITALISME31

A. Sejarah Kapitalisme	33
B. Pengertian Kapitalisme	35
C. Prinsip Kapitalisme.....	37
D. Model Kapitalisme.....	38

E. Karakteristik Ekonomi Politik Kapitalisme	39
F. Tokoh-Tokoh Kapitalisme.....	40
Soal dan Latihan.....	42
BAB IV EKONOMI POLITIK ISLAM.....	45
A. Sejarah Ekonomi Politik Islam.....	47
B. Pengertian Ekonomi Politik Islam.....	49
C. Karakteristik Ekonomi Politik Islam.....	50
D. Tokoh Ekonomi Politik Islam.....	54
Soal dan Latihan.....	57
BAB V EKONOMI POLITIK CAMPURAN	59
A. Latar Belakang.....	61
B. Pengertian Ekonomi Politik Campuran.....	62
C. Sosialisasi Pasar Model China.....	63
D. Konsep Sosialisme, Praktik Kapitalisme: Model Indonesia.....	64
Soal dan Latihan.....	66
BAB VI EKONOMI POLITIK PANCASILA	69
A. Sejarah Ekonomi Politik Pancasila.....	71
B. Pengertian Ekonomi Politik Pancasila	72
C. Ciri Ekonomi Politik Pancasila.....	73
D. Koperasi	74
Soal dan Latihan.....	77
BAB VII GLOBALISASI, EKSPORT DAN IMPORT	79
A. Latar Belakang.....	81
B. Sejarah Globalisasi.....	82
C. Sejarah Ekspor.....	83
D. Sejarah Import.....	84
E. Pengertian Globalisasi.....	85
F. Pengertian Ekspor dan Import	86
G. Implikasi Ekspor dan Import pada Ekonomi dan Politik.....	87
Soal dan Latihan.....	89

BAB VIII UTANG LUAR NEGERI	91
A. Latar Belakang.....	93
B. Sejarah Utang.....	94
C. Pengertian Utang Luar Negeri.....	102
D. Implikasi Utang Luar Negeri Terhadap Ekonomi dan Politik..	103
Soal dan Latihan.....	106
BAB IX TENAGA KERJA LUAR NEGERI	109
A. Latar Belakang.....	111
B. Sejarah Tenaga Kerja Luar Negeri.....	112
C. Pengertian Tenaga Kerja Luar Negeri.....	113
D. Implikasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Ekonomi dan Politik.....	114
Soal dan Latihan.....	117
BAB X PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ..	119
A. Latar Belakang.....	121
B. Sejarah Isu Lingkungan Hidup.....	122
C. Pengertian Lingkungan Hidup.....	125
D. Macam-Macam Isu Lingkungan Hidup	126
E. Implikasi Lingkungan Hidup Terhadap Ekonomi dan Politik .	127
Soal dan Latihan.....	129
BAB XI PAJAK DAN RETRIBUSI	131
A. Latar Belakang.....	133
B. Sejarah Pajak	134
C. Pengertian Pajak.....	136
D. Jenis dan Bentuk Pajak.....	137
E. Implikasi Pajak Terhadap Ekonomi dan Politik.....	139
Soal dan Latihan.....	141
BAB XII NEGARA, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN.....	143
A. Pengertian Negara.....	145
B. Pengertian Kemiskinan.....	147
C. Jenis Kemiskinan	148
D. Faktor Penyebab Kemiskinan.....	149

E. Upaya Mengentaskan Kemiskinan.....	150
F. Peran Negara dalam Pembangunan.....	151
G. Upaya Negara Mengurangi Kemiskinan	152
Soal dan Latihan.....	155
DAFTAR PUSTAKA	157
GLOSARIUM	177
INDEX.....	181
TENTANG PENULIS.....	185



Pendahuluan



Ekonomi dan politik, bila dilihat sekilas seperti tidak ada hubungan yang intens. Ekonomi mengurus pasar, transaksi jual-beli, tukar-menukar barang, dan jasa, secara daring maupun luring. Orang mengurus ekonomi tempatnya di pasar, di pusat perbelanjaan, di bursa saham, di aplikasi atau platform digital. Seperti tidak ada hubungan urusan politik yang membahas urusan meraih, membagi, mempertahankan kekuasaan, yang berada di gedung parlemen, kantor pemerintah, di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan umum berlangsung.

Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata ekonomi memiliki hubungan yang intens dengan politik. Bila diibaratkan seperti koin uang logam, maka ekonomi dan politik ibarat dua sisi dari mata uang yang sama-sama bernilai. Satu sama lain, saling memberi nilai yang hanya ada pada saat keduanya ada secara simultan. Nyaris tidak ada keputusan politik yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Begitu pula bidang ekonomi, tidak dapat berjalan, bila tidak ada keputusan politik. Malah ada persoalan ekonomi yang kemudian terhenti karena kebijakan politik. Proses ekspor dan import barang dari satu negara ke negara lain, butuh kebijakan politik. Berapa banyak tahun ini misalnya Indonesia akan mengimpor beras dari Vietnam adalah keputusan politik. Meski beras adalah urusan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan makan.

Manakah di antara kedua pendekatan tersebut yang relevan? Apakah politik harus dipisah dengan ekonomi? Atau apakah politik harus selalu berhubungan dengan ekonomi? Kedua pertanyaan itu yang sesungguhnya secara jelas akan dijelaskan di dalam buku ajar ini. Buku ajar mata kuliah “Ekonomi Politik Pembangunan.” Bagaimana sejarah kelahiran ekonomi dan politik, baik secara teoritis maupun praktis, apakah ekonomi dan politik sejak awal, dalam kajian para ahli sudah terpisah, atau sebaliknya malah sudah menyatu? Hal tersebut akan dibahas secara sederhana di dalam buku ini.



Bab 1

Pengantar Ekonomi Politik



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik Pembangunan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik pembangunan.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik pembangunan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik pembangunan.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik pembangunan.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi politik pembangunan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik pembangunan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik pembangunan.

A. Sejarah Ekonomi Politik

Ekonomi politik pertama kali muncul pada abad ke-16 yang digagas oleh penulis Prancis bernama Antoine de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Namun Ekonomi politik memperoleh bentuk pada 1776 dengan ditulisnya buku berjudul *The Wealth of Nations* oleh ekonom Adam Smith. Selain Smith tokoh lain yang mengembangkan ekonomi politik adalah David Ricardo dengan tulisannya *Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stock* tahun 1815. Tokoh-tokoh ini melihat ekonomi politik dari sudut pandang mikro, yaitu teori nilai kerja. Selain melihat ekonomi politik dari sudut pandang nilai kerja Adam Smith juga melihat individu dan kebutuhannya. Kemudian masuk ke wilayah makro, lebih luas lagi, yaitu tentang masyarakat dan negara.

Ada pula tokoh lain yang bicara mengenai ekonomi politik, yaitu Robert Malthus dengan karyanya berjudul *Principles of Political Economy* (1820) dan *Definitions of Political Economy*. Tokoh lain yang membahas ekonomi politik adalah John Stuart Mill yang terkenal dengan bukunya yang berjudul *Principles of Political Economy With Some of Their Application to Social Philosophy* (1848). Pada masa ini ekonomi dan politik masih menyatu (Deliarnov, 2006: 1-2).

Ekonomi politik sempat mengalami pemisahan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, satu di antara yang paling mengemuka adalah, wilayah ekonomi dan politik berbeda. Menurut Miriam Budiardjo, pada abad ke-18 dan ke-19 ekonomi dan politik menjadi ilmu yang tersendiri, terpisah dan masing-masing memiliki wilayah juga pembahasan yang tidak sama. Hal tersebut dilakukan oleh Inggris untuk memajukan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga dan negaranya, sekaligus untuk menghadapi negara lain yang menjadi pesaing Inggris seperti Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis dan lainnya (Budiardjo, 2003: 23).

Alfred Marshal merupakan tokoh yang juga ikut mendorong berpisahnya ekonomi dan politik. Marshal menulis buku yang berjudul "*principles of economics.*" Melalui tulisan tersebut, Marshal memisahkan ekonomi dengan politik. Ekonomi digunakan secara terpisah dengan

politik. Ekonomi lebih diorientasikan pada penjelasan ekonomi yang lebih bersifat deduktif, matematis, dan kuantitatif. Sedangkan politik semakin dijauhkan dari ekonomi dan diorientasikan pada hal-hal yang bersifat induktif, kualitatif, berkaitan perilaku (*behavior*), pola, model, interaksi dan lain-lain.

Pada saat terjadi pemisahan antara ekonomi dan politik, maka dibuatlah bidang tugas dan wilayah masing-masing. Ekonomi mengurus pasar, sedangkan politik mengurus pemerintahan. Pemerintah tidak boleh mencampuri pasar, pasar harus diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah. Salah satu tokoh yang getol mengemukakan ini adalah Stephen Gill. Menurut Gill, apa yang menjadi urusan ekonomi (*market*) harus terpisah sepenuhnya dari urusan pemerintahan (politik). Tujuannya, supaya ekonomi bisa lebih maju, ekspansif dan independen (Gill, 1995: 400-420).

Tokoh lain yang mengemukakan hal serupa adalah Adam Harnes. Harnes juga menyebut, campur tangan politik dalam ekonomi hanya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga politik harus dijauhkan dari ekonomi (Harnes, 2006: 726-748).

Charles Lindblom dan Robert Dahl mempelopori kembali bersatunya kajian mengenai ekonomi dan politik. Meski keduanya telah memiliki bidang kajian yang lebih spesifik, terutama dengan semakin dinamisnya perkembangan dalam perekonomian dan perpolitikan. Lindblom dan Dahl menerbitkan buku yang berjudul "*politics, economics and welfare*" pada tahun 1953. Melalui tulisan di buku tersebut, keduanya berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yang saling berinteraksi semakin menonjol, dan bisa juga tidak terpisah dalam kajiannya (Philipus & Aini, 2004: 20).

Namun pada tahun 1970-an ekonomi dan politik kemudian menjadi bahasan yang menyatu kembali terutama dengan munculnya tokoh seperti Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, James Buchanan, Gordon Tullock yang mengembangkan ekonomi politik baru (*new political economics*). Mereka memiliki dua variasi mengenai ekonomi politik baru, yaitu teori pilihan rasional (*rational choices theory*) dan pilihan

publik teori (*public choice theory*), kedua teori ini berorientasi pada ekonomi kelembagaan (Deliarnov, 2006: 2).

Hingga kini di banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia ekonomi dan politik menjadi satu kajian yang secara khusus dibahas, di samping tentu saja, kajian masing-masing terkait ekonomi atau politik tetap dibahas secara terpisah. Di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, ekonomi dan politik disatukan pembahasannya dengan pembangunan, sehingga menjadi ekonomi politik pembangunan. Maksudnya, ekonomi dan politik perlu dipadukan untuk pembangunan manusia.

B. Pengertian Ekonomi

Ekonomi memiliki makna dan pengertian yang luas, seiring dengan semakin dominannya peran ekonomi dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup individual-personal, keluarga, masyarakat, bangsa negara, bahkan pada lingkup kehidupan yang lebih luas lagi, kehidupan global, lintas negara. Ekonomi menjadi titik sentral pembahasan para pemimpin maupun rakyat biasa.

Meskipun sebetulnya asal muasal ekonomi hanya dalam lingkup dan urusan rumah tangga. Seperti yang bisa terlihat dari makna bahasa ekonomi. Secara etimologi, ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan. Sehingga, secara bahasa, ekonomi bernama aturan rumah tangga, atau hal-hal yang terkait dengan kerumahtanggaan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kerumahtanggaan itulah ekonomi. Begitu pula ekonomi itu selalu terkait dengan urusan rumah tangga. Artinya, bagaimana individu yang ada di dalam rumah mengurus dan mengatur urusannya (Sardjono, 2017: 54).

Dalam perjalannya, ekonomi tidak hanya berbicara hal yang terkait dengan urusan rumah tangga dalam artian anggota keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak, tetapi juga semakin meluas menjadi rumah tangga perusahaan, rumah tangga sebuah masyarakat di daerah tertentu, atau rumah tangga masyarakat di wilayah tertentu, atau bahkan rumah

tangga sebuah negara, dan seterusnya.

Dalam pengertian ³⁹minologi (istilah) ekonomi adalah aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara untuk menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat, maupun negara, sehingga kebutuhan materi masyarakat atau rakyat dalam sebuah negara, atau di sebuah wilayah dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pengertian ini, ekonomi bermakna mengatur urusan atau hal-hal yang terkait dengan kepemilikan, pembagian, pendistribusian dan lainnya (Sholahuddin, 2007: 3).

Seperti yang terlihat dari pengertian ekonomi tersebut, jelas bahwa ekonomi tidak hanya terkait semata-mata dengan urusan kerumaha-tanggaan semata, namun juga terkait dengan distribusi terhadap barang-barang yang diproduksi, sehingga mampu digunakan oleh warga/masyarakat secara umum.

Ada pula yang menyebut bahwa ekonomi adalah aktivitas ¹³manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antara berbagai keinginan manusia dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Karena itu, dalam ekonomi yang selalu menjadi pembahasan adalah kelangkaan atau kekurangan dan upaya pemenuhan terhadap kelangkaan tersebut tentu saja dengan cara melakukan kegiatan produksi (Purnaya, 2016: 4-5).

Lebih konkret lagi, ekonomi terkait langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia mulai dari sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan dasar manusia, untuk dipenuhi. Berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hidup tersebut, di antara cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan produksi. Hasil produksi tersebut kemudian, didistribusikan, dibagi dan diberikan kepada orang lain yang mengalami kekurangan atau membutuhkan. Masing-masing orang yang hidup memiliki kebutuhan dan keperluan masing-masing, proses bertukar dan memenuhi kebutuhan hidup tersebut merupakan bentuk nyata dari ruang lingkup ekonomi.

C. Pengertian Politik

Politik sejak awal dikemukakan sesungguhnya merupakan sesuatu yang baik, mulia dan bernilai tinggi. Sebuah idealita, cita-cita yang ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. sebagaimana yang dikemukakan penggagas terdahulu tentang politik, Aristoteles. Menurut Aristoteles, politik adalah tindakan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik (Surbakti, 1992: 3).

Aristoteles secara jelas menyebut bahwa politik berdimensi menciptakan kehidupan bersama, bukan kehidupan personal atau kelompok, tetapi kehidupan bersama (*living together*) yang memiliki makna kemajuan (progresif) sebagai lawan dari stagnan. Maka disebutlah manusia adalah makhluk berpolitik (*homo politicon*), dengan berpolitik akan tercipta kehidupan manusia yang lebih baik.

Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, ahli lain yang berbicara mengenai politik juga menitikberatkan politik pada persoalan perbuatan manusia yang berorientasi pada kehidupan bersama (kolektif) bukan kehidupan individual. Menurut Talcott Parson (1966) politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan usaha kolektif, bagi tujuan-tujuan yang juga bersifat kolektif (Karimi, 2012: 26).

Politik sebetulnya menjadi satu kata kunci menciptakan kehidupan bersama (kohesivitas) di antara anggota masyarakat, dengan kehadiran politik, maka persoalan yang sifatnya individual menjadi teralienasi dalam kehidupan bersama, karena yang dikedepankan adalah semangat kolektif, kebersamaan di antara sesama warga masyarakat. Begitu pula dengan mereka yang terjun ke dalam dunia politik praktis, perlu menjadi hubungan bersama dengan pemilih maupun masyarakat secara umum.

Masih senada dengan ahli lain, Merkl juga secara umum menyebut politik sebagai jalan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat, berupa terwujudnya keadilan. Menurut Peter Merkl, politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Merkl, 1967: 13).

Budiardjo memaknai politik secara lebih operasional dengan mengatakan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik itu diperlukan adanya aturan yang diterima oleh mayoritas warga. Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga, dan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis (Budiardjo, 2008: 15).

Sedangkan Abdul Halim lebih melihat politik sebagai seni, seni mengatur kekuasaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, pertentangan, bahkan juga konflik. Menurut Abd. Halim, politik adalah seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda, melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama, untuk tujuan bersama aman, makmur, sejahtera (Halim, 2014: 3).

Namun di antara ahli yang menyebut politik tidak linier dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli lain adalah Harold D Laswell yang mengemukakan politik pada tataran praktis. Lasswell mengatakan, politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan mendapatkan dan bagaimana cara atau upaya untuk mendapatkan (*who gets what, when and how*). Jelaslah dalam politik ada yang namanya pragmatisme dan transaksional (Noor, 2007: 53).

111

D. Pengertian Ekonomi Politik

Interrelasi di antara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, seperti: produksi, investasi, harga, perdagangan, konsumsi, distribusi, dan lain-lain (Caporaso & Levine, 1992: 79). Jelaslah, bagi Caporaso dan Levine, bahwa ekonomi politik mengulas dan membahas hubungan atau keterkaitan berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi dan politik. Artinya, setiap aspek yang ada di dalam ekonomi dan politik selalu memiliki keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa setiap proses di dalam ekonomi memiliki hubungan dengan proses politik. Begitu pula proses politik memiliki hubungan dengan ekonomi. Proses politik berpengaruh kepada proses ekonomi, dan proses ekonomi berpengaruh terhadap proses politik.

Begitu pula dengan institusi atau aktor (pelaku) ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktor politik, dan aktor politik tidak akan jauh dari aktor ekonomi, kedua aktor tersebut memiliki ketersambungan atau keterkaitan satu sama lain. Inilah yang menjadi objek kajian dari komunikasi politik, bagaimana hubungan, keterkaitan dan interrelasi di antara keduanya bisa terjadi dan bagaimana dampaknya.

Intinya, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam praktiknya akan sangat terkait dengan politik, apakah proses politik, aktor politik maupun kebijakan politik. Kebijakan politik tentu saja akan terkait secara langsung, karena orang yang memiliki kekuasaan (*power*) dalam jabatan politik tertentu, terlebih lagi pada level negara, maka memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan mendistribusikan apa yang terkait dengan produksi, perdagangan, konsumsi dan lain-lain.

E. Pengertian Pembangunan

Menurut Ali Kabul Mahi, pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan yang legal bagi pencapaian keinginan, kebutuhan dan aspirasi setiap warga, yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanistic*), mencakup aspek pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equalization*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Mahi, 2016: 2).

Pembangunan secara jelas sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah atau keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh Seers (1969) ada faktor pertimbangan nilai (*value judgment*). Atau menurut Riggs (1966) pembangunan memiliki orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*). Pembangunan memang selalu dikaitkan dengan perubahan (transformasi) ke arah lebih baik yang diwujudkan dalam bentuk modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan oleh Goulet (1977), pembangunan, modernisasi dan industrialisasi menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, sedangkan modernisasi adalah

suatu bentuk khusus (*special case*) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (*a single facet*) dari pembangunan. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan bersifat lebih luas dari modernisasi dan industrialisasi. Dengan kata lain, industrialisasi dan modernisasi menjadi bagian dari pembangunan yang memiliki makna, kandungan dan penjabaran yang lebih luas. Seperti dikatakan Rostow (1967), modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk industrialisasi, yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam melalui kerjasama yang lebih erat manusia. Berkaitan dengan pembangunan yang juga merupakan pembaharuan yang juga merupakan suatu bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki, tetapi lebih berkait dengan nilai-nilai atau sistem nilai. Pembangunan, dengan demikian juga berarti pembaharuan, meskipun pembaharuan tidak selalu harus berarti pembangunan (Sasmita, 1995: 2-3).

Sondang Siagian memaknai pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dapat dibuat lebih detail, pembangunan memiliki beberapa dimensi sebagai berikut.

Pertama, pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, tidak sekali jadi. Jika proses maka perlu ada tahapan di dalam melaksanakan program pembangunan, pentahapan dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. Atau misalnya hanya berdasarkan insting semata, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembangunan.

Ketiga, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. *Keempat*, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. *Kelima*, modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional, seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi. *Keenam*, pembangunan ditujukan untuk membangun bangsa (*nation building*) secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara (Siagian, 2009: 10).

F. Sejarah Pembangunan

Pembangunan telah mulai dikaji pada abad ke-19, di Amerika Serikat, dipelopori oleh antara lain Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Leonard White. Namun ada yang menganggap bahwa administrasi pembangunan telah dimulai lebih dulu Alexis de Tocqueville. Kelahiran administrasi pembangunan sebetulnya dimulai dari negara-negara yang sudah lebih maju dari segi pembangunan.

Jika diamati, pembangunan sesungguhnya telah dimulai setelah Perang Dunia II berakhir, yang kemudian berlanjut secara lebih intensif pada tahun 1960an. Setelah usai perang dunia kedua, negara-negara di dunia terpolarisasi dalam dua bentuk yang dapat diidentifikasi, yaitu; *pertama*, ada negara yang menang perang dunia kedua dan sebaliknya ada negara yang kalah. *Kedua*, ada hubungan yang terjalin antara negara yang menang maupun negara yang baru merdeka.

Hubungan tersebut dalam dua bentuk; *pertama*, negara yang menang perang menjadikan negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sebagai sumber bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri tertentu dalam negerinya sendiri. *Kedua*, negara yang menang perang menjadikan negara bekas jajahan yang baru merdeka sebagai pasar bagi produk yang dihasilkannya dan sebagian

produk tersebut hasil produksinya melimpah, sehingga jika tidak dilempar keluar negeri justru akan menjadikan harga barang menjadi anjlok, karena stok yang melimpah (Siagian, 1978: 5).²⁵

Amerika Serikat (AS) yang menang perang, menjadi Negara pertama di dunia yang cepat bangkit ekonominya dan dapat menempatkan negaranya sebagai kekuatan ekonomi terbesar atau nomor satu dunia. Dengan posisi ekonomi yang demikian, AS berinisiatif untuk membangun ekonomi dunia melalui pemberian bantuan kepada Negara-negara yang menjadi sekutu dalam perang maupun lawan-lawannya yang difokuskan di Negara Eropa Barat.⁷

Hal tersebut sesuai dengan rencana Marshall dari Amerika, sesuai dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall. Nama aslinya adalah Program Recovery Eropa. Program ini ditawarkan kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Eropa Barat dengan bantuan sebesar 13 miliar USD selama empat tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya tetapi ditolak karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya integrasi Eropa seperti yang dilihat saat ini. Program ini dijalankan oleh *Economic Cooperation Administration* (ECA). Salah satu misi ECA adalah membendung pengaruh Soviet di Eropa (Mills, 2008: 195).

Demikianlah, Amerika Serikat yang berhasil membantu beberapa negara Eropa keluar dari krisis dan berhasil membangun kembali negara pasca perang dunia kedua, semakin agresif dan semangat juga membantu negara di belahan dunia lain, termasuk Afrika dan Asia. Di wilayah tersebut juga banyak negara yang baru merdeka bebas dari penjajahan. Bantuan Amerika Serikat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai bantuan ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. Namun pengalaman berhasil di negara Eropa, ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan bantuan Amerika Serikat di negara Asia dan Afrika. Banyak negara yang dibantu Amerika malah tidak bisa berkembang, dan hanya menjadi negara yang menumpuk hutang, tanpa tahu dan bisa kapan hutang-hutang tersebut bisa dikembalikan, atau


dibayar. Meski rezim telah berganti, pemerintahan silih-berganti, termasuk di Indonesia, tetap saja tidak bisa keluar dari masalah hutang (Ngusmanto, 2015: 30-40).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik pembangunan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik dan pembangunan!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik pembangunan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak-anak adalah ketika mereka mendengarkan kisah-kisah yang penuh kebohongan. Pada saat usia ini, mereka memiliki kemampuan alami yang mudah menangkap berbagai persepsi dari apa yang mereka dengar“
(Plato filsuf Yunani, 427-347 SM)





Bab 2

**Ekonomi Politik
Sosialisme**



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik sosialisme.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik sosialisme.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik sosialisme.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik sosialisme.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik sosialisme.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi politik sosialisme.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik sosialisme.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik sosialisme.

A. Sejarah Sosialisme

Sosialisme sering disebut-sebut sebagai antitesis dari kapitalisme. Kapitalisme disebut sebagai penyebab terjadinya akumulasi modal pada pihak tertentu, yaitu para tuan tanah, dan pemilik modal. Kapitalisme juga dinilai menciptakan polarisasi golongan antara majikan dan buruh, atau golongan borjuis dan proletar. Majikan berkuasa dari buruh, kaum borjuis menguasai sumber-sumber produksi dan modal. Sementara kaum proletar atau buruh, menjadi alat kepentingan kaum borjuis dan pemilik modal. Ada semacam ketidakseimbangan dalam pola kerjasama yang diciptakan oleh sistem kapitalisme.

Sosialisme lahir dari pemikiran seorang tokoh di Prancis yang bernama Francois Babeuf (1760-1797) yang berpendapat bahwa, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap segala apa yang ada di muka bumi, termasuk kekayaan. Pemikiran Babeuf berkembang seiring dengan terjadinya Revolusi Prancis. Babeuf memperjuangkan pemikiran mengenai kesamaan antara buruh dengan majikan, antara orang kaya dan pekerja (Hudon, 1939).

Tokoh lain yang mempopulerkan pemikiran ekonomi politik sosialisme adalah tokoh asal Prancis, Saint Simon, atau Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, disebut juga Henri de Saint-Simon (1760-1825). Saint Simon pula yang pemikirannya meletakkan sosialisme sebagai antithesis atau berseberangan dengan kapitalisme. Kapitalisme lebih cenderung menyerahkan tata kelola perekonomian kepada para pemilik modal, termasuk dalam hal produksi dan distribusi. Simon berpikir sebaliknya, negara yang harus mengatur produksi dan distribusi (Picon, 2003). Hal ini yang membuat Simon lebih populer sebagai tokoh sosialisme dibandingkan dengan Babeuf atau lainnya. Pemikirannya secara langsung secara diametral berhadapan dengan kapitalisme.

Sejarah sosialisme juga tidak bisa dilepaskan dari tokoh asal Jerman, bernama Karl Marx (1818-1883). Popularitas Marx sebagai tokoh sosialisme bahkan mengalahkan pendahulunya seperti Babeuf dan Simon. Di kalangan penggemar pemikiran sosialisme pemikiran Marx yang tertuang dalam “Das Kapital” (sejarah manusia adalah

sejarah perjuangan kelas), seperti menjadi buku bacaan wajib yang tidak boleh dilewatkan.

Pemikiran Marx didorong oleh pemikiran berbasis materialisme. Menurut Marx apa yang dipikirkan oleh manusia tidak lain merupakan refleksi mengenai dunia material dimana manusia berada. Penekanan pemikiran pada aspek materialisme ini yang selanjutnya mengemuka di dalam teori kelas atau teori konflik yang dikemukakan oleh Marx. Marx memandang, bahwa selama kepemilikan alat produksi, sebagai materi untuk menciptakan kesejahteraan masih dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal, maka yang namanya kesejahteraan dalam ekonomi tidak akan pernah tercapai. Maka cara yang harus ditempuh adalah dengan mengambil alih dan menguasai alat-alat produksi oleh kalangan buruh, kemudian pengelolaannya dikendalikan oleh kaum buruh. Dengan cara itu kesejahteraan dapat tercapai (Veblen, 1906).

Sejarah sosialisme juga tidak lepas dari Robert Owen (1881-1858). Owen lebih dikenal sebagai pelopor sosialisme di Inggris. Berbeda dengan pendahulunya, pemikiran Owen lebih moderat. Jika pendahulunya, seperti Babeuf dan Marx mengedepankan adanya pertentangan kelas, antara kelas buruh dan majikan, atau antara kelas borjuis dan proletar, tidak begitu dengan Owen. ⁵¹ Meski begitu, Owen tetap melihat proses industrialisasi yang terjadi di Inggris, melahirkan tatanan masyarakat, dimana golongan pemilik modal akan mampu berkembang dengan begitu pesat, sementara golongan masyarakat tak bermodal ²²² menjadi sebuah kelompok yang terpinggirkan. Namun Owen tidak terlalu mengedepankan pertentangan kelas dan perjuangan kekerasan. Owen lebih mengedepankan kerjasama. Owen menilai solusi efektif untuk membangkitkan masyarakat yang tidak memiliki modal adalah dengan cara memben ⁵¹ komunitas kolektif kecil. Komunitas ini dibangun berdasarkan prinsip dan aturan yang jelas. Sehingga dapat membantu memperbaiki perekonomian, selanjutnya meningkat kesejahteraan anggotanya (Gorb, 1951).

Pemikiran Charles Fourier (1772-1837) asal Prancis juga menjadi bagian dari sejarah sosialisme. Fourier termasuk tokoh yang dikenal

tidak terlalu mempertentangkan kelas di dalam pemikirannya, sama dengan Owen. Menurut Fourier, manusia memiliki hasrat dan keinginan yang beragam, sehingga sistem produksi harus didasarkan kepada hal yang menarik, sehingga menimbulkan hasrat bagi tenaga kerja (Erreygers, 2014).

162

B. Pengertian Sosialisme

Secara bahasa, sosialisme berasal dari bahasa Prancis “socius” yang artinya masyarakat. Kelahiran sosialisme pertama di Prancis pada tahun 1830. Secara istilah, sosialisme merupakan ideologi ekonomi politik yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan di kalangan masyarakat secara merata, tidak hanya di tangan segelintir orang. Pemerataan kesejahteraan diperoleh dengan cara evolusi, tanpa kekerasan, persuasif, dan konstitusional (Spengler, 1928).

Sosialisme awalnya merupakan pemikiran yang memandang bahwa penguasaan dan pembagian alat produksi serta hasil produksi dilakukan secara rata kepada masyarakat (Santoso, 2011). Sosialisme yang awalnya merupakan gerakan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat industri, kemudian melahirkan gerakan politik, terutama dengan lahirnya sebutan Marxisme-Leninisme. Sosialisme lebih dikenal sebagai gerakan politik, yang didorong oleh pemikiran Marx dan Lenin (Verster, 1999).

Sosialisme mendapat banyak penyebutan. Ada yang menyebut dengan sosialisme demokrat. Hal ini merujuk pada sosialisme yang menganut paham yang merujuk bahwa sosialisme merupakan bentuk dari sistem politik yang moderat, yang memandang sosialisme secara lebih luas, termasuk dalam demokrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey. Yang mengemukakan bahwa sosialisme sebagai bentuk kebebasan dapat menggunakan kekuasaan politik dengan cara yang demokratis dan konstitusional (Cork, 1949).

Sosialisme demokrat merupakan lawan dari sosialisme radikal. Sosialisme radikal identik dengan komunisme. Salah satu negara yang pernah berkuasa dengan ideologi sosialisme komunisme adalah Uni

Soviet. Namun pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh, sehingga turut membubarkan negara sosialisme komunisme yang bertumpu pada Leninisme. Keruntuhan negara sosialisme komunisme Uni Soviet disebabkan inefisiensi akut dari sistem yang dikolektivasi, keborosan ekonomi, keterbelakangan teknologi dan sistem hegemoninya. Selain itu juga adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet, serta tidak diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah Uni Soviet (Sakwa, 2013).

Dalam pandangan sosialisme, kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Lebih baik dari cara hidup sendiri-sendiri, atau menikmati kepemilikan secara sendirian (Gamble, 1981). Sosialisme menentang segala bentuk kepemilikan yang dikuasai oleh individu. Hal tersebut dinilai memacu sifat egois anggota masyarakat. Selanjutnya akan mengganggu dan merusak keharmonisan yang terjadi di masyarakat (Muldoon, 2019).

Sosialisme juga menginginkan alat-alat produksi dan distribusi dikuasai oleh negara, sebagai bagian dari representasi masyarakat secara umum. Sosialisme lebih menginginkan alat produksi dikuasai oleh negara daripada oleh segelintir orang kaya yang menguasai modal. Sebab aparatur negara atau birokrasi dinilai sebagai representasi masyarakat umum. Sementara orang kaya dan pemilik modal, adalah representasi dari kepentingan dirinya sendiri (Verdery, 1991).

Penguasaan negara atau lebih tepatnya aparatur negara terhadap kepemilikan alat-alat produksi dan distribusi diharapkan, sebagai jalan dan cara untuk menghilangkan eksploitasi, yang terjadi dalam dunia kapitalisme. Eksploitasi yang dilakukan oleh orang kaya dan pemilik modal. Sehingga penguasaan alat produksi yang diwakili oleh negara, dapat menghapuskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum (Nee, 2013).

Sosialisme berpandangan bahwa semua manusia, dari kelompok apapun memiliki hak yang sama, dan kelompok manapun. Sehingga dengan begitu, mereka memiliki kesempatan yang sama pula untuk

mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Tidak boleh ada perbedaan berdasarkan kelompok dan kelas sosial. Maka negara harus berada di atas institusi manapun yang ada di masyarakat (Taylor, 1929).

Sosialisme kembali kepada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki sifat kebersamaan, saling berbagi, berkumpul, dan menyukai keharmonisan hubungan di dalam masyarakat, saling bekerja sama. Hal tersebut mendasari etika hubungan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. (Wikandaru & Cahyo, 2016).

C. Prinsip Dasar Sosialisme

Ekonomi politik sosialisme memiliki semacam prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi politik lain. Prinsip dasar tersebut menjadi semacam ciri khas atau karakteristik yang mendasari pemikiran dan doktrin di dalam sosialisme. Prinsip dasar tersebut muncul sejak kelahiran sosialisme. Setidaknya ada tiga catatan penting yang berkaitan dengan prinsip dasar sosialisme yang dikemukakan ahli atau tokoh yang pemikirannya cenderung kepada sosialisme, baik tokoh nasional maupun tokoh internasional.

1. Sosialisme, merupakan sistem ekonomi politik yang menekankan pentingnya peranan komunal dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang (Braunthal, 1961). Sosialisme menitikberatkan peran komunitas atau masyarakat dan negara di dalam penguasaan dan pengelolaan seluruh hal yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Peran negara lebih ditekankan daripada peran swasta (*private sector*), yang direpresentasikan oleh pemilik modal.
2. Sosialisme merupakan sistem ekonomi politik yang sebagian besar keputusannya diambil dan diatur oleh struktur dan lembaga negara atau para pekerja. Negara yang membuat kebijakan dan aturannya jalannya perekonomian dan politik suatu masyarakat. Tidak diserahkan kepada pasar, yang banyak diatur dan dikendalikan oleh

pemilik modal (pengusaha) (Arrow et al., 1978). Dominasi negara semakin besar dengan adanya kewenangan untuk membuat berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan kegiatan ekonomi dan politik. Sehingga dalam sistem sosialisme, peran pemilik modal atau pihak swasta semakin minim, jika boleh dikatakan tidak ada. Jika pemilik hendak masuk ke dunia ekonomi, harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah.

3. Bagi beberapa tokoh penting dunia, seperti sosialisme bukan sekadar suatu sistem masyarakat. Namun sosialisme juga merupakan suatu tuntutan perjuangan, yakni kemakmuran bersama. Melalui sosialisme cita-cita kemakmuran negara diperjuangkan (Ratih Lestarini, 2013).

D. Ciri Khas Sosialisme

- Sosialisme mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, di atas kepentingan individu, pemilik modal dan orang kaya.
- Sosialisme menetapkan tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh, sebab semua sama. Setiap orang dianggap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tidak ada beda antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- Sosialisme mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama, tidak ada perbedaan setiap individu.
- Sosialisme mengakui kepemilikan hak milik pribadi atas alat-alat produksi atau mesin industri secara terbatas. Jumlah kepemilikan dibatasi, tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan oleh negara.
- Sosialisme berupa untuk mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis, tanpa kekerasan dan anarkis.
- Sosialisme berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbaiki nasib buruh melalui usaha yang dinamis, luwes yang dilakukan secara bertahap.


- Sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Dalam dunia sosialisme tidak dikenal namanya monopoli kekayaan di tangan segelintir orang.
- Sosialisme mempunyai pemikiran ekonomi negara centris. Negara memiliki peran sentral. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga tidak ada yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin.
- Sosialisme mencanangkan peran negara juga termasuk dalam hal pembinaan dan mengkoordinasikan kehidupan kebersamaan di antara masyarakat.
- Sosialisme mendorong pemikiran keagamaan bahwa manusia harus hidup saling tolong menolong dan bekerjasama, tidak mengutamakan kompetisi.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik sosialisme!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik sosialisme!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik sosialisme yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Manusia adalah ‘binatang’ politik“
(Aristoteles, filsuf Yunani, 384-322 SM)**





Bab 3

**Ekonomi Politik
Kapitalisme**



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik kapitalisme.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik kapitalisme.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik kapitalisme.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik kapitalisme.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik kapitalisme.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi politik kapitalisme.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik kapitalisme.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik kapitalisme.

A. Sejarah Kapitalisme

Sejarah kapitalisme ditandai dengan adanya perilaku merkantilisme, yang mengutamakan dan menguntungkan kelompok pedagang swasta yang berkontribusi pada kemakmuran bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya penumpukan emas dan perak yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada tahun 1500-1800). (Allen, 1991). Secara gamblang, yang menerapkan sistem ekonomi politik kapitalisme adalah Amerika Serikat dan Prancis. Setelah itu, pada abad 19 semakin banyak negara di dunia yang menerapkan kapitalisme seperti Inggris, Belanda, Jerman, Belgia dan Jepang (Western, 1993).

Kapitalisme kemudian mengalami proses transformasi revolusioner memasuki babak baru. Yaitu babak dimana kapitalisme mulai memasuki pasar bebas dan demokrasi liberal. Hal ini seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II yang menyebabkan terjadinya polarisasi negara-negara besar di dunia, antara yang menang perang dan negara yang kalah perang. Babak baru tersebut terjadi pada tahun 1940-an. Negara yang menang perang, terutama Amerika Serikat dan sekutunya melakukan upaya ekspansi perdagangan bebas pada satu sisi, pada sisi lain mempromosikan sistem politik demokrasi. Hal tersebut didorong pada negara-negara yang kalah perang dan negara-negara yang baru mendapat kemerdekaan (Erlenbacher et al., 2019).

Sejak saat itu kapitalisme secara jelas dan gamblang, tidak malu berbicara mengenai persoalan ekonomi, yang hanya berhubungan dengan pasar, namun juga membahas keterkaitan sosial, politik dan ideologis (Hejeebu & McCloskey, 2004). Para sejarawan yang membahas mengenai kapitalisme semakin memfokuskan perhatian dan kajian pada adanya keterikatan dan keterkaitan antara ekonomi dan politik serta sosial, daripada hanya berbicara mengenai ekonomi yang semata-mata berhubungan dengan pasar. Kapitalisme menjadi semacam gerakan ganda yang pada satu sisi, selalu membicarakan mengenai kemandirian pasar yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik, seperti negara. Namun pada sisi yang lain, perkembangan dunia, memungkinkan terjadinya intervensi oleh negara untuk membongkar

dominasi institusi feodal, untuk melindungi produsen (Hilt, 2017).

Wajah baru kapitalisme yang mulai mendua, membenarkan persoalan intervensi negara terhadap pasar semakin menemukan jawabannya dengan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pemikiran dan doktrin dalam kapitalisme yang memisahkan pasar dengan negara sangat dianut dan dijunjung tinggi oleh para penganut kapitalisme. Negara tidak boleh campur tangan terhadap pasar. Pasar harus dibiarkan mandiri dan diatur sendiri oleh kekuatannya berupa kebijakan dan aturan sendiri (self regulation), yang sering dikenal istilah adanya permintaan dan suplai (supply and demand).

Jangankan membahas keuntungan, ikut serta menentukan harga barang yang ada di pasar negara tidak dibenarkan. Ini sesuai dengan semangat liberalisme dan kebebasan pasar yang tidak boleh mengatur dan mengikat para pelakunya (Pirenne, 1914). Namun sejak bangkrutnya Lehman Brothers, sebuah bank besar di Amerika Serikat, dan kolapsnya Bear Stearns, sebuah perusahaan keuangan raksasa juga, kemudian berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda banyak negara di dunia. September 2008, merupakan babak baru dalam dunia kapitalisme yang selama ini dianggap sebagai suatu ideologi ekonomi politik yang paling kuat dan mapan, kini harus berhadapan dengan realitas sebaliknya. Buruknya kondisi perekonomian Amerika Serikat dan dunia akibat peristiwa itu memaksa penganut kapitalisme untuk berpikir ulang mengenai apa yang dipercaya. Pasar yang sudah berada dalam kondisi ambruk, tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Semakin dibiarkan semakin mengalami kelesuan. Pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan intervensi terhadap sistem keuangan yang ambruk tersebut, dengan melakukan bailout sebesar USD 700 miliar (Yeldan, 2009).

Insiden Lehman Brothers dan Bear Stearns di Amerika Serikat menandai babak paling baru dalam kapitalisme, di mana pasar ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, sebagaimana yang digaungkan oleh penganut kapitalisme. Pasar ternyata membutuhkan negara. Tesis tersebut kemudian membuat kapitalisme memiliki wajah

baru yang disebut dengan neo kapitalisme. Dimana pasar masih ingin tetap mandiri tanpa campur tangan negara, namun pada saat ambruk menuntut negara untuk ikut bertanggung jawab (Ismulyadi, 2016).

B. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kapal “capital” yang artinya modal. Secara sederhana kapitalisme diartikan sebagai sistem perekonomian yang mengunggulkan faktor modal di dalam menggerakkan roda perekonomian secara nasional maupun global. Dengan bahasa lain adalah, kapitalisme mengorientasikan roda dan perputaran ekonomi dikendalikan oleh para pemilik modal. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme, yang orientasinya pengendalian perekonomian dikendalikan oleh negara, sementara pemilik modal hanya bersifat membantu negara di dalam memerankan pengendalian perekonomian (Alesina et al., 1993)

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal (capital), berupa kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kegiatan produksi, maupun barang lain yang menjadi simpanan. Kapitalisme mendasarkan konsep ekonominya pada modal. Modal sebagai kekuatan utama penggerak perekonomian. Dulunya modal adalah berupa harta kekayaan yang tidak bergerak berupa tanah, dan aset lainnya. Namun kini modal diwujudkan dalam bentuk uang. Uang kemudian menjalani proses transformasi menjadi investasi. Investasi yang kemudian menggerakkan dinamika kehidupan perekonomian di era modern. Semakin besar investasi di suatu negara, maka laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil investasi, maka semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi (Levy, 2017).

Maka, ekonomi kapitalisme menginginkan kemudahan dalam kegiatan investasi. Investasi yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup kawasan atau daerah tertentu, atau negara tertentu, namun juga menjangkau berbagai negara yang ada di dunia. Bagi kapitalisme negara-negara di dunia yang menerima investasi akan masuk pada jaringan

ekonomi global, baik sebagai negara yang menjadi sumber produksi barang maupun sebagai pasar global. Kapitalisme menghendaki, tidak ada hambatan bagi kegiatan investasi yang dilakukan di negara tujuan investasi. Bila iklim politik di negara yang menjadi tujuan investasi tidak kondusif, maka dengan sendirinya, investasi akan cabut dan pindah dari negara tersebut. Dalam perekonomian di era modern, kemudian dikenal dengan istilah kapitalisme global. Kekuatan modal yang berada di satu negara dapat mengendalikan perekonomian negara lain (Callinicos, 2007).

Menjadi relawan konteksnya, bila kapitalisme tidak hanya sekedar sistem ekonomi semata, namun juga mencakup sistem politik yaitu demokratisasi. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak yang setara baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Selain itu, dalam konteks memilih, setiap orang mendapat hak yang sama. Dosen memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan tukang copet. Tokoh agama memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan tukang copet. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Begitu seterusnya, sistem ini dikenal dengan “satu orang satu suara” (*one man one vote*). Maka, negara-negara yang menjadi pelopor dan penganut kapitalisme memiliki kepentingan untuk mendorong supaya negara-negara di dunia menerapkan sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah jantung lain dari kapitalisme yang terus memompakan darah kesetaraan di dalam berpolitik. Selanjutnya, peran negara semakin berkurang di dalam mengendalikan warga, sebab secara politik warga memiliki kesetaraan dengan para penyelenggara negara. Sehingga negara tidak bisa seenak hati, mengatur proses politik maupun ekonomi.

Dalam praktik kapitalisme, antara ekonomi dan politik memiliki hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik (*resiprokal*). Kekuatan ekonomi di suatu negara, dapat menentukan kekuatan politik di negara tersebut. Seperti penentuan partai politik politik apa yang akan menjadi pemenang, atau siapa tokoh yang akan menjadi presiden. Sebaliknya, tatanan dan sistem politik yang ada di suatu negara dapat membentuk kekuatan ekonomi dan bisnis, atau dapat menjadi jalan

bagi perusahaan tertentu untuk berjaya secara ekonomi (Schlumberger, 2008).

Selanjutnya, gerakan demokratisasi juga sejalan dengan gerakan liberalisme. Kapitalisme tidak hanya menjadi pemikiran ekonomi dan politik, namun gerakan sosial, seiring dengan semakin tingginya kesadaran untuk menyuarakan hak asasi manusia. Kapitalisme tumbuh seiring dengan gerakan liberalisme yang terus menguat, menuntut kebebasan individual. Negara dan agama, tidak memiliki hak untuk membatasi apa yang dianggap sebagai wilayah pribadi (*private*).

C. Prinsip Kapitalisme

Kapitalisme memiliki prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi politik lainnya. Meski mengalami berbagai dinamika dalam praktiknya, prinsip tersebut selalu dapat ditemukan pada kapitalisme, dari sejak awal kehadirannya, hingga kini. Setidaknya ada tiga prinsip yang ada di dalam kapitalisme.

Pertama, modal hal utama. Dalam ekonomi kapitalisme modal merupakan faktor utama dalam pertumbuhan, perkembangan, dan penggerak perekonomian. Sehingga diperlukan adanya pengumpulan sebesar-besarnya untuk memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tidak hanya penumpukan modal yang biasanya dilakukan dalam ekonomi kapitalisme. Namun seluruh kegiatan, aktivitas harus diarahkan pada pengurangan pengeluaran modal. Maka di dalam kapitalisme dikenal adanya kompetisi. Kompetisi merupakan bagian dari upaya untuk menekan pengeluaran modal, untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Selain itu kompetisi juga berupaya untuk mewujudkan lahirnya produktivitas. Dengan sedikit sumber daya, diharapkan dapat menghasilkan hasil yang banyak. Selanjutnya yang dilakukan adalah efisiensi, memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan hasil produksi yang banyak. Hadirnya mesin menggantikan tenaga manusia bagian dari efisiensi.

Kedua, pemerintah harus melepaskan diri dari ikut serta untuk campur tangan (*hands-off*), dari kegiatan perekonomian dan mem-

biarkan semuanya bebas berjalan sesuai dengan kondisi pasar (*laissez-faire*). Untuk selanjutnya pasar dikendalikan oleh tangan tidak terlihat (*invisible hand*), yang dikenal dengan hukum “ketersediaan dan permintaan” (*supply and demand*). Campur tangan pemerintah, kecuali untuk barang dan jasa publik tertentu, dinilai hanya akan mendatangkan inefisiensi dan pilih kasih, sehingga tidak memungkinkan terjadinya persaingan yang adil. Pemerintah yang memiliki perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berpihak kepada perusahaannya sendiri, yaitu BUMN dibandingkan dengan perusahaan milik swasta. Hal ini tentu saja akan membuat suasana tidak adil (*unfair*), negara berpihak pada perusahaan tertentu.

D. Model Kapitalisme

Bila dilihat sejarah dan perjalanan kapitalisme, mulai sejak kelahirannya di tahun 1500-an, hingga tahun 2008, maka kapitalisme mengalami berbagai bentuk dan metamorfosis. Kapitalisme terus mengalami dinamika dan perubahan bentuk atau model. Namun jika disederhanakan, kapitalisme mengalami dua bentuk atau model.

Pertama, kapitalisme murni. Kapitalisme murni merupakan sistem ekonomi politik yang memisahkan urusan perekonomian dengan urusan politik, memisahkan urusan pasar dan urusan negara. Ekonomi hanya mengurus pasar, padan politik mengurus pemerintah. Keduanya berada di real yang berseberangan. Meski keduanya harus sama-sama jalan, namun dalam perjalanan tidak bertemu, sampai di ujung jalur juga tidak bertemu, namun dapat menghantarkan para penumpang yang di atas gerbong kereta sampai ke tempat tujuan. Kedua bidang tersebut tidak hanya sekedar tidak bertemu, namun tidak saling masuk ke wilayah masing-masing, tidak melakukan intervensi. Negara tidak masuk ke pasar, ekonomi tidak masuk ke negara. Tokoh yang mempelopori kapitalisme murni adalah Adam Smith (A. Smith, 2005).

Kedua, kapitalisme baru atau kapitalisme modern (*neo capitalism*). Era ini bisa ditandai dengan diperbolehkannya campur tangan atau intervensi negara, apabila pasar atau ekonomi mengalami kegagalan.

Salah satu tokoh yang mempelopori lahirnya kapitalisme baru adalah Paul Anthony Samuelson. Kapitalisme baru semakin mendapatkan semacam pembenaran pada tahun 2008, saat pasar keuangan dan ekonomi Amerika Serikat ambruk. Setelah peristiwa tersebut, paradigma tentang ekonomi dan politik berubah. Perubahan juga terjadi pada penataan struktur baru dalam ekonomi politik. Hubungan ekonomi dengan politik semakin dianggap relevan, termasuk di dalam bidang sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Bahwa bidang ekonomi dalam perjalanannya bukan satu-satunya yang dapat menentukan roda perekonomian suatu negara atau masyarakat. Namun bidang lain juga ikut serta berkontribusi di dalam menggerakkan perekonomian. Perekonomian tidak bisa lagi berdiri sendiri, ia memiliki hubungan dan keterkaitan dengan bidang lain, semacam interdependensi (Fairclough, 2002).

E. Karakteristik Ekonomi Politik Kapitalisme

Ekonomi politik kapitalisme memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari kapitalisme. Ada beberapa karakteristik ekonomi politik yang bisa diidentifikasi, sebagai berikut.

1. Kapitalisme meniscayakan adanya pertarungan bebas, atau kompetisi besar (*free fight competition*). Kompetisi besar tidak hanya terjadi di antara sesama perusahaan yang selevel sama-sama kecil, atau sama-sama besar, namun juga kompetisi antara perusahaan yang tidak selevel, yang besar dengan yang kecil.
2. Alat produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat berada di tangan perorangan (*private sector*). Penguasaan pihak swasta atau perorangan dan pemilik modal sangat dominan, bahkan dominasinya mengalahkan dominasi negara.
3. Aktor ekonomi yang berpusat pada swasta atau pemilik modal menyebabkan adanya kepentingan pribadi pemilik modal yang lebih utama, untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari proses ekonomi yang terjadi. Kepentingan individu, atau diri

sendiri (*self interest*), menyebabkan terjadinya penumpukan modal di kalangan segelintir orang.

4. Aktivitas perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar (*price system*). Di dalam mekanisme pasar berlaku hukum “ketersediaan dan permintaan atau dikenal dengan “*supply and demand*,” bila barang langka maka harganya akan naik, saat terjadi kenaikan harga, maka akan ada banyak pasokan, saat pasokan sudah mulai banyak, maka harga akan kembali stabil. Sebaliknya, bila ketersediaan melimpah, harga akan turun, saat harga turun pasokan akan dikurangi, saat dikurangi, harga akan kembali normal, saat harga normal, barang dipasok kembali. Kondisi ini dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat (*invisible hand*).
5. Mekanisme pasar yang berjalan, menyebabkan minimnya peran negara menjadi sangat minim. Dalam sistem kapitalisme campuran tangan negara tidak dibenarkan, semakin minim peran negara, maka semakin baik. Semakin besar peran negara, semakin buruk. Negara cukup menjadi wasit dari proses yang terjadi.

F. Tokoh-Tokoh Kapitalisme

Pertama, Adam Smith (1723-1790). Adam Smith merupakan tokoh kapitalisme yang dikenal karyanya “*The Wealth of Nations*” (1776). Menurut Smith, manusia menjalankan kegiatan ekonomi atas dorongan untuk kepentingan pribadi, dan mengarahkan manusia dalam mengerjakan segala hal dengan membayar. Kepentingan individu yang didorong oleh liberalisme menciptakan sistem ekonomi pasar bebas. Smith yakin bahwa perekonomian akan baik apabila diatur oleh persaingan (*competition*) yang tak terlihat, yaitu pertempuran di antara dunia usaha untuk mendapatkan suatu pengakuan konsumen (Wong, 2015).

Kedua, David Ricardo (1772-1823). Ricardo merupakan tokoh kapitalis yang lain. Ricardo dikenal lewat karyanya “*On the Principles of Political Economy and Taxation*.” Menurut Ricardo, dengan sistem perdagangan bebas, secara penuh, setiap negara akan mengerahkan

seluruh modal dan sumber daya yang dimiliki untuk pekerjaan yang paling menguntungkan bagi masing-masing negara. Upaya untuk meraih keuntungan pribadi berkaitan dengan kebaikan secara umum. Akan terjadi proses saling mengirim tenaga dan barang (Ricardo, 2005).

Ketiga, John Stuart Mill (1806-1873). Mill tokoh kapitalis yang terkenal melalui karyanya “*Principles of Political Economy*.” Menurut Mill, permintaan komoditas, termasuk permintaan tenaga kerja, berpengaruh pada upah, keuntungan dan kemajuan masyarakat. Ekonomi politik adalah sejarah tentang harta benda yang mengalami proses evolusi dalam berbagai tahapan (Mill, 2009).


Keempat, Thomas Robert Malthus (1766-1834). Malthus tokoh kapitalis yang dikenal dengan karyanya yang cukup fenomenal “*An Essay on the Principle of Population and Other Writings*.” Menurut Malthus, pendapatan kapitalis lebih besar daripada investasi. Artinya, saat kapitalis menginvestasikan uang atau modalnya, maka yang diperoleh oleh kapitalis jauh lebih besar dari yang diinvestasikan. Ada keuntungan yang diperoleh lebih besar dari yang dikeluarkan. Kapitalis lebih suka menyimpan hasil keuntungan, daripada diinvestasikan ulang. Malthus mengusulkan negara mengubah pola distribusi, sehingga kapitalis tidak mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Atmanti, 2017).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik kapitalisme!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik kapitalisme!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik kapitalisme yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**"Aku paling takut pada sapi, sebab ia punya tanduk,
namun tak punya akal"
(Ibnu Sina, Filsuf Muslim, 980-1037)**





Bab 4

Ekonomi Politik Islam



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik Islam.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik Islam.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik Islam.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik Islam.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik Islam.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi politik Islam.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik Islam.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik Islam.

A. Sejarah Ekonomi Politik Islam

Sejarah ekonomi politik Islam sebetulnya dimulai dari sejarah kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun praktik berekonomi dan berpolitik yang kemudian sistem sesungguhnya dimulai sejak Nabi Muhammad berada di Madinah yang menjalankan agenda politik dan ekonomi selain agenda besar lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan penerusnya. Bila dibuat periodisasi sejarah ekonomi politik Islam, maka bisa dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, yaitu pada tahun 632-656 masehi. Periode ini merupakan periode pertama lahirnya pemikiran dan sejarah ekonomi Islam. Kelahirannya bersumber dari wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Secara berangsur-angsur. Pada periode ini, setiap perintah yang turun dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Seperti misalnya perintah untuk meninggalkan riba, dan menghalalkan praktik jual beli di antara para sahabat dan umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu.

Kedua, pada masa khulafaurasyidin memimpin, terdiri dari Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, tahun 656-661 masehi. Ini merupakan periode Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan diteruskan oleh para sahabatnya yang utama. Pada periode ini para sahabat melanjutkan ajaran dari Muhammad SAW, misalnya, Abu Bakar pada saat menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, memenuhi kaum muslim yang tidak mau membayar zakat, sebagaimana zakat yang pernah dibayar pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Ketiga, periode setelah Khulafaur Rasyidin, yang dimulai dari Zaid bin Ali, tahun 738 masehi, Abu Hanifa tahun 787 masehi, Auza'i tahun 774 masehi, Malik tahun 798 masehi, Abu Yusuf tahun 798 masehi, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tahun 804 masehi, Yahya bin Dam tahun 818 masehi, Syafi'i tahun 820 masehi, Abu Ubaid tahun 838

masehi, Ahmad bin Hambal tahun 855 masehi, Yahya bin Hambal tahun 855 masehi, Yahya bin Umar tahun 902 masehi, Qudama bin Jafar tahun 948 masehi, Abu Jafar al Dawudi tahun 1012 masehi, Mawardi tahun 1058 masehi, Hasan Al-Basri tahun 728 masehi, Ibrahim bin Adham tahun 874 masehi, Fudayl bin Iyad tahun 802 masehi, Ma'ruf Karkhi tahun 815 masehi, Dzun Nun Al Misri tahun 859 masehi, Ibnu Maskawaih tahun 1030 masehi, Al-Kindi tahun 1873 masehi, Al-Farabi tahun 950 masehi, dan Ibnu Sina tahun 1037 masehi. Banyak tokoh dengan berbagai disiplin ilmu yang berhasil mengemukakan pemikiran ekonomi politik pada periode ini, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi malah kemudian dikenal dengan gagasannya mengenai kota utama (*al madinah al fadhiblah*).

Keempat, periode yang dipelopori oleh tokoh terkenal mulai dari Al-Ghazali tahun 1111 masehi, dan lainnya. Yaitu Ibnu Taimiyah tahun 1328 masehi, Ibnu Khaldun tahun 1040 masehi, Syamsuddin Al-Sarakhsi tahun 1090 masehi, Nizamul Muluk al-Tusi tahun 1093 masehi, Ibnu Mas'ud Al-Kasani tahun 1182 masehi, Fakhruddin Al-Razi tahun 1210 masehi, Najmudin Al-Razi tahun 1256 masehi, Ibnul Ukhuwah tahun 1329 masehi, Ibnul Qoyyim tahun 1350 masehi, Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi tahun 1300 masehi, Abu Ishaq Al-Shatibi tahun 1388 masehi, Al-Maqrizi tahun 1441 masehi, Al-Qusyairi tahun 857 masehi, Al-Hujwiri tahun 1096 masehi, Abdul Qadir Al-Jailani tahun 1169 masehi, Al-Attar tahun 1252 masehi, Ibnu Arabi tahun 1240 masehi, Jalaluddin Rumi tahun 1274 masehi, Ibnu Baja tahun 1138 masehi, Ibnu al-Tufayl tahun 1185 masehi, Ibnu Rusyd tahun 1198 masehi. Salah satu tokoh terkenal pada periode ini dalam pemikiran ekonomi politik adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rusyd.

Kelima, periode ini dimulai dari Shah Waliullah Al-Delhi tahun 1762 masehi, Jamaluddin Al-Afghani tahun 1897 masehi, Muhammad Abduh tahun 1905 masehi, Muhammad Iqbal tahun 1938 masehi, Ibnu Nujaim tahun 1562 masehi, Ibnu Abidin tahun 1836²⁶³ masehi, Syekh Ahmad Sirhindi tahun 1524 masehi. Tokoh fenomenal pada periode ini adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Keenam, dimulai dari Muhammad Abdul Mannan tahun 1938 masehi, Muhammad Nejatullah Siddiqi tahun 1931 masehi, Syed Nawab Haider Naqvi tahun 1935 masehi, Monzer Kahf, Sayyid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as-Sadr, dan Umer Chapra.

B. Pengertian Ekonomi Politik Islam

Ekonomi politik Islam berbeda dengan dua ekonomi politik lainnya, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Meski tidak seluruhnya berbeda, atau tidak memiliki persamaan sama sekali, namun ekonomi politik Islam memang berbeda dengan ekonomi politik sosialisme dan kapitalisme. Namun tetap saja, ada persamaan antara ekonomi politik Islam dengan ekonomi politik sosialisme maupun ekonomi politik kapitalisme. Misalnya pada pengakuan terhadap kepemilikan individu yang ada di dalam kapitalisme, Islam juga mengakui adanya kepemilikan individu. Begitu pula dengan semangat komunalisme yang ada di dalam sosialisme, sangat diakui keberadaannya di dalam Islam.

Dilihat dari basis dasarnya, ekonomi politik Islam berbeda dengan ekonomi politik sosialisme dan kapitalisme. Ekonomi politik Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang meliputi perkataan, perbuatan Nabi SAW, atau perkataan dan perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan praktik para sahabat Nabi SAW yang pernah menjadi pemimpin, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, meliputi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Di antara kekuatan ekonomi politik Islam adalah terpadunya sumber yang berasal dari langit dan berasal dari bumi. Sumber yang berasal dari langit adalah sumber yang berasal dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini yang tidak dimiliki oleh ekonomi politik kapitalisme dan ekonomi politik sosialisme. Sumber yang kedua adalah sumber yang berasal dari bumi, yang disabdakan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan bersama para sahabatnya menjadi doktrin

yang kemudian diyakini sebagai suatu kebenaran. Tidak diyakini sebagai suatu kebenaran, namun juga memiliki manfaat, kebaikan dan pahala bagi mereka yang mengerjakannya. Maka bila ingin melihat pengertian yang pasti, apa itu ekonomi politik Islam? Maka jawabannya apa dibicarakan di dalam kitab suci Al-Qur'an, dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan dipraktikkan bersama sahabatnya, itulah ekonomi politik Islam.

C. Karakteristik Ekonomi Politik Islam

52 Ekonomi politik Islam memiliki karakteristik dan ciri khas yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan bersama para sahabatnya. Karakteristik tersebut, di antaranya:

Pertama, Kepemilikan individu sangat diakui dan dijunjung tinggi. Kepemilikan pribadi berupa harta benda dan kepemilikan terhadap tubuh dan sebagainya diakui di dalam Islam. Salah satu tujuan syariat Islam menurut Imam Syafi'i adalah menjaga harta, selain menjaga jiwa, agama dan kehormatan, juga kehidupan. Di dalam Al-Qur'an kepemilikan³⁵ harta benda (*property of right*), sangat diakui keberadaannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang²²¹ sangat rinci membahas harga adalah yang berbicara mengenai warisan, yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Bila diperhatikan pengakuan al-Qur'an terhadap harta benda (*property of right*) juga bisa dilihat dari tidak bolehnya seseorang masuk ke rumah orang tanpa ijin. Bila orang yang hendak bertamu dan telah mengucapkan salam tiga kali, lalu tidak dijawab, maka orang tersebut diperintahkan untuk datang kembali lain waktu. Disebutkan di dalam Surah An-Nur, ayat 27-28, hendaklah orang yang akan bertamu meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dulu. Tidak hanya orang lain yang hendak mendatangi rumah orang lain yang harus mendapat izin untuk masuk dan memberi salam, jika diijinkan baru masuk, dan jika tidak diharuskan untuk kembali di lain waktu. Tetapi juga, di dalam rumah, anak memiliki hak atas kepemilikan pribadinya yang tidak boleh dilanggar oleh orang tua. Begitu pula anak tidak boleh melanggar

wilayah pribadi orang tuanya. Di dalam hadits disebutkan bahwa, anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya pada waktu sebelum subuh, siang dan sore hari. Begitu pula sebaliknya orang tua boleh masuk ke kamar anaknya pada waktu-waktu yang tidak diperkenankan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Surah An-Nuur ayat 58-59. Hal tersebut hanya menyebut beberapa contoh saja. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan mengenai pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi, dan menjunjung tinggi hak milik pribadi, kemudian proteksi terhadap hak milik pribadi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun.

Kedua, Pekerja keras dimuliakan di dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ada pemuda yang setiap habis sholat selalu duduk berdoa dan berdzikir di masjid sambil menengadahkan tangannya ke langit. Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah menegur pemuda tersebut, dengan mengatakan, “Tuhan tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit, bila kamu hanya menengadahkan tanganmu ke langit. Pergilah ke hutan, meski hanya bermodal kapak untuk mencari kayu bakar lalu engkau jual ke pasar.” Nabi Muhammad SAW pun menegaskan keutamaan orang bekerja dengan halal, kemudian makan dari hasil kerja halalnya. “*Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh,*” (HR. Bukhari). Di dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan mengenai keutamaan orang yang bekerja keras dengan hasil jerih payahnya sendiri. “*Pendapatan yang terbaik dari seseorang adalah hasil jerih payah tangannya.*” (HR. Ibnu Majah No. 2138, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih At-Targhib No. 1685). Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW melarang bermalas-malasan dan meminta-minta. “*Orang yang minta-minta padahal tidak begitu perlukan, sama halnya dengan orang yang memungut bara api.*” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Taimiyah dalam shahihnya). Di dalam hadits lain juga disebutkan, bahwa orang yang meminta-minta kelak di hari kiamat akan mencakar wajahnya.

8
 Ketiga, ada keutamaan bagi orang kaya dan memiliki harta. Orang-orang yang memiliki harta, memiliki keutamaan sendiri di dalam Islam, yang tidak bisa dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki harta, atau orang miskin. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadits. Disebutkan bahwa, “Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka berkata, Orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus menerus. Mereka shalat sebagaimana kami shalat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji, berumroh, berjihad serta bershodaqoh.” (HR. Bukhari No. 843 dan Muslim No. 595).

Bila tiga karakteristik di atas berbicara mengenai keutamaan bekerja dan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, maka beberapa karakteristik di bawah ini berkaitan dengan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan kehidupan sosial.

Pertama, larangan menumpuk harta. Meski keberadaan harta sebagai milik pribadi diakui di dalam Islam, namun penumpukan harta secara berlebihan juga dilarang. Tuhan menciptakan alam semesta, untuk digunakan secara bersama oleh seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 29: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu semua.” Nabi Muhammad SAW juga mencela perbuatan berlebihan dalam kepemilikan harta benda atau serakah. “Seandainya anak cucu Adam mendapatkan dua lembah yang berisi emas, niscaya ia masih menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah penuh perut anak Adam kecuali ditutup dalam tanah.” (HR Ahmad). Seorang manusia di dalam Islam dilarang melakukan penumpukan harta atau monopoli, 154 api harus mendistribusikannya kepada sebanyak mungkin orang. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr (59) ayat 7. “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Kedua, kewajiban berbagi. Orang-orang kaya, yang memiliki banyak harta, diwajibkan untuk membagi 13 harta yang dimiliki kepada orang lain. Sebab di dalam harta tersebut ada hak orang lain. Sebagaimana firman

Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19. “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (karena ia menjaga kebormatannya).” Dalam Islam dikenal berbagai kewajiban dan anjuran untuk mengeluarkan, salah satunya dalam bentuk zakat. Zakat juga beragam, mulai dari zakat fitrah, zakat maal, zakat pertanian dan lain sebagainya. Semuanya wajib dikeluarkan sesuai dengan jumlah dan waktunya (haul dan nisab). Orang kaya yang memiliki harta dan diwajibkan untuk membagi harta mereka kepada yang berhak, mendapat pujian sebagai orang mukmin yang beruntung. Seperti disebutkan dalam Surah Al-Mu'minun. Sebaliknya orang yang menahan harta untuk tidak berbagi disebut sebagai pendusta agama. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surah al-Ma'un (107).

Ketiga, dilarangnya praktik patgulipat atau dalam bahasa Al-Qur'an praktik “riba”. Menurut para ahli fiqih, riba adalah perbuatan yang mengambil keuntungan dari kegiatan transaksi ekonomi, seperti jual beli, yang merugikan salah satu pihak, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Adapun dalam utang piutang riba adalah praktik mengambil tambahan dari nominal yang dipinjamkan. Dalam praktiknya pengambilan tambahan tersebut bisa terus bertambah jumlahnya dari awal. Praktik yang merugikan satu pihak di dalam transaksi tersebut dikecam keras di dalam al-Qur'an. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surah Al-Baqarah ayat 275). Selanjutnya, Allah SWT melarang memakan harta dari transaksi riba. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaklukkan kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Surah Ali-Imran ayat 130). Orang yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dalam konsep Islam adalah orang yang membantu orang dalam kesulitan. Oleh karena itu orang tersebut mendapat kebaikan dan pahala serta pertolongan dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. (Riwayat Muslim, Tirmidzi dan lainnya).

Keempat, kewajiban melakukan tindakan transparansi, akuntabilitas, dan larangan melakukan penipuan. Di dalam Islam orang yang melakukan kegiatan transaksi harus bertindak transparan, tidak menutupi apa yang ditransaksikan. Seperti di dalam kegiatan pernikahan, kedua mempelai harus sama-sama memastikan tahu secara fisik laki-laki dan perempuan yang dinikahi. Begitu pula di dalam transaksi ekonomi, harus transparan dan tidak boleh ada yang ditutupi. Jika ada cacat pada barang yang dijual harus disampaikan kepada pembeli. Seluruh spesifikasi barang yang dijual harus diketahui secara pasti oleh pembeli. Dalam Islam tidak dikenal namanya jual beli “kucing dalam karung” atau jual beli “*gharar*”. *Gharar* adalah praktik jual beli yang tidak transparan dan memiliki unsur penipuan, terhadap barang yang diperjual belikan. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.*” (Riwayat Ahmad).

D. Tokoh Ekonomi Politik Islam

Pertama, Imam Malik Bin Anas (712-796 masehi). Imam Malik memiliki pemikiran yang cukup cemerlang di bidang ekonomi politik. Imam Malik menganggap bahwa raja atau penguasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Maka pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Kedua, Abu Yusuf (731-798 masehi). Abu Yusuf merupakan seorang hakim yang dikenal perhatiannya terhadap keuangan umum dan peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Abu Yusuf penulis pertama buku pajak, yakni “Kitab al-Kharaj”. Kitab ini ditulis atas permintaan dari Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari kezaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Kitab yang ditulis Abu Yusuf ini mempertegas ekonomi politik, yaitu ekonomi tidak terpisahkan dari politik pemerintahan (Tilopa, 2017).

Ketiga, Al-Farabi (870-950 masehi). Al-Farabi merupakan salah satu ekonomi Islam yang banyak dikaji karyanya di masa kontemporer. Al-Farabi berbicara mengenai kota utama (*al madinah al fadhilah*). Al-Farabi

memiliki pemikiran adanya suatu negara atau kota yang dipimpin oleh pemimpin yang bijak, penduduknya bahagia dan sejahtera. Namun Al-Farabi juga melihat ada kota yang tidak utama. Kota-kota itu berlawanan secara prinsip dengan kota utama (Dzulhadi, 2014).

Keempat, Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam (774-738 masehi). Abu ‘Ubaid menekankan pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya. Abu ‘Ubaid menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Ilmu ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu politik dan ketatanegaraan (Ismail & Jaafar, 2015).

Kelima, Ibnu Sina (980-1037 masehi). Ibnu Sina memiliki pendapat bahwa manusia adalah makhluk berekonomi. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa ekonomi membutuhkan negara, dan perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat. Sehingga terbentuk ekonomi negara. Tujuan politik negara harus diarahkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat dalam mewujudkan dan kestabilan ekonomi (Parlaungan et al., 2021).

Keenam, Al-Mawardi (972-1058 masehi). Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi. Al-Mawardi dikenal lewat karyanya “al-Ahkam al-Sulthaniyyah” dan “Nasihat al-Mulk.” Menurut Al-Mawardi, negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Di dalam kitab yang ditulis Al-Mawardi menegaskan bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, baik secara spiritual melalui ibadah, ekonomi, politik dan hak-hak individual (Diana, 2017).

Ketujuh, Ibnu Taimiyyah (1262-1328 masehi). Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, “al-Siyasat al-Syar’iyyah fi` Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah” menjelaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai


pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapat²⁴nya menjadi bagian dari seni oleh negara “al-siyasat al-syariyyah.” Dalam kitab “al-Hisbah fi al-Islam” Ibnu Taimiyyah menekankan intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, pengawasan pasar, erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah (Salim et al., 2021).

Kedelapan, Ibnu Khaldun (1332-1406 masehi). Ibnu Khaldun dikenal sebagai “Bapak ilmu sosial”²⁴. Di dalam kitabnya yang terkenal “al-Muqaddimah” bahwa ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan individu. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada masyarakat. Ibnu Khaldun menilai adanya hubungan timbal balik antara ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ibnu Khaldun juga memiliki gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja, pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan lain sebagainya. Itu sebabnya Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh yang komprehensif di dalam pemikiran ekonomi politik. Bahkan Ibnu Khaldun juga menjelaskan perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa (Sholikhah dan Ismail, 2019).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik Islam!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik Islam!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik Islam yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Kota yang adil harus mendukung keadilan,
yang adil membenci tirani dan ketidakadilan,
dan memberi mereka gurun pasir yang adil“
(Al Farabi, filsuf Muslim, 872-950).**



Bab 5

Ekonomi Politik Campuran



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik campuran kapitalisme dan sosialisme.

A. Latar Belakang

Setidaknya ada dua kondisi yang melatarbelakangi lahirnya ekonomi politik campuran sosialisme dan kapitalisme yang kemudian menjadi alternatif dari sistem ekonomi politik pada skala global, yang dicoba untuk diterapkan oleh negara besar di dunia.

Pertama, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara yang mewujudkan sistem ekonomi politik sosialisme menjadi catatan tersendiri bagi ujian kekuatan dan ketangguhan sosialisme sebagai suatu, pemikiran, gerakan politik, dan sistem sosial. Uni Soviet sebagai kampiun sosialisme tidak mampu bertahan dalam waktu lama. Uni Soviet berdiri pada tahun 1922, kemudian pada tahun 1991. Uni Soviet bertahan selama 69 tahun, atau sama dengan hanya satu generasi. Sejak tahun 1947-1991 sebelum runtuhnya Soviet merupakan negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia, sekaligus menjadi pusat kekuasaan aliansi blok Komunis di dunia. Kejatuhan Soviet pada Desember 1991 dimulai dari kemerosotan di bidang ekonomi, kemudian merambat ke bidang politik dan pemerintahan. Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev tidak mampu melakukan restrukturisasi bidang ekonomi dan politik. Kebijakannya yang dikenal dengan “perestroika” dengan tiga pilar utama yaitu keterbukaan politik (*glasnost*), demokratisasi (*democratization*), dan penegakan hukum (*rule of law*), tidak mampu memperbaiki keadaan (Angelirti, 2008).

Kedua, ambruknya perekonomian di Amerika Serikat yang merembet kepada buruknya perekonomian negara-negara di dunia. Beruntung, ambruknya perekonomian di Amerika Serikat yang ditopang oleh sistem ekonomi politik kapitalisme tidak menyebabkan runtuhnya negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi. Namun peristiwa ambruknya perekonomian negara-negara kapitalis, baik pada tahun 1929 maupun 2008 menyebabkan banyak kalangan berpikir ulang mengenai celah kelemahan dari sistem ekonomi politik kapitalisme yang selama ini dibangun oleh Amerika Serikat bersama sekutu dan teman sejawat (Economakis et al., 2010). Kapitalisme yang sudah berjalan sedemikian mapan, dan dianggap sebagai jalan kemak-

muran bagi masyarakat di seluruh dunia, malah dinilai sebagai jalan yang menyesatkan (Beinhocker & Hanauer, 2014).

B. Pengertian Ekonomi Politik Campuran

Ekonomi politik campuran yang dimaksud disini adalah ekonomi politik yang tidak murni lagi menerapkan pemikiran, sistem dan gerakan, dari dua ekonomi politik paling besar, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Yang terjadi malah sebaliknya berusaha untuk menggabungkan dua ekonomi politik tersebut, bisa dalam keseluruhan atau bisa untuk sebagian. Ada yang sebagian diambil dari ekonomi politik kapitalisme, ada yang sebagian diambil ekonomi politik sosialisme. Ada yang diambil sistem politiknya yang sosialisme, kemudian digabungkan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Ada yang sistem politiknya kapitalisme digabungkan dengan sistem ekonomi sosialisme.

Selanjutnya, dalam praktiknya, ada yang mengambil banyak dari sistem ekonomi kapitalisme, kemudian sedikit dari sistem politik sosialisme. Atau sebaliknya, ada yang mengambil banyak dari sistem politik sosialisme, kemudian mengambil sedikit dari sistem ekonomi kapitalisme. Bisa pula dalam bentuk yang lain, sama-sama mengambil banyak dari sistem ekonomi politik kapitalisme dan mengambil banyak dari sistem ekonomi politik sosialisme. Atau sebaliknya, sama-sama mengambil sedikit dari sistem ekonomi politik kapitalisme dan mengambil sedikit pula dari sistem ekonomi politik sosialisme.

Sangat dinamis, tidak bisa lagi dilihat hitam putih. Ada banyak variabel dalam ekonomi politik kapitalisme yang kemudian diterapkan bersamaan dengan ekonomi politik sosialisme. Sebaliknya, ada banyak variabel dalam ekonomi politik sosialisme yang diterapkan secara simultan dalam ekonomi politik kapitalisme. Variabel yang diterapkan bisa pula sedikit atau tidak banyak. Masing-masing pihak yang mengambilnya memiliki pertimbangan sendiri untuk mengambil banyak dari masing-masing variabel yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing tentunya.

Misalnya ada negara yang masih menganut sistem politik sosialisme, namun dalam prakteknya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Sebaliknya, ada negara yang menganut sistem ekonomi politik sosialisme, bahkan undang-undang dasar negara masih berisi semangat sosialisme, namun praktik ekonomi politiknya kapitalisme.

C. Sosialisme Pasar Model China

Salah satu model ekonomi politik yang bisa dilihat secara nyata menerapkan ekonomi politik campuran adalah China atau Tiongkok. Ekonomi politik campuran yang diterapkan oleh China memang berhasil dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bidang perekonomian. Cina saat ini bangkit sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan perdagangan dunia di tengah globalisasi. Kekuatan ekonomi China malah telah mengalahkan negara adidaya yang selama ini berkuasa secara ekonomi. Bila diukur dengan cadangan devisa negaranya, maka China melampaui negara-negara besar lain yang selama ini dinyatakan sebagai kekuatan ekonomi dunia (Boisot & Child, 1996).

China awalnya menerapkan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan sentralistik serta tertutup. Namun China kemudian beralih dengan membuka sistem perekonomiannya dengan sistem ekonomi pasar. Hal tersebut ditandai dengan sikap pemerintah China yang terbuka dan menerima kehadiran investor. Bahkan China kemudian masuk dalam kancah perekonomian internasional. Banyak perusahaan raksasa yang kemudian masuk ke China dan beroperasi di China. Begitu pula dengan investor dari berbagai negara banyak yang melakukan kegiatan investasi di China. Reformasi dan perubahan kebijakan juga orientasi ekonomi yang dilakukan China sudah mulai berlangsung sejak tahun 1980 an hingga sekarang. Perusahaan yang ada di China juga terus melakukan ekspansi usaha yang dijalankan (Baumol, 1986).

China sudah menerapkan hal yang berbeda dari apa yang selama ini telah dianut oleh dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dengan kapitalismenya, dan Uni Soviet dengan sosialismenya. Apakah China

berubah menjadi negara kapitalis atau apakah China masih menjadi negara sosialis? Beberapa pengamat sepakat bahwa China masih merupakan negara sosialis. Namun di China sudah ada dan sedang terus berkembang kapitalisme. Pada negara terbesar seperti China, telah terjadi konvergensi besar yang dimulai dari internal pemerintah yang berkuasa di China. Sebuah perubahan yang terbilang unik, namun menunjukkan hasil positif sejauh ini. Sosialisme berbaur dengan esensi kapitalisme dan sebaliknya, menciptakan kualitas baru yang berbeda (Kolodko, 2018).

D. Konsep Sosialisme, Praktik Kapitalisme: Model Indonesia

Hampir sama dengan China, Indonesia awalnya merupakan negara yang memiliki seluruh perangkat dan budaya sosialisme. Bila dilihat dari dua hal, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka jelas bahwa Indonesia pada dasarnya adalah negara yang mirip dengan sosialisme. Meski hal tersebut tidak pernah ditegaskan secara nyata. Namun kandungan yang ada di dalam UUD dan Pancasila, bukanlah individualisme atau pengutamaan pemilik modal, namun lebih menonjolkan keadilan sosial pada Pancasila, dan tanggung sosial negara di dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, sistem ekonomi yang dianut di dalam Pancasila ada koperasi yang nafasnya ada gotong-royong dan kekeluargaan.

Namun dalam praktiknya, ekonomi Indonesia lebih mempraktikkan ekonomi kapitalisme. Di antara yang mudah terlihat adalah praktik privatisasi, yaitu melakukan swastanisasi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Gunawan, 2016). Selain itu dilakukan juga liberalisasi perdagangan, yang bahkan menyentuh sektor fundamental dari perekonomian rakyat, yaitu sektor pertanian, termasuk beras, gula, garam dan lain-lain. Hal ini tentu saja merugikan petani lokal (Khadafi, 2015).

Bedanya Indonesia dengan China ada pada hasil yang dicapai. Bila China yang merubah sistem dan struktur ekonominya dari sosialisme murni menjadi campuran kapitalisme dan sosialisme, berhasil menjadi


salah satu negara besar dalam perekonomian, tidak begitu dengan Indonesia. Meski Indonesia, sebetulnya memiliki potensi yang tidak kalah dengan China, paling tidak dalam dua hal, jumlah penduduk yang besar, nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dikelola sebagai bahan utama industri dan energi, juga dikelola untuk diolah menjadi bahan jadi dan diekspor ke luar negeri. Namun Indonesia tidak mampu mengelola potensi yang dimiliki, sehingga masih menjadi negara dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, sumber daya manusia tidak memadai, dengan hutang yang menumpuk, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik campuran, kapitalisme dan sosialisme!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik campuran, kapitalisme dan sosialisme!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik campuran, kapitalisme dan sosialisme yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Belajarlah untuk memberi,
baik kamu punya banyak atau sedikit,
baik saat suka maupun duka“
(Ibnu Arabi, filsuf Muslim, 1165-1240)**





Bab 6

**Ekonomi Politik
Pancasila**



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik Pancasila.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik Pancasila.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik Pancasila.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik Pancasila.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik Pancasila.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi Pancasila.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi Pancasila.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah ekonomi politik Pancasila.

A. Sejarah Ekonomi Politik Pancasila

Sejarah ekonomi politik Pancasila tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila lahir dari Pembukaan atau “Preamble” Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sejak 29 April sampai 22 Agustus 1945 (Hardinanto, 2017).

220 Pancasila tidak dicetuskan secara terpisah berdiri sendiri. Dia berada di dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah menjadi pembahasan dalam sidang Badan Penyelidik. (Surajiyo & Wiyanto, 2006). Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja. Kemudian daripada itu, untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan-

Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Pardi, 2019).

B. Pengertian Ekonomi Politik Pancasila

Ekonomi politik Pancasila adalah pemikiran ekonomi dan politik yang bersumber dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima.

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila ini terdapat semangat ketuhanan yang ada di dalam kegiatan ekonomi dan politik. Artinya bahwa dalam kegiatan perekonomian harus ada nilai-nilai ketuhanan yang dijalankan. Seorang pedagang di Indonesia, harus merasakan bahwa pada saat berdagang ada Tuhan yang mengawasi dirinya setiap transaksi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan adil dan beradab merupakan puncak peradaban manusia yang paling tinggi di dunia. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan politik nilai kemanusiaan harus ditampilkan.

Ketiga, persatuan Indonesia. Semangat pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia dikembangkan dengan semangat mempersatukan. Prinsipnya satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Kegiatan berekonomi dan berpolitik, tidak boleh menimbulkan upaya perpecahan. Malah ekonomi dan politik jadi sarana untuk mempersatukan seluruh bangsa, tenggang rasa, dan toleransi.

Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada hikmah dan kebijaksanaan yang menuntun ekonomi dan politik bangsa. Bukan ambisi kekuasaan yang menumpuk harta sebanyak mungkin.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai dasar setelah kemerdekaan dan kebebasan. Pada keadilan ada asas kesetaraan. Bukan asas ketaatan kepada hukum yang diutamakan, namun pada asas keadilan. Adil bermakna perlakukan manusia terhadap sesuatu yang sepantas dan sewajarnya, tidak melebihi apa yang

meski dilakukan. Bila dalam menjalankan ekonomi secara adil, maka pengusaha tidak akan mengeksploitasi sebanyak mungkin sumber ekonomi yang ada, namun ada tanggung jawab untuk membaginya dengan orang lain, secara merata.

C. Ciri Ekonomi Politik Pancasila

Ekonomi politik Pancasila memiliki kekhasan yang membedakan dengan ekonomi politik lainnya. Salah satunya yang paling kelihatan adalah ekonomi politik yang dipraktikkan pada awal kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebagai tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno memiliki pemikiran yang berkaitan dengan Pancasila dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwarnai oleh semangat Pancasila. Ada banyak hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun yang paling pokok disebutkan disini antara lain.

Pertama, berdikari. Berdikari bermakna berdiri di atas kaki sendiri. Dalam berdikari ada semangat kemandirian, tidak tergantung pada bangsa lain. Hal ini tercermin dari upaya Presiden Soekarno untuk tidak ikut Blok Barat dan Blok Timur dengan membangun kekuatan baru di dunia yang disebut dengan Negara Nonblok (Sholehuddin, 2015). Begitu pula dengan perekonomian negara, ada semangat kemandirian, dengan tidak mau menerima bantuan dari negara lain. Bahkan dalam sebuah pidatonya yang terkenal Bung Karno menyampaikan “*Go to hell with your aids*” sebagai bentuk penolakan terhadap bantuan negara lain.

Kedua, gotong royong. Gotong royong merupakan semangat yang dibangun dari Pancasila khususnya pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dewantara, 2015). Sebagai bangsa yang besar Indonesia tidak bisa hidup nafsi-nafsi. Perlu ada kerjasama yang terjalin pada seluruh anak bangsa. Semangat ini yang terus dipupuk di dalam menjalankan Pancasila oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Semangat gotong royong yang paling kuat pada masa lalu adalah berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Ketiga, nawacita adalah sembilan program utama kemandirian bangsa yaitu; “Negara yang melindungi segenap bangsa. Pemerintah tidak absen. Menolak negara lemah dengan melakukan penegakan hukum. Mewujudkan kemandirian ekonomi. Membantu Indonesia dari pinggiran. Meningkatkan produktivitas rakyat. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan (Soleman & Noer, 2017).

D. Koperasi

Koperasi diartikan sebagai “perkumpulan orang yang secara khusus mempersiapkan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.” Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, pada Pasal disebutkan bahwa, koperasi adalah “adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan, yang berusaha menggerakkan potensi sumberdaya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.” (Anggoro et al., 2015).

Kelahiran koperasi di negara-negara maju sebagai bentuk perlawanan terhadap pasar yang tidak adil. Jika dilawan dengan perorangan maka tidak akan berhasil. Maka perlu dilakukan perhimpunan, beberapa orang yang memiliki keinginan bersama, kemudian membentuk koperasi. Koperasi yang terbentuk tersebut dijadikan sarana untuk melawan pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Gairah kekuatan kelompok masyarakat yang berhimpun di dalam koperasi menimbulkan perhatian, sehingga dijadikan pertimbangan untuk melibatkan koperasi dalam berbagai pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan tertentu (Solihin & Lestari, 2018).

Kelahiran koperasi di Indonesia sudah mulai ada sejak sebelum Indonesia ada. Tepatnya pada tahun 1896 yang dipelopori oleh Aria Wiriatmadja Patih di Purwokerto, Jawa Tengah. Patih mendirikan koperasi simpan-pinjam. Uang yang digunakan untuk modal berasal dari kantong pribadi Patih, ditambah dengan uang kas masjid yang

dikelolanya (Masikome et al., 2020). Para tokoh pendiri bangsa Indonesia juga menggagas pendirian koperasi. Hal tersebut bisa dilihat pada saat Boedi Oetomo lahir tahun 1908, koperasi untuk keperluan rumah tangga digagas (Rahardjo, 2011). Demikian pula pada saat Sarekat Islam lahir pada 1911, digagas koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari (Muryanti, 2011). Pada tahun 1918 K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jawa Timur mendirikan koperasi yang dinamakan "Syirkah Al Inan" atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang (Ghulam, 2016). Pada saat kepengurusan dan keanggotaan koperasi semakin jelas tertata rapi. Begitu pula dengan usahanya.

Selanjutnya pada tahun 1920 dibentuk 'Komisi Koperasi' Boeke, yang kemudian melahirkan Bank Rakyat atau "Volkscredietwezen." Muhammadiyah juga mendirikan koperasi di seluruh Indonesia yang diputuskan lewat Kongres Muhammadiyah tahun 1935 dan 1938. Anggota Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor lahirnya koperasi di seluruh Indonesia (Zain, 2015).

Setelah Indonesia merdeka, koperasi terus dikembangkan. Salah satu tokoh yang memiliki perhatian terhadap koperasi di Indonesia Bung Hatta. Melalui usulan dan perjuangannya, koperasi masuk ke dalam "konstitusi negara", yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa "koperasi merupakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Pada akhir tahun 1946, dilakukan pendataan koperasi oleh Jawatan Koperasi, terdapat 2500 koperasi di seluruh Indonesia (Efendi & Bakhri, 2018).

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950. Pada saat Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, pemerintah berupaya terus mengembangkan koperasi di Indonesia. Hal tersebut diketahui melalui pidato Natsir di depan Dewan Perwakilan Rakyat yang menghubungkan perekonomian negara dengan koperasi. Natsir mengatakan: "... Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat, istimewanya koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan

kemampuan keuangan Negara.” (Emalia, 2018).

Sejak awal kelahirannya koperasi menekankan pada asas kekeluargaan dan kesejahteraan anggota. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keperluan anggota, seperti keperluan simpan-pinjam para anggota koperasi. Kemudian berkembang pada penyediaan kebutuhan rumah tangga anggota seperti menyediakan beras dan kebutuhan pokok lain bagi anggota. Di koperasi para anggota belanja, keuntungannya dikumpulkan oleh pengurus koperasi, dan pada akhir tahun dibagikan kembali kepada anggota koperasi. Selain itu koperasi tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan anggota, seperti menyediakan bahan kebutuhan pertanian anggota (Masngudi, 1990).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik Pancasila!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah ekonomi politik Pancasila!
3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik Pancasila, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Dalam politik Anda harus mengeluarkan banyak uang,
bahkan untuk kalah sekalipun“
(William Rogers, pelawak dan komentator sosial, 1879-1935)**



Bab 7

Globalisasi, Export & Import



59 **Capaian Pembelajaran**

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep globalisasi, ekspor dan import.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik globalisasi, ekspor dan import.

34

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep globalisasi, ekspor dan import.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep globalisasi, ekspor dan import.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik globalisasi, ekspor dan import.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam globalisasi, ekspor dan import.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam globalisasi, ekspor dan import.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah globalisasi, ekspor dan import.

A. Latar Belakang

Dulu, dunia diungkapkan sebagai desa global. Namun, saat ini dunia tidak lagi seperti desa kecil, namun dunia seperti dalam genggaman karena seukuran gadget. Di dalam gadget atau telepon seluler (ponsel) tersedia semua hal yang dibutuhkan. Mau menjalankan bisnis dan usaha, termasuk melakukan transaksi keuangan dan belanja tersedia di gadget. Tidak perlu datang ke toko atau ke pusat perbelanjaan. Dengan melakukan transaksi di gadget barang yang diinginkan diantar ke rumah atau ke kantor. Mau kuliah dan belajar bisa dilakukan lewat gadget. Mau pesan makanan, bisa melalui gadget. Bahkan, untuk mencari jodoh saja bisa dilakukan di gadget. Mau silaturahmi dengan orang yang dikehendaki juga dapat dilakukan melalui gadget.

Orang menyebut era ini dengan era digital 4.0, bahkan di sebagian negara maju sudah mulai menggagas era 5.0. Era digital 4.0 merupakan revolusi perubahan interaksi manusia yang semakin mengglobal. Dimana tidak ada batas antara orang yang tinggal di desa dengan di kota. Tidak ada batas pula antara satu negara dengan negara lain. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan secara real time, tidak perlu ditunda, seperti dulu menggunakan surat. Bahkan pengiriman dan penerimaan data bisa dilakukan secara audio visual. Orang yang tinggal di Indonesia bisa melakukan transaksi bisnis dan usaha secara langsung dengan para pedagang saham di gedung World Trade Center (WTC).

Orang yang ada di desa terpencil di pelosok Indonesia, bisa mengikuti kampanye pemilihan presiden di Jerman dan Amerika. Begitu seterusnya. Orang yang ada di wilayah kepulauan sekalipun dapat menikmati minuman dingin yang berasal dari Amerika maupun Eropa. Coca Cola atau Pepsi dijual bebas di warung atau kios kecil yang ada di Pulau Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sebaliknya, ikan kerapu dan lobster yang ditangkap oleh nelayan di Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur bisa dijual ke Hongkong dan Korea. Dunia semakin mengglobal dan semakin kecil, transaksi bisa dilakukan melalui benda

kecil bernama gadget atau ponsel, dimana saja (*anywhere*), kapan saja (*anytime*), dan oleh siapa saja. Orang kemudian menyebutnya dengan *smartphone*.

B. Sejarah Globalisasi

Bagi kita yang berada di wilayah pelosok atau pedalaman, mungkin tidak pernah membayangkan akan hidup seperti saat ini. Namun bagi perancang masa depan, baik di bidang sosial, ekonomi pasti memiliki gambaran dunia masa depan akan dibuat seperti apa. Sehingga muncul istilah “*social engineering*,” semacam proses rekayasa sosial untuk menciptakan dunia yang dikehendaki. Dalam ilmu sosial, perubahan itu salah satu bisa dilakukan melalui ilmu pengetahuan, uang, dan teknologi informasi.

Jika kacamata ilmu sosial yang digunakan di dalam melihat globalisasi, maka globalisasi bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi hasil rancangan orang yang memiliki pandangan masa depan dunia. Bila ditilik secara seksama, maka ide globalisasi misalnya bisa dilihat dari keinginan kelompok yang menganut sistem ekonomi politik kapitalisme yang menginginkan terbukanya akses seluruh negara terhadap apa yang diperdagangkan oleh para pemilik uang di negara-negara maju. Akses tersebut akan membuat negara di dunia menjadi pasar, tempat menjual barang dan produk yang berasal dari negara maju. Hal tersebut memang bersumber dari pemikiran dan tradisi Merkalisme pada abad ke-14 atau abad ke-15.

Namun secara nyata, dorongan untuk melakukan globalisasi perdagangan tersebut berlangsung setelah Perang Dunia II, tepatnya saat “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)” pada tanggal 30 Oktober 1947 ditandatangani di Jenewa, Swiss oleh 23 negara di seluruh dunia. GATT isinya membuat aturan dan ketentuan untuk melaksanakan perdagangan internasional. Proses globalisasi perdagangan internasional semakin kuat dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, yang beranggotakan 154 negara di dunia. Kehadiran GATT dan WTO memang didorong oleh

negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris untuk melakukan liberalisasi perdagangan internasional. Meski negara-negara pinggiran (*peripheral countries*) mendapat manfaat dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, tetap saja yang paling banyak meraih keuntungan adalah negara-negara maju yang sudah makan ekonomi dan politiknya (Manoppo, 2007).

C. Sejarah Ekspor

Sejarah export dan import, khususnya yang ada di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia ada. Hal tersebut dimulai, bahkan sejak sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia. Yaitu pada masa kekuasaan kerajaan di nusantara, terutama para penguasa yang berada di pantai utara Pulau Jawa, khususnya yang berada di Jawa Tengah, dengan wilayah pantai yang panjang. Wilayah pantai menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa diolah menjadi sumber pendapatan warga. Potensi ekonomi yang paling mudah untuk diolah pada saat itu adalah garam. Garam mudah diolah karena hanya dengan mengeringkan air laut, kemudian dipanaskan oleh matahari. Kemudian menjadi komoditas garam dan bisa dijual ke berbagai wilayah di luar Jawa, bahkan sampai ke beberapa negara yang saat ini masuk ke kawasan Asia Tenggara.

Setelah Belanda masuk ke nusantara dan menggantikan kekuasaan kerajaan yang sebelumnya berkuasa di nusantara, secara otomatis maka kendali ekonomi juga dikuasai oleh Belanda. Kekuasaan ekonomi Belanda tidak hanya berada di Pulau Jawa, namun menjangkau hampir ke seluruh wilayah yang ada di nusantara dengan berbagai potensi ekonomi yang ada. Daerah Jawa memiliki potensi teh, gula, dan garam. Daerah Maluku, Ambon dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi seperti rempah-rempah dan lain-lain. Barang-barang tersebut kemudian dikirim ke Belanda, kemudian dikirim ke berbagai negara di Eropa untuk memenuhi kebutuhan pasar di Eropa (Rochwulaningsih, 2012).

Setelah merdeka Indonesia juga masih dikenal sebagai salah satu ekspor berbagai komoditas ekonomi dan perdagangan ke berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah timah yang ada di Bangka

Belitung. Di masa kolonial Belanda, pertambangan timah Bangka dikelola oleh badan usaha milik pemerintah bernama Banka Tin Winning Bedrijf. Setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1953 perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang-tambang Timah Negara. Di bawah pengelolaan perusahaan negara tersebut, timah dari Bangka dikirim ke berbagai negara di dunia (Suprpto, 2008). Begitu pula dengan komoditas lain, masih diekspor dari Indonesia seperti kopi, kopra dan lainnya (Swastika, 2011).

D. Sejarah Import

Import juga memiliki sejarah yang bisa direkam jejaknya di Indonesia. Kegiatan impor sudah berlangsung sejak jaman Belanda. Belanda masih kesulitan untuk mendapat pasokan besar dalam jumlah besar. Saat itu pasokan terbesar beras berasal dari Thailand dan Myanmar. Pada tahun 1930-an, Belanda meningkatkan pasokan beras, untuk memenuhi kebutuhan melalui Voedings Middelen Fonds (VMF) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Ekonomi. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengadaan, penjualan, dan penyediaan bahan pangan dan berfungsi untuk mengamankan pasokan pangan. Selain itu, ada juga pasokan beras dari pasar internasional yaitu dari Indocina Prancis yang menghasilkan padi dari India Selatan (Ashari & Aprianto, 2008).

Meski Indonesia merupakan negara agraris, dengan luas lahan pertanian yang cukup besar, namun hingga merdeka dari Belanda dan Jepang. Kondisi pertanian Indonesia tidak cenderung maju. Proses pengolahan lahan pertanian juga masih dilakukan secara tradisional. Hasil yang diperoleh pun tidak banyak. Lemahnya ketahanan pangan Indonesia di tahun 1967, kemudian didorong oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, Indonesia kemudian melakukan impor gula. Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya produksi gula dalam negeri, hingga terus berlangsung pada tahun 2003 (Dachliani, 2006).

Setiap tahun, import berbagai barang ke Indonesia dari berbagai negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1994-2000, volume dan nilai impor terus mengalami kenaikan. Di Pelabuhan Cirebon⁴³ saja, pada tahun 1997 tercatat import barang nonmigas sebesar 2.178.248.072 kg dengan nilai 561.780.496,69 US\$. Komoditas impor nonmigas paling besar hasil bumi, terutama beras krisis multidimensi, terutama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak pada impor yang semakin banyak (Rohmah & Sulistiyono, 2021). Komoditas impor lain yang cukup besar adalah tekstil. Sejak tahun 2008 hingga kini, impor tekstil membanjiri pasar lokal. Tidak hanya bahan tekstil dalam bentuk bahan kain, namun import juga terjadi pada pakaian jadi yang sudah siap digunakan. Impor pakaian jadi semakin masif terjadi dengan hadirnya penjualan secara daring (Ahda et al., 2019).

E. Pengertian Globalisasi

Globalisasi secara bahasa berasal kata “global” yang artinya secara umum, atau secara keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar. Secara istilah atau terminologi, globalisasi dimaknai sebagai proses perubahan institusional di tingkat lokal atau nasional yang dilebarkan menjadi perubahan bersifat transnasional atau lintas negara. Pada tahap ini terjadi perubahan mendasar pada lembaga-lembaga di level nasional yang bertransformasi menjadi lembaga-lembaga transnasional atau internasional²⁴⁴ (Salles-Djelic & Quack, 2003).

Saskia Sassen dari University of Chicago and London School of Economics mengartikan globalisasi sebagai lawan dari nasionalisasi. Proses globalisasi merupakan proses menghilangkan nasionalisasi. Pada saat globalisasi garis dan batas nasional menjadi semakin kabur atau bahkan hilang. Sassen menyebut bahwa globalisasi erat kaitannya dengan ekonomi, terutama dengan kehadiran *World Trade Organization* (WTO) yang menjadi semacam politik global dalam perdagangan lintas negara. Hal ini misalnya terjadi pasar global yang dibentuk melalui pasar elektronik yang kemudian dikenal dengan dunia digital dalam skala

global (Sassen, 2003).

Sebagai kebalikan dari globalisasi adalah nasionalisasi. Nasionalisasi selama ini dikenal memiliki banyak potensi dan sumber ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara. Scott dan Storper di dalam tulisannya "*Regions, Globalization, Development*" bahwa daerah atau regional memiliki potensi dan aset ekonomi yang cukup besar, yang dapat bersinergi dengan daerah lain. Kehadiran globalisasi kemudian semakin menekan peran kedaerahan di dalam perekonomian dalam dimensi global. Padahal, selama ini peran daerah sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Scott & Storper, 2003).

Maka, secara sederhana, globalisasi diartikan sebagai proses menjadikan dunia sebagai satu kesatuan, melintasi daerah, negara, yang tidak lagi dibatasi oleh perbatasan teritorial (*borderless*). Hal itu didukung oleh kemajuan teknologi informasi, internet, jaringan data, website, aplikasi dan berbagai perangkat digital lainnya.

F. Pengertian Ekspor dan Import

Ekspor dan impor adalah kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Namun keduanya memiliki arti yang berbeda.

Pertama, ekspor. Ada berbagai pengertian yang disampaikan ahli mengenai ekspor. Ekspor diartikan sebagai "pengeluaran barang-barang dari peredaran masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing." (Juniantara & Budhi, 2012). Sementara itu, menurut Sukirno, ekspor adalah "pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari Negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pemasaran luar negeri." (Benny, 2013). Ada pula yang memberi pengertian ekspor sebagai kegiatan pengiriman barang dari satu ke negara ke negara lain. Negara yang mengirimkan barang tersebut adalah negara penghasil. Sedangkan negara penerima adalah pasar.

Kedua, import. Ada berbagai pengertian yang dikemukakan⁵ oleh ahli mengenai impor. Menurut Roselyne Hutabarat, import sebagai “pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.” (Kadarukmi, 2013). Impor merupakan kegiatan pengi¹⁴¹an barang dari satu negara ke negara lain dengan cara yang legal, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terhadap barang-¹⁴³ang yang halal untuk diperdagangkan. Import berarti memasukkan barang atau komoditas tertentu dari satu negara ke negara lain. Memasukkan barang dari negara penghasil (produsen) kepada negara penerima (pasar). “Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di satu negara yang tidak bisa dipenuhi oleh produksi negara tersebut secara mandiri.” (RatnaSari & Firdayetti, 2019).

G. Implikasi Ekspor dan Impor Pada Ekonomi dan Politik

Globalisasi pada satu sisi dapat menghasilkan kemakmuran bagi umat manusia, namun pada sisi lain dapat membawa kemiskinan dan pengangguran pada manusia lain.

Pertama, globalisasi, termasuk di dalamnya ekspor dan impor dapat menjadi proses yang saling menguntungkan bagi perdagangan lintas negara. Hal ini dengan catatan, asal proses yang berlangsung secara seimbang (*equal*) dan adil (*fair*). Jika proses perdagangan antara negara di dunia berlangsung secara adil dan seimbang, maka perluasan pasar (*market*) akan terjadi. Saat pasar semakin terbuka, maka peluang barang yang diproduksi di satu negara akan bisa diterima dan dijual di negara lain, dapat meningkatkan pendapatan di negara asal. Tidak hanya pendapatan perusahaan yang selanjutnya perusahaan membayar pajak ke negara, namun juga pendapatan dari bea barang keluar maupun


masuk di suatu negara. Kalau ini terjadi secara adil dan seimbang, yang diuntungkan sesungguhnya negara-negara berkembang. Artinya, dalam kondisi ini negara berkembang diuntungkan oleh proses globalisasi. Hal ini didorong dengan nilai tukar yang tinggi antara uang di negara-negara berkembang dengan Dolar maupun Euro. Bagi negara maju ini juga menguntungkan, barang yang diproduksi di negara berkembang, akan dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dari barang yang diproduksi di negara maju. Maka pasar di negara tujuan ekspor juga diuntungkan dengan selisih harga barang yang biasanya mereka beli dari barang yang selama ini diproduksi oleh negara tersebut.

Kedua, sebaliknya, globalisasi, ekspor dan impor, juga malah menimbulkan adanya monopoli perdagangan pada perusahaan-perusahaan raksasa yang disebut multinasional company (MNC) untuk menguasai barang perdagangan di seluruh dunia. Bahkan ada kartel perdagangan yang mengatur kapan suatu komoditas akan naik, dan kapan komoditas akan turun. Di dalam suatu negara, kartel biasanya menggunakan tangan politisi yang berkuasa untuk mengendalikan pasokan komoditas tertentu, untuk dilakukan impor. Hal ini tentu saja “mematikan” petani lokal, untuk kasus impor komoditas pertanian. Inilah yang sering menjadi pintu masuk para pemburu rente (*rent seeking*).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian globalisasi, ekspor dan import!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah globalisasi, ekspor dan import!
3. Kemukakan satu kasus globalisasi, ekspor dan import, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan.
Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan.
Biarlah sesuai dengan kenyataan.
Biarkan mengalir secara natural,
berjalan seperti apa adanya“
(Lao-Tzu, filsuf dari Tiongkok, 600 SM)**



Bab 8

Hutang Luar Negeri



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep utang luar negeri.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik utang luar negeri.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep utang luar negeri.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep utang luar negeri.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik utang luar negeri.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam utang luar negeri.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam utang luar negeri.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah utang luar negeri.

A. Latar Belakang

Persoalan utang menjadi persoalan yang seperti tidak berujung dan tidak berpangkal. Katanya orang Jawa *mbulet*. Dari waktu ke waktu, utang yang dianggap sebagai solusi, malah cenderung menjadi masalah. Malah ada yang menyebut utang sebagai jebakan pembangunan (*trap of development*), dengan alasan pembangunan, satu negara malah terjebak pada jerat utang. Malah ada yang menyebut jika utang merupakan kutukan pembangunan (*curse of development*). Jika tidak bijak mengelola utang, apa yang disebut dengan jebakan dan kutukan utang, bisa benar-benar menjadi kenyataan.

Di masa lalu, utang luar negeri Indonesia menempati lima besar negara dunia ketiga yang berhutang. Di atas Indonesia ada Meksiko, Brazil, India dan Argentina. Naifnya, di tengah tingginya kebutuhan Indonesia terhadap utang luar negeri, untuk pembangunan dan membiayai gaji birokrasi dan pejabat negara, ada korupsi yang tinggi terhadap dana pinjaman luar negeri. Jeffrey Winters, seorang ekonom dari Amerika Serikat menyebut, sepertiga dari pinjaman Indonesia ke Bank Dunia mengalami kebocoran di birokrasi Indonesia. *Transparency International* juga melakukan survei terhadap 52 negara, Indonesia menempati peringkat ketujuh, dan peringkat pertama di negara ASEAN dalam tingkat kebocoran dana pinjaman luar negeri (Kaminsky & Pereira, 1996).

Jumlah utang Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini berbanding lurus dengan belanja pegawai dan belanja pembangunan yang juga terus membengkak. Maknanya, pembangunan di Indonesia ditopang dari utang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengeluarkan data bahwa terjadi peningkatan utang Indonesia setiap tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa utang Indonesia telah berada di kisaran yang tidak sehat. Terutama dilihat dari sisi kemampuan Indonesia membayar utang. Bahkan Indonesia harus berhutang untuk membayar utang. Pada kuartal I 2020 tercatat ada tambahan utang baru sebesar US\$389.252 juta (Fredlina et al., 2021). Kementerian Keuangan mencatat, posisi

utang pemerintah sebesar Rp 418,15 triliun hingga Mei 2021, utang pemerintah berupa pinjaman berasal dari luar negeri sebesar Rp 825,81 triliun (Lidwina, 2021).

B. Sejarah Utang

Menurut David Stasavage, sejarah utang negara bisa dilihat dari Raja Inggris Edward III yang memiliki utang kepada bankir dari Italia, Bardi dan Peruzzi. Raja Inggris Edward III kemudian mengalami gagal membayar utangnya. Sejarah utang juga dapat dilihat Pada awal abad ke-13, saat sejumlah negara Eropa Utara mulai menjual barang surat berharga (anuitas) sebagai sarana penghimpunan dana. Beberapa kota di Italia juga mulai meminjam jangka panjang. Polanya adalah pemilik kekayaan membeli surat berharga negara. Surat tersebut dapat dijual kembali, serta diperdagangkan di pasar. Raja-raja di Eropa, pada abad ke-16 ketika berutang dilakukan secara langsung kepada pemilik uang dengan jangka waktu pendek. Para pemberi pinjaman tidak berani memberi pinjaman jangka panjang karena khawatir raja yang meminjam meninggal dunia. Para pemberi pinjaman kepada pemerintahan saat itu adalah para pedagang yang memiliki usaha jarak jauh dan memiliki modal serta simpangan cukup besar dari usaha tersebut. Daripada meminjamkan kepada sesama pedagang yang berisiko gagal bayar, pemilik modal dan usaha kemudian meminjamkannya kepada pemerintah yang berkuasa, dengan kompensasi kemudahan yang diberikan kepada pengusaha dalam soal pembayaran pajak. Namun ada pula negara yang melakukan utang dengan model pembayaran dengan bunga jangka panjang. Pada tahun 1250 sampai dengan 1750, ada 31 negara di Eropa yang membayar utangnya dengan tingkat bunga jangka panjang. (Stasavage, 2016).

Di Amerika Serikat pada tahun 1776 sudah ada utang yang diberlakukan secara terbatas. Pada tahun 1776 sampai dengan 1920 Kongres memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan surat utang kepada lembaga keuangan berbeda. Kongres juga menetapkan waktu jatuh tempo utang, beserta pembebasan pajak

bagi pemberi utang (G. J. Hall & Sargent, 2015). Dari data ini diperoleh gambaran, bahwa sejarah utang di Amerika, tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tapi juga berkaitan dengan politik. Utang negara tidak diberikan secara bebas, tapi diberikan secara terbatas dan dikendalikan langsung oleh Kongres, sebelum Menteri Keuangan melaksanakan. Begitu pula dengan sejarah utang di Eropa, berkaitan dengan politik dan ekonomi.

⁴² Sejarah utang Indonesia bisa dilihat pertama saat terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus-2 November 1949. Pada saat itu, Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh Belanda. Pada kesempatan itu, Indonesia juga diharuskan untuk membayar semua utang yang diwariskan oleh Belanda. Pada saat itu secara jelas Indonesia telah memiliki utang luar negeri sebagai warisan Belanda sebesar US\$4 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun. (Baswir, 2009: 69).

Pemerintah di Indonesia memiliki catatan sejarah utang yang bisa dilihat pada setiap rezim atau pemerintahan yang berkuasa. Di dalam buku ini sengaja dibuat penjelasan pada setiap presiden yang memerintah di Indonesia, berapa banyak utang yang dibuat dan diwariskan. Kemudian penggunaan utang, sebagian besar digunakan untuk apa saja. Dari catatan ini akan diperoleh gambaran presiden mana yang paling banyak berutang pada masa pemerintahan yang dipimpin. Berikut catatan utang dari setiap presiden ke presiden di Indonesia.

Pertama, Presiden Soekarno. Pada saat Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia kondisi ekonomi dan politik masih belum stabil, kabinet berganti-ganti. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian secara politik dan ekonomi. Perekonomian tidak stabil juga, karena proses transisi dari pemerintah Hindia Belanda yang kemudian beralih ke Jepang, baru kemudian Indonesia. ada banyak beban ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah yang pertama. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1959. Krisis keuangan dan likuiditas yang terjadi memaksa pemerintah saat itu untuk menambah utang. Utang digunakan untuk menambah persediaan uang selama enam bulan ke depan, supaya inflasi

menjadi stabil. Sebelumnya inflasi tidak terkendali, harga barang-barang naik ratusan persen, harga beras juga ikut mengalami kenaikan drastis. Begitu pula dengan kebutuhan pokok lainnya (Hakim, 2012). Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia tercatat memiliki utang sebesar USD 2,3 miliar ¹²⁸ setara dengan Rp32 triliun. Utang tersebut rerata diperoleh dari negara-negara Blok Timur, Uni Soviet dan sekutunya. Ada juga dari sumber lain, namun tidak banyak, hanya sebagian kecil.

Kedua, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto berkuasa mulai tahun 1966 sampai dengan 1998, sekitar 32 tahun. Pemerintahan di bawah Presiden Soeharto merupakan pemerintahan paling lama dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, negara juga melakukan pinjaman utang luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa Soeharto mengalami defisit. Untuk menutup defisit dilakukan pinjaman utang luar negeri (Hairunnisa, 2019).

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto dikenal dekat dengan Bank Dunia (World Bank). Banyak program yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto mendapat dukungan dari Bank Dunia. Pada awal tahun 1990-an, orientasi pembangunan di Indonesia semakin berorientasi kepada pasar, sebagaimana yang diinginkan oleh Bank Dunia. Pada saat yang sama Soeharto menjalankan banyak program pembangunan yang tidak semua berhasil, namun banyak juga yang mengalami kegagalan. Kegagalan sebagian disebabkan karena adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penguasa. Program pembangunan tersebut sebagiannya dibiayai dari utang luar negeri (Prianto, 2011).

Pembangunan fisik memang terlihat menonjol di masa Orde Baru. Orientasi pembangunan Orde Baru memang sangat bertumpu pada pembangunan fisik, terutama proyek infrastruktur (Aziz, 2020). Ambisi pembangunan Soeharto di dalam pembangunan infrastruktur fisik membuatnya mendapat julukan “Bapak Pembangunan.” (Hilm, 2019).

Namun ambisi itu pula yang membuatnya jatuh. Pembangunan yang digalakkan oleh Soeharto ditopang oleh utang luar negeri. Pada saat resesi ekonomi melanda Asia, termasuk Indonesia, pemerintah tidak bisa mempertahankan keperkasaan ekonomi pembangunannya. Pada saat yang sama utang luar negeri memasuki masa jatuh tempo, dan pemerintah tidak mampu membayar utang. Terjadi krisis ekonomi, berlanjut ke krisis sosial dan politik. Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Presiden tahun 1998. Presiden Soeharto meninggalkan utang sebesar Rp 551,4 triliun.

Ketiga, Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur di tengah jalan pada tahun 1998. Saat itu Habibie merupakan wakil presiden yang mendampingi Soeharto. Secara otomatis, saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka Habibie yang menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Habibie yang menjalankan pemerintahan setelah Soeharto lengser, maka dia juga yang harus menanggung beban persoalan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok hingga mencapai Rp 14.000 lebih per USD. Presiden Habibie mampu menunjukkan kemampuannya mengelola ekonomi, di tengah gonjang-ganjing ekonomi pasca krisis tahun 1998, Presiden Habibie mampu menurunkan nilai tukar rupiah hingga Rp 2500 per USD. Pada saat yang sama, Presiden Habibie juga membuka keran kebebasan dan demokratisasi, dengan menjalankan pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik yang menjamur usai reformasi. Presiden Habibie juga membebaskan para tahanan politik yang banyak dipenjara oleh Soeharto, seperti Sri Bintang Pamungkas, AM. Fatwa, dan lain-lain.

Keberhasilan Presiden Habibie dalam menstabilkan rupiah hingga Rp 2500 per USD ternyata juga masih belum sepenuhnya mampu membuat perekonomian Indonesia menjadi mandiri. Pada masa pemerintahannya, Presiden Habibie juga masih harus menambah utang. Soeharto yang meninggal utang sebesar Rp 551,4 triliun, tidak mampu dikurangi oleh Presiden Habibie. Habibie malah menambah

utang baru sekira Rp 400 triliun. Di masa pemerintahannya yang singkat, Habibie memerintah mulai tanggal 21 Mei 1998-21 Oktober 1999, kurang dari dua tahun, Presiden Habibie mewariskan utang sebesar Rp 938,8 triliun.

Meski berlangsung singkat, Presiden Habibie termasuk presiden yang produktif dalam membuat kebijakan. Selama pemerintahannya ada 66 undang-undang yang dibuat. Salah satu Undang-Undang yang berhasil dibuat adalah penegasan mengenai arah perekonomian Indonesia yang semakin terbuka dan liberal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang “Pembentukan Indonesia.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Wijaya & Permatasari, 2018).

Keempat, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada saat pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), terutama karena kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Habibie tidak melanjutkan jabatannya sebagai presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kemudian menggelar sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar pada 20 Oktober 1999 melantik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur kemudian secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.

Pada saat Gus Dur menjadi presiden kondisi sosial ekonomi dan politik Indonesia sedang tidak stabil. banyak terjadi kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Poso, Ambon, dan Papua. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 masih terasa hingga Gus Dur menjadi presiden. Sama dengan Presiden Habibie, masa pemerintahan Gus Dur juga tidak berlangsung lama. Dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur kemudian diberhentikan lewat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI MPR RI) pada tanggal 23 Juli 2001. Praktis pemerintahan Presiden Gus

Dur hanya efektif selama satu tahun sembilan bulan.

Selama satu tahun sembilan bulan memerintah, Presiden Gus Dur juga menambah utang Indonesia ¹²⁸ banyak Rp 300 triliun. Hingga berakhir masa jabatannya Presiden Gus Dur mewariskan utang sebesar Rp 1.273,18 triliun. Tidak ada pembangunan fisik yang menonjol pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Namun dari sekian banyak persoalan yang diselesaikan oleh Presiden Gus Dur adalah penyehatan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Garuda dan lain-lain. Badan Urusan Logistik (Bulog) juga dibenahi oleh Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur dianggap banyak melakukan tindakan kontroversi, terutama dengan keinginannya untuk menghapus Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 25 tahun 1966 tentang “Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI)”

Kelima, Presiden Megawati. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan sebagai presiden lewat Sidang Istimewa MPR RI, maka secara otomatis yang menggantikannya adalah wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati terpilih menggantikan Gus Dur didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz. Presiden Megawati dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lebih lama dari Habibie dan Gus Dur. Megawati berhenti jadi presiden setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada pemilihan presiden yang digelar tahun 2004, megawati dikalahkan oleh mantan menteri di pemerintahannya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden dari tahun 2004 ¹⁶³ 2014. Di kabinet Presiden Megawati Susilo Bambang Yudhoyono menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pada saat Megawati menggantikan Presiden Gus Dur, posisi utang Indonesia berada di angka Rp 1.273,18 triliun. Pada masa akhir pemerintahannya di tahun 2004 Presiden Megawati mewariskan utang sebesar Rp 1.299,50 triliun. Artinya, era Presiden Megawati adalah era penambahan utang paling sedikit. Hanya dalam hitungan puluhan triliun rupiah saja. Satu prestasi yang luar biasa berhasil, di dalam

menahan diri untuk tidak menambah utang negara. Dengan masa pemerintahan yang relatif lebih lama dari Habibie dan Gus Dur, selama kurang lebih tiga tahun, Megawati tidak banyak menambah utang negara, hanya dalam hitungan puluhan triliun. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia.

Presiden Megawati termasuk presiden yang berhasil melakukan pengendalian utang. Hal tersebut dilakukan Megawati melalui perundingan Paris Club dan London Club. Megawati berhasil meminta negara pemberi pinjaman untuk menunda pembayaran utang sebesar USD 5,8 miliar pada Paris Club 12 April 2002. Tidak hanya itu, keberhasilan Megawati dalam mengendalikan utang negara juga dibuktikan dengan keberhasilan Megawati untuk melakukan pembayaran utang Negara sebesar Rp 116,3 triliun pada tahun 2003 (Soekarnoputri, 2021).

Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati pada Pemilihan Presiden yang digelar pertama kali secara langsung di Indonesia tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih selama dua periode dari tahun 2004-2014. Pada periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada periode kedua, 2009-2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono, salah seorang ekonom di Indonesia. Pada periode pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono jumlah utang mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali menggantikan Megawati Soekarno Putri, posisi utang Indonesia di kisaran Rp 1.299,50 triliun. Pada masa akhir jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono meninggal utang sebesar Rp 2.608,78 triliun. Ada penambahan utang sebesar Rp 1.300 triliun (Ratnawaty et al., 2016).

Berbeda dengan Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono banyak menghabiskan anggaran negara, termasuk yang berasal dari utang untuk keperluan berbagai subsidi untuk rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan subsidi beras bagi warga miskin, sampai subsidi energi dan

lain-lain²⁷⁵ di era Susilo Bambang Yudhoyono dikenal pula program subsidi berupa bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin yang tidak memiliki⁹⁵ rumah atau rumah yang ditempati tidak layak. Selain itu subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang mencapai Rp 300.000 per keluarga. Bantuan beras untuk warga miskin dikenal dengan nama “Raskin.” Dan banyak lagi program subsidi dan bantuan sosial yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Firmansyah et al., 2021).

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono program pembangunan sampai ke level desa yang fenomenal adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Pedesaan. Program ini menyasar pembangunan dan bantuan permodalan kepada masyarakat di level desa. Pelaksana program adalah masyarakat secara langsung yang direkrut dengan persyaratan khusus. Dana PNPM ada yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, ada pula yang digunakan untuk bantuan modal yang dilaksanakan secara bergulir. Program ini banyak yang berhasil, namun tidak sedikit yang gagal di lapangan.

Ketujuh, Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Jokowi terpilih selama dua periode dari 2014-2024. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi utang luar negeri mengalami peningkatan signifikan. Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya sebagai presiden pada tahun 2014, posisi utang Indonesia berada di kisaran Rp 2.608,78 triliun. Dalam waktu empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya tahun 2018, utang Indonesia sudah mencapai Rp 4.395,97 triliun. Pada Desember 2019 utang Indonesia sudah mencapai Rp 4.778 triliun. Presiden Jokowi termasuk presiden yang paling gemar berutang. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah utang²⁰ yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Hingga Mei 2021, posisi utang pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun, sebuah angka yang tidak kecil.

Presiden Jokowi hampir sama dengan pendahulunya, Soeharto, membelanjakan banyak anggaran negara, termasuk yang berasal dari

utang untuk keperluan pembangunan fisik, infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Jokowi membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer. Selain itu, dibangun juga bebas hambatan (tol) sepanjang 941 kilometer. Bersamaan dengan itu, dibangun jembatan sepanjang 39,8 kilometer. Adapun jembatan gantung yang dibangun ada 134 unit. Jokowi juga membangun 17 bendungan serta irigasi seluas 655.015 hektar. Tidak hanya jalan, jalur kereta api juga mengalami peningkatan, dengan melakukan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 754,59 kilometer, dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 kilometer. Ada 10 bandara baru, termasuk merevitalisasi dan mengembangkan 408 bandara di sejumlah daerah termasuk di daerah di Indonesia. Pembangunan di jalur laut dilakukan dengan membangun 19 pelabuhan. Selain digunakan untuk membangun infrastruktur, uang yang berasal dari utang tersebut digunakan untuk membayar yang jatuh tempo pada tahun 2018. Tidak hanya itu, ada uang sebesar Rp 1.628 triliun yang digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Lengkap penggunaan uang yang bersumber dari utang, termasuk untuk menutup lobang yang selama ini dibuat BUMN yang dimiliki oleh negara (Alamsyah & Siregar, 2019).

C. Pengertian Utang Luar Negeri

Pembahasan di bab ini mengulas mengenai utang luar negeri. Ada berbagai pengertian yang diberikan oleh ahli, tentang utang luar negeri. Pengertian pertama dimulai dari utang pemerintah atau utang negara. Utang negara adalah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan peruntukannya dilaksanakan oleh pemerintah. Biasanya utang model begini adalah utang yang dilakukan peminjaman oleh pemerintah, pada saat negara mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya pemerintah, baik berkaitan dengan biaya rutin belanja pegawai maupun belanja pembangunan (Subagiyo & Budiman, 2020).

Adapun utang luar negeri memiliki makna yang cukup jelas, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang berkuasa

5) pada lembaga-lembaga pemberi pinjaman, atau yang biasa disebut lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan lain-lain. Untuk selanjutnya, dana pinjaman tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti gaji pegawai, dan membiayai program pembangunan lainnya. Dana yang dipinjam wajib dibayar kepada pemberi pinjaman dilakukan secara mencicil beserta bunga pinjaman, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. 28

Ada yang mengartikan utang luar negeri sebagai penarikan modal dari luar negeri ke dalam suatu negara. Utang bisa menjadi salah satu instrumen untuk menambah modal di suatu negara untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan. Utang luar negeri juga dimaknai sebagai penerima suatu negara yang diberikan oleh negara lain yang berfungsi untuk meningkatkan investasi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Lubis & Riva'i, 2016). Pengertian ini memberi makna utang sebagai yang positif.

Ada istilah lain yang biasa digunakan untuk memberi pengertian utang negara, yaitu utang dalam negeri. Utang dalam negeri adalah pinjaman yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang berkuasa untuk mendapat dana dari sumber dalam negeri, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lainnya.

D. Implikasi Utang Luar Negeri Terhadap Ekonomi dan Politik

Utang luar negeri memiliki dua sisi yang kontradiktif. Pada satu sisi, utang luar negeri bisa dianggap sebagai salah satu obat penyembuh bagi negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun sebagai obat penyembuh, sama dengan obat generik, sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Bahkan jika efek obat sudah hilang, maka sakit akan kembali dirasakan. Bahkan bisa jadi menimbulkan kekebalan bagi penderita sakit. Jika pada pengobatan pertama, dibutuhkan satu dosis, saat sakit kembali dibutuhkan dua dosis. Begitu seterusnya.

Sehingga ada ketergantungan terhadap obat. Negara yang keranjangin berutang juga mengalami kondisi ketergantungan terhadap ¹²⁶ utang luar negeri. Dalam melaksanakan program pembangunan utang luar negeri dijadikan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prihandoko, ¹⁸² utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran ¹³ pemerintah dan pembangunan ekonomi. Di sebagian negara di dunia, utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya terutama dipakai untuk menutup defisit anggaran (Prihandoko, 2017).

Meski begitu, ada banyak pandangan berbeda terhadap utang negeri. Sejumlah kalangan menilai utang luar negeri justru menimbulkan persoalan ekonomi, terutama utang luar negeri membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, karena uang yang dimiliki oleh negara digunakan tidak langsung untuk menggerakkan perekonomian negaranya, namun digunakan untuk membayar utang, berikut bunga utang. Sebaliknya bagi negara pemberi utang, memang berdampak positif, sebab tidak hanya pengembalian uang yang didapat, namun ada tambahan dari bunga utang yang dibayar negara peminjam. ¹⁷

Hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharap dapat menggerakkan menjadi motor utama penggerak pembangunan dan perekonomian, malah tersedot untuk pengeluaran yang tidak seharusnya, yaitu secara rutin membayar cicilan utang dan bunga utang. Sehingga tujuan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi malah tidak tercapai. Beban APBN malah menjadi lebih berat dan perlu jalan keluar lain untuk dapat menyelesaikannya (Junaedi & Salistia, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa utang berkorelasi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan di negara yang memiliki beban utang besar, terutama di

negara-negara yang sedang berkembang. Diantara penelitian dilakukan oleh Bulow dan Rogoff tahun 1990, Cohen tahun 1993. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury dan kawan-kawan menyebutkan utang berdampak negatif, meski berbeda antara satu negara dengan negara lain (Atmadja, 2000).

Kondisi ini yang dialami Indonesia saat ini, keuangan Indonesia sangat bergantung kepada utang luar negeri. Tidak hanya untuk membiayai proyek pembangunan, namun juga untuk kebutuhan belanja pegawai. Setiap tahun target pendapat dari pajak, tidak tercapai secara maksimal. Sehingga negara harus menutup kekurangan dengan cara berutang. Ketergantungan semacam ini berimplikasi pada beban keuangan negara yang semakin berat. Sementara negara tidak memiliki alternatif lain untuk dicoba diterapkan. Atau tepatnya tidak mencoba untuk menerapkan strategi lain.


Pembangunan yang dibiayai lewat utang luar negeri merupakan pembiayaan pembangunan pemborosan (Fadhillah et al., 2021). Terlebih lagi dengan syarat pinjaman yang beragam, tidak hanya dalam bentuk pembayaran utang beserta bunganya, namun juga banyak syarat lain yang sebetulnya secara ekonomi dan politik merugikan negara peminjam. Misalnya dengan syarat penggunaan teknologi dan sumber daya manusia yang berasal dari negara-negara pemberi pinjaman. Hal ini jelas merugikan negara yang meminjam. Sebab tenaga kerja yang didatangkan dari negara pemberi pinjaman, akan mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor-sektor yang dibiayai oleh utang luar negeri. Secara langsung utang luar negeri juga berdampak pada potensi menciptakan pengangguran di negara sendiri. Pengangguran berpotensi menjadi persoalan dan ancaman sosial. Jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi persoalan politik secara nasional.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian utang luar negeri!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah utang luar negeri!
3. Kemukakan satu kasus utang luar negeri, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Dalam hukum seorang bersalah,
ketika ia melanggar hak orang lain.
Dalam etika dia bersalah,
saat berpikir untuk melakukannya“
(Immanuel Kant, 1724-1804 filsuf dari Jerman)**





Bab 9

Tenaga Kerja Luar Negeri



Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep tenaga kerja luar negeri.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik tenaga kerja luar negeri.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep tenaga kerja luar negeri.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tenaga kerja luar negeri.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik tenaga kerja luar negeri.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam tenaga kerja luar negeri.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam tenaga kerja luar negeri.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah tenaga kerja luar negeri.

A. Latar Belakang

166

Tenaga kerja luar negeri disebut juga tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk wanita disebut tenaga kerja wanita (TKW), merupakan salah satu ³⁷strategis di dalam ekonomi politik dan pembangunan. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cukup besar, yang tersebar di berbagai negara di dunia. Mulai dari Asia, seperti Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, ³²naupun ke Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Eropa. Pada tahun 2001, tercatat 55.206 TKI laki-laki dan 239.942 TKI wanita. Pada tahun 2002 jumlah tersebut meningkat menjadi 116.706 TKI laki-laki dan 363.607 TKI wanita. ³²Sampai tahun 2006, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri naik berlipat ganda menjadi 126.601 TKI laki-laki dan 484.935 TKI wanita. Tahun 2013, ada 4,5 juta TKI di luar negeri. Pada tahun 2014 jumlahnya naik menjadi 7,4 orang. Jumlah tersebut lebih besar lagi jika dimasukkan TKI yang bekerja secara ilegal. Pada tahun 2014 saja, jumlah TKI ilegal yang dipulangkan ke Indonesia mencapai 1,8 orang. Jumlah yang cukup besar (Agustini, 2016).

Jumlah yang cukup besar tersebut bisa menjadi ²⁶³isu penting dalam kehidupan ekonomi dan politik. Ada jutaan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, di negara yang berbeda secara budaya, hukum, dan lain-lain. Namun kondisi tersebut tentu memiliki makna penting dari segi potensi dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi dengan kondisi di dalam negeri Indonesia yang masih memiliki tingkat ²¹²gangguan cukup tinggi, 8,3% pada tahun 2013 (Soleh, 2017). Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada. Hal ini membuat bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan (Delis et al., 2015).

Minimnya pekerjaan di dalam negeri, dan semangat untuk mencari pekerja di luar, membuat banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya bermodal nekat, tanpa ada keahlian atau skill yang memadai, sehingga di negara tempat bekerja seringkali ⁶⁸menghadapi masalah. Hal ini menambah ⁵daftar panjang persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah

tersendiri bagi pemerintah Indonesia, presiden, menteri, kepala daerah, pejabat di kementerian hingga diplomat yang ada di luar negeri (Dharossa & Rezasyah, 2020).

262

B. Sejarah Tenaga Kerja Luar Negeri

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri sudah dimulai sejak masa pemerintah Hindia Belanda. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja keluar negeri melalui penempatan buruh kontrak ke beberapa negara seperti Suriname dan Afrika Selatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja keluar negeri pada masa Belanda terbilang besar, jumlahnya mencapai 32.986. Pengiriman pertama tenaga kerja pada 21 Mei 1890, dari Batavia dengan menggunakan Kapal “SS Koningin Emma” menuju Suriname, dan tiba pada 9 Agustus 1890. Mereka bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula “Marienburg,” Suriname (Woldring, 2010).

Setelah Indonesia merdeka menjadi negara yang berdaulat, proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri masih terus berlangsung. Secara legal formal, pengiriman dan penempatan tenaga kerja keluar negeri dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Republik Indonesia pada tahun 1970 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1970. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antar Kerja Antarnegara (AKAN). Pengiriman tenaga kerja keluar negeri juga melibatkan pihak swasta, yaitu perusahaan jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI). Pengiriman tenaga kerja keluar negeri di awal-awal adalah pengiriman tenaga kerja sektor informal yaitu Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) untuk pengguna perseorangan (Jahri, 2012).

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri terus mengalami peningkatan. Tidak hanya di Saudi Arabia, namun juga dilakukan ke berbagai negara lain, baik di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan lain-lain. Peningkatan tenaga kerja yang bekerja keluar negeri kemudian direspon oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Cosmas Batubara dengan membuat Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 5 tahun 1988 yang secara umum mengatur tentang “pengiriman tenaga kerja ke luar

negeri.” Selain itu, untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, terutama di Saudi Arabia, Menteri Tenaga Kerja secara khusus membuat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1307 tentang “Petunjuk teknis pengerahan TKI ke Arab Saudi” (Jalaludin & Suriadi, 2019).

C. Pengertian Tenaga Kerja Luar Negeri

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap “International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families” atau Konvensi Buruh Migran 1990. Dalam konteks tersebut tenaga kerja luar negeri yang dikenal juga dengan sebutan migran memiliki makna secara global. Tenaga kerja migran sudah didefinisikan di dalam pasal 11 ayat (1) Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (edisi revisi) 1949. Kemudian didefinisikan juga pada pasal 11 ayat (1) Bagian II dari konvensi pekerja migran (ketentuan tambahan) tahun 1975. Istilah pekerja migran tersebut berubah seiring dengan adanya kebutuhan perkembangan globalisasi yang menyebabkan migrasi pekerja lebih massif lagi. Pada Pasal 2 ayat (1) Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 mendefinisikan “pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara.” (Atedjadi, 2015). Pengertian ini tegas memberi batas, bagi pekerja luar negeri. Termasuk di dalamnya pekerja luar negeri Indonesia. Buruh migran adalah, pekerja yang tidak berasal dari negara tempat bekerja. Pekerjaan yang ditekuni mendapatkan upah, bukan pekerjaan sosial. Kemudian yang bekerja bukan pengungsi, namun warga yang sengaja datang untuk tujuan bekerja di negara lain untuk mendapat upah.

Di Indonesia, pengertian pekerja luar negeri atau tenaga kerja Indonesia disebutkan secara jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dimaksud dengan tenaga kerja adalah “setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang

dalam dan/ atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk ⁶⁸memenuhi kebutuhan masyarakat.” (Rohmawati, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang “Tenaga Kerja Indonesia,” disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan TKI, adalah “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” (Cahyono, 2015).

D. Implikasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Ekonomi & Politik

Bekerja di luar negeri ⁵⁷ memiliki implikasi positif terhadap sektor ekonomi bangsa Indonesia. ³⁷ Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, mendapat gaji sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat bekerja, tentu saja disesuaikan dengan kompetensi dan posisi pekerjaan yang dijalani. Namun bila dibandingkan dengan upah atau gaji yang diterima pekerja yang bekerja di Indonesia, ⁵ dengan keahlian dan pekerjaan yang sama, tentu upah atau gaji yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, jauh lebih besar. Terlebih lagi bila gaji tersebut dikonversi ke dalam rupiah. Jika buruh pabrik yang bekerja di daerah Cikarang dan Bekasi Jawa Barat hanya Rp 5 juta per bulan, maka gaji buruh pabrik yang bekerja di Hongkong atau Korea Selatan bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Jauh lebih besar dan berkali lipat. Hal ini tentu saja membawa implikasi positif bagi pekerja yang bekerja di luar negeri. Tidak hanya membuat perekonomian TKI secara personal meningkat, namun juga memberi implikasi positif pada pertumbuhan ekonomi di mana TKI tersebut berasal. Setiap bulan dari kelebihan gaji yang diterima oleh para TKI yang bekerja di luar negeri sebagian dikirim ke keluarga yang berada di kampung halaman (Susilo, 2015). ¹⁴⁴ Hal ini secara perlahan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, TKI yang bekerja di luar negeri juga menambah devisa negara. Hal ini yang kemudian

disematkan kepada para TKI sebagai pahlawan devisa negara, yang tidak pernah mendapat tanda jasa. Sebagai sektor yang memberi dampak terhadap perekonomian bangsa, namun kadang diabaikan hak dan pelayanan kepada mereka. Meski begitu pemerintah tetap memberi perhatian terhadap keberadaan TKI. Paling tidak dengan membuat badan khusus yang menangani TKI di luar negeri seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI memiliki fungsi dan peran strategis di dalam mengawal persoalan TKI di luar negeri, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan perusahaan PJTKI, melakukan kegiatan penempatan di negara-negara tujuan, dan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah bekerja, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Rumbadi, 2017).


Keberadaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tidak hanya berimplikasi positif terhadap pemasukan negara dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga memiliki implikasi politik. Implikasi politik terjadi pada hubungan internasional dan hubungan politik antara kedua negara di mana tenaga kerja Indonesia bekerja. Keberadaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri memiliki banyak tantangan. Hal ini berkaitan dengan perilaku dan sikap tenaga kerja yang beragam. Juga faktor perilaku warga di negara tempat TKI bekerja. Tidak sedikit tenaga kerja wanita yang bekerja di Saudi Arabia yang menjadi korban pemerkosaan majikan tempat bekerja. Ada pula yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap warga negara lain. Ada banyak masalah dan kasus yang terjadi, mulai dari TKI ilegal, kasus trafficking, prostitusi TKW, bunuh diri dan beragam kasus hukum yang menimpa buruh migran wanita Indonesia (Yusuf, 2020). Di Malaysia ada tenaga kerja wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dari majikan, juga banyak yang gajinya ditahan. Namun ada pula tenaga kerja yang terlibat dalam tindakan kriminal. Begitu pula di negara lain (Iqbal & Verdaningrum, 2016).

Berbagai peristiwa yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menimbulkan dinamika hubungan dan ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tempat TKI tersebut. Indonesia pernah mengalami ketegangan hubungan dengan Malaysia atas kasus penganiayaan seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Lombok Nusa Tenggara Barat, Nirmala Bonat yang dianiaya majikannya hingga mengalami cacat seumur hidup (Kusumawati, 2016). Namun proses hukum terhadap pelaku penganiayaan cukup lama dan berbelit-belit. Pada satu sisi sikap pemerintah Indonesia cenderung tidak tegas terhadap persoalan tersebut. Sebagai negara besar dan tetangga yang baik, Indonesia tidak bisa membuat pemerintah Malaysia memberi sanksi tegas bagi pelaku penganiayaan. Bisa jadi pemerintah punya alasan tersendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun yang pasti, ada kekecewaan dari publik tanah air, atas sikap pemerintah Indonesia yang terkesan tidak gigih membela warganya yang menjadi korban penganiayaan di negara lain. Hal yang sama juga pada kasus tenaga kerja wanita (TKW) di Saudi Arabia (Sary et al., 2013).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian tenaga kerja luar negeri!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah tenaga kerja luar negeri!
3. Kemukakan satu kasus tenaga kerja luar negeri, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Menaklukkan rasa takut
adalah awal dari kebijaksanaan“
(Bertrand Russell, Filsuf dan peraih Nobel, 1872-1970)**



Bab 10

Pembangunan dan Lingkungan Hidup



59 **Capaian Pembelajaran**

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep pembangunan dan lingkungan hidup.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik pembangunan dan lingkungan hidup.

34

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan dan lingkungan hidup.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembangunan dan lingkungan hidup.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pembangunan dan lingkungan hidup.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pembangunan dan lingkungan hidup.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pembangunan dan lingkungan hidup.

A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pembangunan dilaksanakan tidak untuk pembangunan itu sendiri. Paradigma ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses, bukan tujuan. Sebagai proses maka pembangunan yang memiliki tujuan, perlu dirancang dan direncanakan secara baik. Perencanaan pembangunan yang baik, akan menghasilkan tujuan yang baik dan sesuai keinginan. Meski perencanaan tidak menentukan semua hasil dan tujuan, namun perencanaan pembangunan yang baik juga akan berkontribusi terhadap hasil dan tujuan baik yang hendak hendak dicapai.

Pembangunan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan umum. Tujuan ini yang terus menjadi fokus dari kegiatan pembangunan. Keempat hal tersebut yang menjadi orientasi pembangunan. Pembangunan yang kehilangan orientasi akan menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Dilema ini yang banyak disaksikan di berbagai belahan dunia. Pembangunan menciptakan eksek negatif terhadap kehidupan umum. Salah satunya adalah fenomena kerusakan lingkungan hidup.

Orientasi pembangunan yang semata-mata pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan material, menyebabkan kerusakan lingkungan yang selanjutnya berdampak pada kehidupan manusia, menciptakan kemiskinan baru, kesengsaraan dan kesulitan. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Salah satu contoh adalah, pemanfaatan kayu di hutan secara ekstraktif, baik secara legal maupun ilegal, tanpa diimbangi oleh reboisasi akan menyebabkan terjadinya deforestasi (penggundulan hutan). Pada saat hutan sudah gundul, maka bencana banjir akan menerbang warga yang berada di sekitar hutan. Banjir yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lebih luas terhadap harta benda, rumah dan tempat tinggal warga. Tidak hanya menyebabkan hilangnya rumah dan harta benda, namun juga menyebabkan kematian bagi

hewan peliharaan dan kehilangan nyawa manusia. Hal tersebut juga berdampak pada besarnya biaya pemulihan lokasi tersebut setelah diterjang bencana banjir.

B. Sejarah Isu Lingkungan Hidup

Mahalnya dampak pembangunan yang dilakukan secara eksploitatif dan ekstraktif menimbulkan keprihatinan banyak kalangan. Mereka kemudian menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dan menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan proses yang dilakukan. Pembangunan, tidak boleh sampai merusak lingkungan hidup, sehingga tidak hanya kerusakan yang ditimbulkan, namun tidak ada lagi yang akan diwariskan kepada generasi berikut. Hal tersebut tentu saja juga akan menimbulkan persoalan kemiskinan bagi generasi yang akan datang.

Seorang ahli bernama George Perkins Marsh menulis buku yang berjudul “Man and Nature” yang diterbitkan pada tahun 1864. Di dalam buku tersebut, Marsh menjelaskan aktivitas manusia yang berdampak pada berbagai bentuk lingkungan hidup yang terjadi di Mediterania. Marsh menekankan mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh keserakahan dan kelalaian yang dilakukan perusahaan teknologi. Marsh mengajak manusia untuk melakukan koreksi antara hubungan manusia dengan alam. Yang terjadi selama ini, hubungan manusia dengan alam menimbulkan berbagai bencana (Lowenthal, 2000).

Kemudian, pada tahun 1956 seorang ahli bernama William L Thomas menulis buku yang berjudul “Man’s Role in Changing the Face of Earth.” Di dalam buku tersebut, Thomas menjelaskan secara rinci dan detail perubahan lingkungan hidup yang terjadi sejak zaman prasejarah, hingga periode modern. Perubahan lingkungan terjadi karena jumlah manusia semakin banyak. Keinginan manusia semakin beragam, kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan (Deatherage-Newsom, 1978).

Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi mengenai isu lingkungan di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1977 berdiri “American Society of Environmental History,” yang menandakan munculnya sejarah lingkungan secara formal. Kajiannya fokus pada berbagai persoalan yang berhubungan dengan kaitan antara aktivitas manusia dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sejarah lingkungan perlu terus dikembangkan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga semakin aktual dan sistematis. Diskursus dan dialektika yang terjadi pada kajian sejarah lingkungan tidak bisa dihindarkan. Sehingga perlu semakin dibuka (Rajan & Cruz, 1997).

Di Eropa, Emmanuel Le Roy Ladurie, Marc Bloch, dan Fernand Braudel dari Annales School melakukan kajian sejarah lingkungan khususnya di Prancis khususnya di kawasan Mediterania. Ladurie menyebut bahwa hubungan antara manusia dengan alam dianggap tidak memiliki masalah hingga abad ke-18. Pada saat itu masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat agraris sehingga, tidak menimbulkan dampak atau eksek negatif terhadap lingkungan alam. Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan yang sulit berkembang. Hal tersebut kemudian didukung oleh kondisi cuaca dan curah hujan serta faktor alam lainnya (Ladurie, 1959).

Di Asia, pada tahun 1983, muncul kajian yang membahas lingkungan hidup di Asia Tenggara dan Asia Selatan lewat tulisan “Deforestation and the Nineteenth-Century World Economy.” Menurut Richard Tucker dan Richards Durham kegiatan penggundulan hutan (deforestasi) yang merusak lingkungan hidup, terjadi secara masif pada perang Dunia I. hal tersebut merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebab akibat dari pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kebutuhan material industri pabrik, terutama yang berada di wilayah Eropa (Thirgood, 1985).

Pada tahun 1985 di India juga muncul persoalan lingkungan, dengan terbitnya “The State of India’s Environment”. Menurut Rothermund, pertumbuhan ekonomi di India membawa dampak resesi bagi lingkungan alam. Pertumbuhan ekonomi dibayar dengan biaya

lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi menjadi seperti tidak berguna atau sia-sia. Sehingga diperlukan pendekatan lain untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan resesi pada lingkungan alam. Fenomena lokal yang terjadi di Indonesia, merupakan cermin dari fenomena umum yang terjadi di Negara-negara lain yang sedang memacu pertumbuhan ekonomi, berbasis pada pembangunan industri. Baik industri energi manufaktur, maupun industri nuklir dan lain-lain (Rothermund, 1985).

Sejarah kajian mengenai isu lingkungan hidup di Indonesia mulai ada pada tahun 1970-an. Hal tersebut dilihat dari keikutsertaan Indonesia pada seminar internasional mengenai pembangunan dan lingkungan yang dihelat di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971. Kemudian pada tahun 1972, Indonesia juga menjadi Negara peserta aktif pada konferensi internasional tentang isu lingkungan yang dihelat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia. Kemudian pada tanggal 15-18 Mei tahun 1972, digelar “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia Dan Pembangunan Nasional” atas pemrakarsa Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran Bandung (Rispalma⁸2018).

Pada tahun 1972 dibentuk Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup, yang kemudian berlanjut pada pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam tahun 1975. Hal tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1975 tentang “Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam.” Pada tahun 1978 dibentuk Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Emil Salim merupakan tokoh yang berperan melahirkan organisasi tersebut. Emil Salim yang memimpin ketiga lembaga tersebut hingga tahun 1983. Sejak itu, kajian mengenai lingkungan hidup menjadi arus utama (*mainstream*) di Indonesia (Manurung & Santosa, 2019).

Sebetulnya isu lingkungan hidup sudah menjadi pemikiran dan perbincangan para pendiri bangsa Indonesia (*the founding fathers*). Hal

tersebut diketahui dari setidaknya adanya bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas mengenai lingkungan hidup. Disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan bangsa Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Wibawa, 2016).

Isu lingkungan hidup terus mengemuka seiring dengan meningkatkan kegiatan industrialisasi di Indonesia yang memacu eksploitasi sumber daya alam yang ada, mulai dari hutan, energi batu bara, sumber kekayaan laut dan lain-lain.

C. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki arti yang cukup jelas. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, “lingkungan” dan “hidup”. Lingkungan merupakan tempat dimana manusia tinggal dan beraktivitas. Manusia dalam hal ini dimaknai sebagai pribadi maupun kelompok, individu maupun organisasi. Organisasi bisa beragam, organisasi bisnis atau perusahaan, maupun organisasi seperti negara dan lainnya. Sedangkan kata “hidup” merujuk pada kondisi lingkungan tempat tinggal manusia yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup selain manusia dengan ekosistem alam yang ditempati. Misalnya pepohonan, tumbuhan, dan segala macam.

Menurut Kathy Driscoll dan Mark Starik di dalam tulisannya “*The Primordial Stakeholder: Advancing the Conceptual Consideration of Stakeholder Status for the Natural Environment*” menyebut bahwa, lingkungan hidup merupakan entitas lokal yang harus dilihat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lingkungan hidup termasuk di dalamnya atmosfer, hidrosfer, litosfer, proses ekosistem, dan semua bentuk kehidupan manusia, termasuk yang bukan manusia (Driscoll & Starik, 2004). Driscoll dan Starik menekankan bahwa lingkungan hidup bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan manusia, tapi merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

²²⁵ Pengertian mengenai lingkungan hidup juga dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang “Lingkungan Hidup.” Undang-Undang tersebut, merupakan ²³³ perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah, “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Undang-Undang tersebut juga membebankan pemeliharaan lingkungan hidup kepada setiap orang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 67. “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.” (Lisdiyono, 2014).

D. Macam-Macam Isu Lingkungan Hidup

Isu atau problem lingkungan hidup yang belum terpecahkan beragam dan semakin bervariasi. Hal ini seiring dengan semakin permissifnya kepala negara, pemilik perusahaan, dan pemangku kebijakan terhadap persoalan lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup kadang dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan kepentingan politik ekonomi dari kepala negara, dan kepala daerah. Bisa disebutkan, ada beberapa macam isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pertama, pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena semakin banyaknya rumah dan perkantoran yang menggunakan kaca, sehingga menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global selanjutnya menyebabkan es yang berada di wilayah Kutub Utara menjadi cair. Selanjutnya membuat air laut pasang. Dampak lingkungan alam yang dirasakan manusia adalah, gelombang tinggi, dan rob. Banyak pulau yang tenggelam dan hilang (Schelling, 1992).

Kedua, pencemaran dan perusakan lingkungan. Bentuk lain dari problem lingkungan hidup adalah maraknya pencemaran lingkungan yang ditandai dengan semakin banyaknya sampah dan limbah yang mencemari lingkungan alam (Berthier, 2003). Pencemaran dalam bentuk lain adalah polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik industri (Li et al., 2019). Persoalan polusi menjadi masalah bagi kota metropolitan dan modern. Asap kendaraan dan asap industri berkumpul menjadi satu, membuat pemandangan udara hitam.

Ketiga, penggundulan hutan (deforestasi) menjadi persoalan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri kertas dan kayu yang dilakukan secara massif, tanpa diiringi oleh reboisasi. Jepang dan negara lain di berbagai belakang dunia pernah mengalami. Indonesia mengalami laju deforestasi yang semakin tidak terbendung. Hal ini berdampak terjadinya banjir bandang di sekitar lokasi hutan. Selain itu terjadi proses pembakaran lahan hutan yang menyebabkan bencana asap, tidak hanya melanda wilayah Indonesia, namun juga sampai ke negara lain. Stewart dan Krier, menyebut pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*). (Widayati, 2015).

E. Implikasi Lingkungan Hidup Terhadap Ekonomi Politik

Lingkungan hidup menjadi isu sensitif untuk bidang ekonomi politik pembangunan. Ada semacam kontradiksi antara memacu pertumbuhan ekonomi yang berbasis para eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam, atau tetap memelihara kelestarian lingkungan alam, dengan risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dua pilihan yang relatif tidak mudah untuk ditentukan. Tetapi yang terjadi adalah pilihan pertama tetap dipilih dan dilanjutkan. Negara-negara di dunia melanjutkan pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan ekstraksi sumber daya alam. Dampaknya juga semakin terlihat jelas, bencana alam setiap tahun selalu terjadi, dengan dampak dan korban yang semakin meluas.

Persoalan lingkungan hidup juga menjadi persoalan politik. Mengingat buruknya dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan, mulai dari pemanasan global, pencemaran lingkungan,

deforestasi dan lain-lain, maka menjadi isu politik. John McCain, calon Presiden Amerika Serikat yang bersaing dengan Barack Obama pada Pemilu 2008, melakukan kampanye ramah lingkungan. Begitu pula dengan Angela Merkel, Kanselir Jerman, yang bertarung sebagai calon Presiden ikut menyorot kerusakan lingkungan alam (Wauran, 2009).

Lebih jauh lagi, tidak hanya berkaitan isu kampanye para calon presiden, isu lingkungan hidup juga menjadi hal penting untuk ditangani secara baik dan memadai oleh pemerintah dan wakil rakyat. Banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang beraneka ragam, memaksa pemerintah untuk membentuk badan khusus yang menangani bencana. Maka dibentuklah Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Tidak hanya di level pusat, badan ini kemudian diperluas hingga ke daerah-daerah. Indonesia yang memiliki luas wilayah, dengan aneka ragam potensi alam, mulai dari laut, gunung, hutan lain-lain, menjadi tantangan tersendiri untuk menghadapi bencana yang terjadi. Indonesia yang termasuk jaringan cincin api dunia (*ring of fire*) juga menjadi tantangan tersendiri untuk bersiap menghadapi bencana. Dalam hal ini Indonesia menghadapi persoalan pada anggaran bencana yang masih minim, walaupun dialokasikan, kadang dijadikan lahan korupsi oleh pejabat di pusat maupun daerah.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian pembangunan dan lingkungan hidup!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah pembangunan dan lingkungan hidup!
3. Kemukakan satu kasus pembangunan dan lingkungan hidup, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Hiduplah kamu seperti pohon yang berbuah,
manusia melemparinya dengan batu,
tetapi ia membalasnya dengan buah“
(Abu Hamid Al Ghazali, filsuf, 1058-1111)**



Bab 11

Pajak dan Retribusi



59 paian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep pajak dan retribusi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik pajak dan retribusi.

6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep pajak dan retribusi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak dan retribusi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik pajak dan retribusi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pajak dan retribusi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pajak dan retribusi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pajak dan retribusi.

A. Latar Belakang

Negara memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi menjadi sumber utama dan terbesar pemasukan negara. Negara memiliki pemasukan dan sumber pendapatan selain pajak dan retribusi, namun jumlahnya tidak sebesar pajak. Pajak dan retribusi mendominasi pendapatan negara. Dari pajak dan retribusi yang diperoleh negara, digunakan untuk membayar gaji, honor dan tunjangan serta fasilitas pejabat dan aparatur negara, dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, pajak dan retribusi digunakan untuk membiayai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, atau pejabat dan aparatur pemerintah yang telah digaji dari uang pajak dan retribusi. Sehingga secara jelas, bahwa pajak merupakan darah yang mengalir di tubuh negara. Tanpa pajak darah tidak akan mengalir dan itu berarti kematian.

Di negara-negara maju pajak juga menjadi tulang punggung dari pembiayaan negara. Di negara-negara maju semakin besar pendapatan orang, pajaknya semakin besar. Seperti pekerja seni dan artis Hollywood pajaknya cukup besar. Begitu pula orang kaya dengan berbagai harta yang dimiliki memiliki beban pajak yang tinggi. Ada beragam pajak yang dibebankan kepada mereka. Begitu pula di Indonesia, warga negara dibebani berbagai macam jenis pajak. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pemasukan bagi negara. Untuk selanjutnya dari pajak negara dapat membiayai belanja pegawai dan pembangunan.

Di Indonesia pemasukan negara dari sektor pajak hingga mencapai 70% sampai 80%. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyampaikan mengumumkan realisasi penerimaan pajak mencapai angka Rp. 1.332,1 triliun. Jumlah tersebut merupakan penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 (Fakhruzy, 2020). Di tengah tingginya kebutuhan negara terhadap pajak, ada persoalan yang berkaitan dengan pajak. Korupsi para pejabat dan birokrasi yang mengurus pajak. Pejabat-pejabat di bidang pajak yang terjerat kasus

korupsi. Begitu pula dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya secara baik dan benar.

B. Sejarah Pajak

Pajak memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri dari berbagai literatur dan kajian yang ada. *Pertama*, pajak sudah ada sejak sebelum masehi. Era ini terjadi pada Republik Roma tahun 509-27 sebelum masehi. Pada masa ini pajak dikenal lewat berbagai pungutan, yaitu *ensor* dan *questor*. Ada pula “tributum” semacam pajak atas kepala (*head tax*). Pajak jenis ini dipungut dari warga Roma pada saat masa perang sampai tahun 167 sebelum masehi. Penguasa Roma juga memberlakukan pada tidak langsung yang disebut “vegtigalia” yaitu pajak tidak langsung, untuk jenis pungutan bagi para pengguna pelabuhan (*portoria*) (Hopkins, 1980). Pada zaman Julius Caesar pajak dikenal dengan sebutan “centesima rerum venalium” yaitu pajak penjualan yang dikenakan sebesar 1% dari omzet penjualan. Di Italia, pajak juga dikenal dengan sebutan “decumae” yaitu pungutan sebesar 10% dari para petani atau pemilik tanah (Stuart, 2015).

Kedua, Setelah masehi, pajak diberlakukan di Spanyol pada abad ke-14. Di Spanyol pajak dikenal dengan sebutan “alcabala.” Pajak ini dikenakan bagi kegiatan jual beli, yang dikenakan kepada penjual yang mendapatkan uang (R. S. Smith, 1948). Di Amerika, pada tahun 1492 penduduknya diwajibkan untuk membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris. Berbagai pungutan tersebut meliputi kewajiban untuk membayar pajak terhadap pembelian koran, kartu judi, dadu dan bahkan atas akta perkawinan. Ada pula pajak terhadap teh, kertas cat dan kartu. Hakim Agung di Amerika Oliver Wendell Holmes, Jr, (1841-1935) menyebut pajak sebagai pajak adalah harga yang kita bayar untuk peradaban “*taxes are the price we pay for civilization.*” Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran pajak di dalam perekonomian dan kemajuan sebuah negara. Bahkan pajak disebut sebagai pondasi pembangunan peradaban. Tanpa pajak, tidak akan

terwujud peradaban. Benjamin Franklin (1706-1790), seorang negarawan dan ilmuwan terkenal Amerika Serikat menyebut dunia ini tidak ada pasti, kecuali pajak dan kematian “*nothing is certain but tax and dead.*” Presiden Amerika Serikat Roosevelt (1882-1945) juga memiliki semboyan bayar pajak sesuai penghasilan “*pay as you earn.*” (Creighton, 2010).

Sejarah pajak di Indonesia, sudah mulai ada sejak abad ke-13, yang diberlakukan oleh para raja di Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit pertama, yakni Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1301 masehi pajak sudah dikenal. Hal tersebut diketahui dari sebuah piagam yang menyebut adanya pembebasan pajak pada sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa tersebut ditetapkan sebagai desa perdikan yang bebas pajak dan diberikan kepada Rajarsi. Rajarsi merupakan pejabat yang telah berjasa kepada raja dan negara, sehingga dia dibebaskan oleh kerajaan Majapahit dari kewajiban untuk membayar pajak (Rasmini, 2011).

Pada era modern, pemberlakuan pajak juga dilakukan oleh Belanda pada saat melakukan penjajahan di Indonesia. Berbagai pajak, berupa pungutan dilakukan oleh Belanda terhadap warga pribumi. Pajak dalam pemungutan diberlakukan dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk natura (*payment in kind*). Bagi mereka yang tidak punya uang, maka diganti dengan kerja paksa (*cultuurstelsel*) pada 1830-1870. Ada pula dalam bentuk uang dan upeti. Beban pajak atau pungutan, semakin banyak pada saat berdirinya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) Indonesia tahun 1602. Pada masa kejayaan Raffles (1811) kemudian dikenal pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas rumah (Wijayanti, 2010).

Begitu pula pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung singkat, Jepang juga memberlakukan pajak kepada warga pribumi, terutama para petani. Pada tahun 1944, dengan menjalankan amanat “Syucokan” Jepang yang menjajah Indonesia waktu itu memberlakukan kewajiban kepada rakyat Indonesia yang menjadi petani untuk menyerahkan padi kepada pihak Jepang setiap musim

panen. Selain memberlakukan pungutan terhadap hasil panen padi para petani, Jepang juga memberlakukan pajak dalam bentuk tenaga yang harus dikerjakan secara sukarela bagi pekerja “romusha” dan pembantu tentara Jepang “heiho” (Iryana, 2017).

Kebijakan pajak kemudian terus berlangsung setelah Indonesia merdeka, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Pemerintah Orde baru juga memberlakukan pajak bagi warga negara, dan kemudian terus berlangsung hingga kini.

C. Pengertian Pajak

Beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Erly Suandy, pajak merupakan iuran berupa barang atau uang yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya bisa memaksa, dengan tidak mendapat jasa timbal. Dapat ditunjukkan langsung digunakan untuk membayar pengeluaran, demi mencapai kesejahteraan umum (Gunarso, 2016). Sementara itu menurut Santoso Brotodiharjo, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pajak bukan bentuk hukuman, namun berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Tidak ada timbal balik dari negara kepada pemberi pajak. Pajak digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum (Mangoting, 1999).

Negara juga memiliki pengertian tersendiri mengenai pajak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Di Pasal 1 disebutkan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Darmayasa & Aneswari, 2019).

Definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan ahli maupun peraturan perundang-undangan bersifat kaku dan memaksa. Orien-

tasinya juga pada materialisme, untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya dari rakyat. Suka tidak suka, rela tidak rela, wajib pajak harus membayar pajak yang sudah ditetapkan. Saat melakukan transaksi jual beli, maka dengan sendirinya, konsumen dipaksa untuk membayar pajak sebesar 10%. Begitu pula pada saat makan di restoran, atau menginap di hotel, maka secara langsung konsumen harus membayar pajak sebesar 21% dari harga yang dibayar. Pajak menjadi otoritas negara untuk memaksa baik konsumen maupun pengusaha yang memiliki usaha. Untuk selanjutnya uang pajak masuk ke kas negara. Selanjutnya setelah masuk ke kas negara uang tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

D. Jenis dan Bentuk Pajak

Di Indonesia, hampir seluruh aspek ekonomi dan kegiatan warga negara berkaitan dengan kewajiban pajak. Sehingga, bila diperhatikan secara seksama, maka pajak, khususnya di Indonesia beragam jenis dan bentuk. Dengan istilah lain, apa saja dikenakan pajak oleh negara. Ada pajak yang dikenakan dan dilakukan pemungutannya oleh pemerintah pusat terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran strategis untuk meningkatkan pemasukan negara, selanjutnya untuk pembangunan. Hal ini berkaitan dengan penghasilan dikenakan bagi perorangan maupun kelompok atau korporasi. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur besaran tarif pajak, kisaran 25% hingga 28% bagi badan usaha (Purnawan, 2011). Adapun tarif pajak perorangan atau penghasilan perorangan bervariasi, mulai dari 5% sampai 30%. Pajak perorangan dikenakan bagi pekerja atau pegawai yang mendapat penghasilan tetap, yang dihitung berdasarkan pendapatan setiap bulan atau akumulasi per tahun (Arniati & Muammar, 2012).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

tentang “Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan barang mewah.” Berdasarkan peraturan tersebut, maka setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dikenakan pajak. Pajak tersebut dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak adalah konsumen akhir, yang biasanya pembayarannya langsung dilakukan secara bersamaan pada saat membayar barang yang dibeli atau jasa yang digunakan yang dikenakan pajak. Saat konsumen membeli baju di pusat perbelanjaan, maka yang menanggung pajak bukan pemilik pusat perbelanjaan, namun konsumen yang membeli baju. Pajak yang dikenakan sebesar 10% langsung dibayar oleh konsumen pada saat membayar baju yang dibeli (Daud et al., 2018).

Selain yang diberlakukan dan dipungut oleh pemerintah pusat, ada pula pajak daerah, yaitu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak jenis ini biasanya disetor melalui Dinas Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau dengan sebutan lainnya di bawah pemerintah daerah.

Pertama, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberlakuan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang “Pajak Bumi dan Bangunan” yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1986. Pada tahun 1994, dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, orang atau badan hukum yang memiliki bangunan dengan nilai jual sekurang-kurangnya Rp 12.000.000 dikenakan pajak (Pudihang et al., 2017).

Kedua, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemberlakuan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, maka kewenangan untuk memungut BPHTB diserahkan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah kabupaten/ kota mulai efektif berjalan 1 Januari 2011. Dengan mengalihkan kewenangan ke daerah, maka sebetulnya ini menjadi peluang bagi daerah untuk mendapat sumber pemasukan yang besar, sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan. Namun realitanya banyak daerah yang tidak mendapat manfaat secara maksimal dari pengalihan ini (Putra et al., 2020).

Sejak adanya otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap berbagai objek pajak yang ada di daerah. Ada retribusi terhadap parkir di tempat-tempat tertentu, dan lain-lain. Ada retribusi masuk ke tempat wisata lain-lain. Semakin banyak kegiatan ekonomi warga, semakin kreatif pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang secara langsung membebani masyarakat. Tentu dengan alasan untuk meningkatkan pemasukan daerah, dan untuk selanjutnya membiayai belanja pembangunan daerah (Asih & Irawan, 2018).

E. Implikasi Pajak Terhadap Ekonomi dan Politik

Pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh negara kepada warganya sesungguhnya memiliki implikasi baik positif maupun negatif. Pada masa lalu, pajak yang diberlakukan oleh Inggris, pada saat menguasai Amerika Serikat menimbulkan gejolak dan perlawanan dari masyarakat Amerika (Dorfman, 2008). Begitu pula dengan pajak yang pernah diberlakukan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia menimbulkan perlawanan dari masyarakat Indonesia. karena pajak yang diberlakukan terlalu memberatkan (Lina et al., 2020).

Hingga saat ini, pajak memiliki implikasi terhadap perekonomian negara. Di Indonesia pajak memiliki implikasi positif bagi negara, sebagai sumber pendapatan utama negara, dan menjadi penggerak ekonomi negara. Pajak juga memiliki implikasi politik, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak dibahas secara politik oleh pemerintah bersama wakil rakyat di Senayan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan pajak yang cukup menentukan perekonomian dan


perpolitikan negara. Bila pemasukan dari pajak semakin jauh dari target maka kinerja pemerintah disorot oleh parlemen. Hal ini tentu saja memiliki implikasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pemerintah yang berkuasa dinilai tidak memiliki kemampuan (*power*) untuk mengelola negara dengan baik.

Implikasi selanjutnya secara ekonomi adalah, pertumbuhan ekonomi akan melambat atau stagnan. Seperti yang terjadi pada masa pandemi covid-19, pendapatan negara dari sektor pajak berkurang drastis. Hal ini disebabkan karena lesunya sektor riil dan sektor ekonomi lainnya, yang berpengaruh kepada pendapatan perorangan maupun pendapatan badan usaha. Sehingga baik perorangan maupun badan usaha banyak yang membayar pajak sebagaimana yang biasa dibayarkan sebelum masa pandemi berlangsung. Jangankan untuk membayar pajak, banyak sekali badan usaha yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (*cut off*) terhadap karyawan. Dampak selanjutnya adalah karyawan yang selama ini ikut membayar pajak, karena menjadi pengangguran, tidak lagi bekerja, tidak lagi membayar pajak. Begitu pula dengan badan usaha yang tidak mampu bertahan, maka dengan sendirinya menutup kegiatan usahanya dan berhenti beroperasi (Silalahi & Ginting, 2020).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian pajak dan retribusi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah pajak dan retribusi!
3. Kemukakan satu kasus pajak dan retribusi, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

**“Apabila kita bicara tentang uang,
maka semua orang agamanya sama“
(Voltaire, filsuf dari Perancis, 1694-1778)**



Bab 12

**Negara, Kemiskinan
& Pembangunan**



59 **Kemampuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep negara, kemiskinan dan pembangunan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik negara, kemiskinan dan pembangunan.

34

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep negara, kemiskinan dan pembangunan..
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara, kemiskinan dan pembangunan..
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik negara, kemiskinan dan pembangunan..
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam negara, kemiskinan dan pembangunan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam negara, kemiskinan dan pembangunan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah negara, kemiskinan dan pembangunan.

A. Pengertian Negara

Negara memiliki banyak pengertian dan konsep yang dikemukakan oleh ahli politik. Di antara banyak pengertian tersebut, beberapa disampaikan disini. Menurut Plato, negara merupakan individu-individu yang berkumpul membentuk satu tubuh, melakukan proses kemajuan dan evolusi. Negara ideal dipimpin oleh filosof yang dituntut oleh akal dan ilmu (R. Hall, 1992).

Sementara itu, negara menurut Aristoteles adalah “sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik.” (Namang, 2020). Pada bagian ini, Aristoteles ingin menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan berbudi yang bebas melakukan apa saja tanpa mengganggu orang lain (Everson, 1988).

Ibnu Chaldun mengartikan negara sebagai “negara merupakan sesuatu yang diperlukan bagi menegakkan perintah agama.” Dalam pandangan Chaldun, negara merupakan “alat yang digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan komunitas manusia, yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.” (Nizar, 2003).

Jean-Jacques Rousseau di dalam karyanya yang fenomenal “kontrak sosial” menyebut bahwa manusia bahagia dalam komunitas mereka yang pada dasarnya baik, namun manusia tetap memerlukan kontrak sosial, untuk menghadapi rintangan yang datang kepada mereka. “Sehingga, manusia dapat mewujudkan pembangunan alamiah, merealisasikan kapasitas berpikir, mengekspresikan kebebasan secara maksimal, hal tersebut dilakukan oleh negara.” (Muthmainnah, 2011).

Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki kecenderungan untuk berperang, padahal keamanan dan ketenangan lebih baik untuk menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Ketenangan dan keamanan akan terbentuk jika setiap individu melepaskan kekuasaan dan haknya pada seseorang yang telah dipilihnya untuk mengurusnya. Maka

terbentuklah negara yang menampung keinginan individu yang berbeda-beda untuk melebur menjadi keinginan besar (Steinberger, 2008).

Menurut Charles Louis de Secondat Baron²⁴⁰ Montesquieu, atau biasa disebut Montesquieu, negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan yang dikenal dengan istilah “trias politica.” Yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pendapat Montesquieu tidak dipungkiri sebagai respon terhadap kondisi Prancis dimana Montesquieu hidup pada saat itu (1689-1755) (Gearhart, 1980).

Masyarakat Prancis diwarnai sistem kerajaan, yang memungkinkan keluarga kerajaan atau bangsawan memiliki hak-hak istimewa dibandingkan dengan rakyat kebanyakan. Maka sistem pemerintahannya pun menganut sistem monarki atau dipimpin oleh raja, yang kekuasaannya absolut atau mutlak. Sebab kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada raja. Trias politica dimaksudkan sebagai pemikiran yang mengoreksi kekuasaan yang berjalan saat itu, dimana raja menjadi semua sumber kekuasaan. Raja yang membuat aturan dan undang-undang, raja pula yang menjadi eksekutor pelaksanaannya, dan raja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan semua aturan yang ada. Di tangan raja seluruh kekuasaan bertumpu. Menurut Montesquieu hal tersebut tidak baik dalam negara.

John Locke, seperti mengikuti apa yang dikemukakan oleh Montesquieu yang menyebut bahwa, negara merupakan wadah dimana terjadinya kesetaraan yang tidak ada kekuasaan yang lebih dari yang lain. Sebab secara alamiah manusia³⁵ telah lahir secara bebas, tidak ada yang menjadi atasan dan bawahan. Setiap orang memiliki hak dan kedaulatan yang sama antara satu dengan yang lain. Dalam kekuasaan negara juga demikian, perlu adanya kesetaraan diantara lembaga negara yang ada. Kesetaraan lembaga negara akan menjadi alat kontrol satu sama lain (Locke, 1887).

Menurut Antonio Gramsci, “negara adalah sekumpulan teori dan praktik yang kompleks, penguasa memiliki kewajiban untuk mengaturnya, untuk melakukan pemaksaan terhadap kekuasaan di luarnya,

tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi.” (Moran, 1998). Gramsci menegaskan bahwa negara tidak semata-mata sebagai instrumen kekuasaan bisa digunakan oleh pengusaha sesuka hati. Namun negara harus dipergunakan untuk menciptakan kebaikan bagi rakyat.

B. Pengertian Kemiskinan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2009 mencoba untuk merumuskan pengertian sebagai, “kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.” (Dina & Adwiya, 2016). Konsep kemiskinan yang dikemukakan Bappenas RI tersebut seperti abstrak, tidak konkrit, namun sepenuhnya bisa mengukur tentang kemiskinan. Siapapun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, seperti makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal, maka orang tersebut disebut miskin. Bila konsep ini yang digunakan, maka tentu saja jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat besar jumlahnya.

Sementara itu Bank Dunia (World Bank) membuat ukuran kemiskinan secara lebih konkret dan lebih terukur. Menurut Bank Dunia yang dimaksud dengan miskin adalah, orang yang, “dengan pendapatan di bawah USD \$1/ hari dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/ hari.” (Pender, 2002). Bank Dunia ikut serta merumuskan konsep dan pengertian kemiskinan, dengan dasar, ikut terlibat dalam membantu negara-negara di dunia untuk mengatasi kemiskinan, dengan memberi pinjaman. Pemberian pinjaman tersebut berdasarkan pengajuan yang disampaikan oleh pemerintahan suatu negara. Untuk mengukur seberapa banyak jumlah pendidikan miskin yang akan dibantu, Bank Dunia kemudian membuat semacam kriteria atau konsep seperti tersebut.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) kemudian melakukan pemetaan terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2012, BPS kemudian membuat konsep miskin bagi warga Indonesia adalah, mereka yang berpenghasilan paling besar Rp 233.000/ bulan, atau sama dengan Rp 7.000/ hari (Ramdani, 2015). Pendapatan Rp 7.000 per hari adalah hitungan yang sangat rendah. Hal ini dampaknya pada semakin sedikit warga miskin. Sebab bila dinaikkan angkanya menjadi Rp 15.000 per hari, maka penduduk miskin akan semakin besar jumlahnya.

C. Jenis Kemiskinan

Kemiskinan itu tidak tunggal, ia memiliki beragam model, bentuk atau jenis. Dari tipikal kemiskinan yang umum terjadi, ada empat jenis kemiskinan yang dikemukakan oleh Jamasy, 2004, yaitu:

Pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan mutlak, yaitu orang yang tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan absolut juga bisa dalam bentuk tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup minimum secara mandiri, seperti kebutuhan makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal yang layak.

Kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi warga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tapi relatif lebih rendah dari pendapatan warga yang tidak masuk kategori miskin. Kemiskinan relatif juga bisa bermakna, warga yang secara ukuran ekonomi tidak masuk kategori miskin, namun ia bisa menjadi miskin karena kondisi tertentu. Misalnya warga yang tidak masuk kategori miskin, namun karena sakit, dan butuh biaya berobat, maka harta seperti tanah yang selama ini dimiliki untuk menopang perekonomian keluarga, jatuh miskin, karena tanahnya dijual untuk berobat. Tanah dijual karena tidak memiliki dana tabungan, dan untuk ikut asuransi tidak memiliki uang yang memadai.

Ketiga, kemiskinan struktural. Warga yang memang dalam kondisi miskin karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya warga

yang berada di wilayah pelosok dan terpencil, atau yang dikenal dengan wilayah 3T, terluar, terjauh, terisolir. Warga yang berada di wilayah tersebut rata-rata berada di dalam kondisi miskin. Kemiskinan warga yang berada di daerah tersebut adalah kemiskinan struktural.

Keempat, kemiskinan kultural. Warga yang miskin di tengah budaya miskin yang rela menerima nasib yang dialami dan terjadi, serta percaya kepada takdir dan kehendak Tuhan. Miskin seperti ini adalah miskin kultural, yaitu memang budaya personal, keluarga dan masyarakat secara umum, menerima kemiskinan sebagai sesuatu yang biasa, bisa diterima dan tidak menjadi masalah, bahkan dianggap sebagai takdir Tuhan (Jamasy, dalam (Delistiawati, 2018).

D. Faktor Penyebab Kemiskinan

Setiap orang sesungguhnya tidak ingin miskin, tetapi kadang ada yang rela menerima kondisi miskin yang dihadapi, apakah dengan sukarela atau terpaksa menerima kondisi tersebut. Kemiskinan sebagai suatu realitas sosial, tentu saja tidak terjadi begitu saja, ada sebab yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Menurut Revrisond Baswir 1997, ada empat faktor penyebab kemiskinan, sebagai berikut.

Pertama, kemiskinan natural. Miskin yang disebabkan oleh faktor alamiah. Faktor alamiah yang dimaksud disini adalah faktor di luar diri manusia. Yang masuk kategori miskin secara alamiah adalah, orang yang cacat sejak lahir, karena cacat fisik atau mental, tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi diri secara mandiri. Miskin secara alamiah juga bisa dalam bentuk orang miskin karena diakibatkan oleh bencana alam, seperti banjir, longsor atau gempa bumi, atau badai, tsunami dan bencana alam lain yang menyebabkan seluruh harta benda yang dimiliki ludes, habis tidak tersisa dilanda bencana. Korban bencana seperti ini menjadi miskin secara natural.

Kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh budaya yang ada dalam masyarakat. Misalnya budaya malas bekerja, tidak disiplin, ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras. Pada masyarakat tertentu budaya ini masih

melekat. Tidak hanya sekedar malas dan tidak mau bekerja tapi mau hidup enak, ada budaya masyarakat yang tidak mau menuntut ilmu. Budaya semacam ini semakin kuat, saat melihat ada anggota masyarakat yang telah menuntut ilmu kemudian pulang ke kampung dan menjadi pengangguran.

Ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak adil, sentralistik. Selain itu, kondisi miskin disebabkan karena aktor negara, dalam hal ini birokrasi dan politisi yang bertindak korup. Sehingga menyalahgunakan anggaran negara yang seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun digunakan untuk memperkaya diri. Di beberapa negara yang tingkat korupsinya tinggi, berkorelasi semakin banyak warga miskin di Negara tersebut (Mussadun & Nurpratiwi, 2016).

E. Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Ada banyak sudut pandang dan paradigma yang berkaitan dengan kemiskinan. Ada yang menganggap kemiskinan sebagai takdir dari Tuhan yang harus diterima. Cara pandang seperti berlanjut pada perilaku pasrah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, cenderung malas, dan tidak berusaha bekerja keras. Sebab sekeras dan sekuat apapun kerja dan upaya yang dilakukan, kalau takdirnya sudah miskin, maka tetap saja miskin. Meski hanya bekerja sekedarnya, kalau sudah ditakdirkan kaya, maka akan menjadi kaya.

Ada pula yang beranggapan bahwa kemiskinan merupakan kondisi miskin yang terjadi dapat diubah dan diupayakan. Sebaliknya, kondisi kaya juga bisa berubah menjadi miskin, jika salah mengelola harta kekayaan. Terhadap cara pandang seperti ini biasanya dilakukan upaya untuk keluar dari kondisi miskin, dan adanya upaya untuk mempertahankan kekayaan yang dimiliki, dengan bekerja keras dan usaha yang maksimal untuk tetap kaya dan tidak miskin.

Terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda mengenai kondisi miskin, maka sebetulnya baik yang menganggap miskin sebagai

takdir maupun miskin sebagai kondisi yang bisa dirubah, sama-sama ada upaya untuk merubah kondisi miskin. Hanya pada upaya untuk mengentaskannya yang cenderung berbeda. Pada kasus pertama, biasanya upaya untuk keluar dari miskin biasa sekedarnya saja. Sedangkan pada kasus kedua, upaya yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Pada bagian ini jika dicermati, sesungguhnya tidak ada yang ingin berada dalam kondisi miskin. Hampir seluruh manusia ingin berada dalam kondisi kaya. Hal tersebut juga tentu saja berhubungan dengan usaha yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan, kondisi miskin tidak dapat dipelihara secara turun-temurun. Sebab kemiskinan merupakan bagian dari persoalan sosial, yang harus dicarikan solusi untuk diselesaikan. Berkurangnya kemiskinan atau hilangnya kemiskinan, merupakan salah satu indikator negara maju dan makmur. Negara makmur adalah negara yang seluruh warganya tidak kesulitan untuk memenuhi hidup tanpa bantuan pihak lain.

F. Peran Negara Dalam Pembangunan

Dalam teori kontrak sosial (*social contract*) yang dibahas oleh ahli politik terutama Rousseau, meniscayakan pihak penyelenggara yang sudah mengambil alih tanggung jawab secara perorangan dari warga secara umum untuk melaksanakan pembangunan. Penyelenggara Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi terbagi ke dalam dua cabang pokok kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif. Kedua cabang pokok kekuasaan ini kemudian memilih penyelenggara di bidang yudikatif, apakah di kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun komisi Negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus Indonesia. Eksekutif yaitu presiden, gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Begitu di legislatif, yaitu wakil rakyat dipilih secara langsung, baik di pusat maupun di daerah. Saat para penyelenggara Negara

tersebut dipilih dan dilantik serta disumpah di atas kepala mereka kitab suci, maka mereka sudah resmi melakukan kontrak sosial dengan rakyat yang memilih untuk mengambil alih tanggung jawab pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Sejak saat itu pula penyelenggara mendapat wewenang dan kekuasaan yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan Negara. Tidak hanya wewenang yang diperoleh, namun penyelenggara Negara juga mendapat gaji, honor, tunjangan dan fasilitas yang berasal dari uang rakyat. Uang yang bersumber dari rakyat dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk pajak, retribusi maupun pendapatan Negara lain, sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar kewenangan yang diperoleh, dan bekerja dengan dibayar oleh rakyat, penyelenggara Negara melaksanakan peranannya sebagai aktor pembangunan. Secara nyata, tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan ada di tangan para penyelenggara Negara, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa. Maka berhasil atau gagalnya pembangunan sangat ditentukan oleh penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara memiliki seluruh instrumen dan perangkat untuk melaksanakan pembangunan, mulai dari otoritas, peraturan, anggaran, sumber daya manusia, dan bila diperlukan hal tersebut dapat ditambah dan diperluas, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law.

G. Upaya Negara Mengurangi Kemiskinan

Negara memandang kemiskinan sebagai satu persoalan sosial yang diakibatkan oleh banyak faktor. Negara memiliki beban dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan kepada siapapun yang menjadi pejabat negara untuk harus berupaya untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Tentu saja, strategi, pendekatan, dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengentaskan kemiskinan, tidak bisa tunggal, perlu beragam sesuai dengan jenis kemiskinan.

Pertama, untuk jenis miskin yang disebabkan oleh budaya, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan budaya pula. Pendekatan budaya bisa dilakukan dua hal, yaitu pendidikan dan agama. Pada bagian pendidikan, negara perlu menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan, sarana-prasarana, infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, akses dan lain-lain kepada warga miskin. Warga miskin harus dimudahkan dan dilayani dalam pendidikan, sehingga warga miskin termotivasi untuk berpendidikan. Jalan pendidikan memang menjadi satu cara untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dengan pendidikan orang memiliki skill dan keahlian, bila telah memiliki keahlian orang bisa bekerja, dengan bekerja orang mendapat gaji/ upah, dengan upah bisa membiayai diri dan keluarga, bahkan bisa membayar pajak ke negara. Adapun pendekatan agama, bisa dengan proses penyadaran yang dilakukan ahli/ tokoh agama yang sering melakukan kegiatan ceramah, pengajian, bimbingan dan lain sebagainya, mengenai pentingnya menjadi orang kaya yang baik di dalam agama. Saat seseorang kaya, maka ada kesempatan yang luas untuk beramal membantu orang lain. Membantu orang lain dengan harta terutama, merupakan salah satu cara untuk masuk surga.

Kedua, untuk jenis kemiskinan struktural, atau miskin karena perlakuan yang tidak adil, maka pemerintah perlu merumuskan dan menata ulang kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya adalah dengan upaya menghilangkan sentralisasi di dalam pembangunan. Pembangunan harus sampai pada level terendah dari negara, yaitu desa. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengucurkan dana PNPM Mandiri desa dan perkotaan, juga dana desa merupakan salah satu upaya yang patut diapresiasi, meski dalam pelaksanaannya perlu banyak pembenahan. Pendekatan yang dilakukan untuk kemiskinan struktural ini selain menghilangkan sentralisasi adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*). Selain itu pemberantasan korupsi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terbuka terhadap publik (*open government*). Korupsi yang dilakukan

oleh pemangku kebijakan negara, merupakan sumber utama kemiskinan. Korupsi tidak hanya mengambil hak rakyat di dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, namun juga menutup peluang semakin besarnya pemasukan negara yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Korupsi yang dilakukan oleh politisi dan birokrasi meliputi korupsi di hulu dan korupsi di hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi adalah penegakan hukum (*law enforcement*), salah satu cara yang belum dilakukan di Indonesia adalah memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Bila itu dapat dilakukan sebuah terobosan yang baik, karena dana yang disita dari koruptor dapat memperbanyak dana yang diberikan kepada warga miskin, untuk mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, upaya yang dilakukan negara terhadap jenis kemiskinan natural atau alamiah, negara dapat melakukan pendekatan pemberdayaan dan pemberian hibah atau bantuan sosial. Selama warga yang miskin masih dapat diberdayakan dengan berbagai bentuk, baik dalam bentuk akses modal, maupun pemberian skill atau keahlian, maka itu pilihan lebih tepat. Namun bila karena kondisi keterbatasan secara fisik dan mental misalnya, maka negara perlu melakukan pendekatan pemberian hibah atau bantuan sosial (*charity strategy*). Pemberian hibah atau bantuan sosial (*charity strategy*) yang dilakukan oleh pemerintah bisa beragam, mulai dari bantuan uang tunai, bantuan kebutuhan pokok, bantuan tempat tinggal atau rehab rumah, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, atau biaya berobat. Artinya Negara menjalankan fungsinya untuk memelihara orang miskin, orang tidak, orang yang terlantar dan orang yang tidak mampu, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian negara, kemiskinan dan pembangunan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah negara, kemiskinan dan pembangunan!
3. Kemukakan satu kasus negara, kemiskinan dan pembangunan, yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!



DAFTAR PUSTAKA

- 215
Agustini, I. (2016). Tinjauan yuridis moratorium pengiriman tki ke luar negeri dan implikasinya terhadap p2tki. In *Universitas Mataram*.
73
Universitas Mataram.
- Ahda, R. A., Sundari, M. S., & Setyaningrum, I. (2019). Pengaruh asean-china free trade area terhadap komoditi tekstil indonesia periode 2008-2015. *Ekonomi Dan Bisni*, 23(2), 47–55.
- Alamsyah, R., & Siregar, M. I. (2019). Infrastruktur publik dan percepatan pembangunan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(4), 453–463.
- 192
Alesina, A., Grilli, V., & Milesi-Ferrett, G. (1993). The Political Economy of Capital Control. In *Work and Occupations* (Vol. 20, Issue 3). <https://doi.org/10.1177/0730888493020003004>
- 88
Allen, W. R. (1991). Mercantilism. *The World of Economics*, 440–448. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-21315-3_58
- 226
Angelirti, A. (2008). History of the unconscious in Soviet Russia: From its origins to the fall of the Soviet Union. *International Journal of Psychoanalysis*, 89(2), 369–388. <https://doi.org/10.1111/j.1745-8315.2008.00020.x>
- 254
Anggoro, D., Umar, M. D., Vinanty, E., & Dananjaya, D. (2015). Rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Guru Dan Pegawai Pada Koperasi Smk Manggala Tangerang. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2015 (SENTIKA 2015) Yogyakarta, 28 Maret 2015, 2015(Sentika)*, 213–222.

- Arniati, & Muammar. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. *Jurnal Integrasi*, 4(2), 187–193. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JI/article/view/228>
- Arrow, K., Barro, J., Berger, W., Peter Buckley, W. F., & Draper, T. (1978). Capitalism, Socialism, and Democracy A Symposium. *Commentary*, 65(4), 29.
- Ashari, F. A., & Aprianto, T. C. (1998). *Pasang Surut Sejarah BULOG di Indonesia pada tahun 1967-1998 (Up and Down History of BULOG in Indonesia 1967-1998)*. Universitas Jember.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/374>
- Atedjadi, R. L. (2015). Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2), 375–397. <https://doi.org/10.25123/vej.1693>
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. *Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 83–94. <http://uslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Atmanti, H. D. (2017). Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 511–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeb17.v2i02.1140>
- Aulenbacher, B., Bärnthaler, R., & Novy, A. (2019). Karl Polanyi, The Great Transformation, and Contemporary Capitalism. *Osterreichische Zeitschrift Fur Soziologie*, 44(2), 105–113. <https://doi.org/10.1007/s11614-019-00341-8>

- Aziz, A. (2020). Investasi, Utang Pemerintah, Dan Kualitas Pembangunan. *Jurnal Komastie*, 1(1), 57–69.
- 42 Ali, Muhammad (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis. Surabaya: Grasindo.
- 276 Baumol, W. J. (1986). Williamson's The Economic Institutions of Capitalism The Economic Institutions of Capitalism. by O. E. Williamson. *The RAND Journal of Economics*, 17(2), 279–286. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/2555390>
- Beinhocker, E., & Hanauer, N. (2014). Redefining capitalism. *McKinsey Quarterly*, 3, 160–169.
- 93 <https://doi.org/10.1002/9781119197461.ch2>
- Benny, J. (2013). Ekspor dan impor pengaruhnya terhadap posisi cadangan devisa di indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1406–1415.
- 85 Berthier, H. C. (2003). Garbage, work and society. *Resources, Conservation and Recycling*, 39(3), 193–210. [https://doi.org/10.1016/S0921-3449\(03\)00027-2](https://doi.org/10.1016/S0921-3449(03)00027-2)
- 159 Boisot, M., & Child, J. (1996). Network Capitalism : China ' s Explaining Max Boisot and. *Administrative Science Quarterly*, 41(4), 600–628.
- Braunthal, G. (1961). European Socialism at the Crossroads. *The Massachusetts Review*, 2(4), 776–781. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/25086747>
- 92 Baswir, Revrisond (2209) Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 69.
- 16 Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, A. S. (2015). Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung. *Publiciana*, 8(1), 1–12.
- 33 Callinicos, A. (2007). Does capitalism need the state system? *Cambridge Review of International Affairs*, 20(4), 533–549. <https://doi.org/10.1080/09557570701680464>

- Cork, J. (1949). John Dewey, Karl Marx, and Democratic Socialism. *The Antioch Review*, 9(4), 435–452. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/4609377>
- Creighton, R. (2010). Fat Taxes: The newest manifestation of the age-old excise tax. *Journal of Legal Medicine*, 31(1), 123–136. <https://doi.org/10.1080/01947641003598310>
- Caporaso, James & David Levine (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dachliani, D. M. (2006). *Permintaan Impor Gula Indonesia Tahun 1980-2003*. Universitas Diponegoro.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2019). Catur purusa artha lensa dekonstruksi definisi pajak yang berkeadilan. *Equity*, 20(2), 1–16.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada pt. nenggapratama internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 78–87. <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Deatherage-Newsom, M. (1978). Teaching women's role in changing the face of the earth: How and why. *Journal of Geography*, 77(5), 166–172. <https://doi.org/10.1080/00221347808980110>
- Delis, A., Mustika, C., & Umiyati, E. (2015). Pengaruh FDI Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia 1993-2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), 48–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/paradigma.v10i1.3653>
- Delistiawati, N. (2018). Upaya kelompok ekonomi menengah atas dalam menangani kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(2), 72. <https://doi.org/10.32832/jpls.v12i2.2796>
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila dan multikulturalisme indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v15i2.53>
- Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 105.

- 61 <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055>
 Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- 203
 Dina, F., & Adwiya, R. (2016). Analisis Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Pontianak Tahun 2010-2014. *Simnasiptek 2016*, B-17.
- 171
 Dorfman, J. G. (2008). The founders' legal case: "no taxation without representation" versus taxation no tyranny. *Houston Law Review*, 1377-1414.
- 170
 Driscoll, C., & Starik, M. (2004). The primordial stakeholder: Advancing the conceptual consideration of stakeholder status for the natural environment. *Journal of Business Ethics*, 49(1), 55-73.
<https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000013852.62017.0e>
- Dzulhadi, Q. N. (2014). Al-Farabi dan Filsafat Kenabian. *Kalimah*, 12(1), 123-136.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/222/214>
- Deliarnov (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Economakis, G., Anastasiadis, A., & Markaki, M. (2010). US economic performance from 1929 to 2008 in terms of the Marxian theory of crises, with some notes on the recent financial crisis. *Critique*, 38(3), 465-487.
<https://doi.org/10.1080/03017605.2010.492688>
- 46
 Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.
[https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)
- 19
 Emalia, I. (2018). Mochammad Natsir dan Pemikiran Ekonomi Ummat 1950-1960. *Buletin Al-Turas*, 19(2), 409-434.
<https://doi.org/10.15408/bat.v19i2.3728>
- Erreygers, G. (2014). Fourier, Charles (1772-1837). *The Encyclopedia of Political Thought*, September, 1.

DAFTAR PUSTAKA

- 47
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbe>
 pt0382
- 72
 Everson, S. (1988). Aristotle on the Foundations of the State. *Political Studies*, 36(1), 89–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1988.tb00218.x>
- Fadhillah, A., Arintoko, A., & Kamio, K. (2021). Dampak Investasi, Proyek dan Utang Luar Negeri Terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2010-2020. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.216>
- 127
 Fairclough, N. (2002). Language in new capitalism. *Discourse and Society*, 13(2), 163–166. <https://doi.org/10.1177/0957926502013002404>
- Fakhruzzy, A. (2020). Peranan hukum pajak dalam upaya mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.932>
- Firmah, M. I., Rahmanto, F., Purwaningsih, T., & Rafi, M. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Fredlina, C., Ginting, E. S., & Hutasoit, A. H. (2021). Analysis of the Effect of Macroeconomic Variables and External Debt on Indonesia 's Economic Growth for the First Quarter 2010- First Quarter 2020. *Jurnal Mantik*, 5(36), 536–545. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/mantik.Vol5.2021.1364.pp536-454>
- 228
 Gamble, A. (1981). Socialism. In *An Introduction to Modern Social and Political Thought* (pp. 100–101). Palgrave.
- 120
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-16615-2_4
- Gearhart, S. (1980). Reading De l' Esprit des Lois : Montesquieu and the Principles of History. *Yale French Studies*, 59, 175–200. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/2929821>

- 185
Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi
173
Syariah. *Iqtisboduna*, 7(1), 90–112.
- Gorb, P. (1951). Robert Owen as a businessman. *Business History Review*,
25(3), 127–148.
197
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0007680500024521>
- Gunarso, P. (2016). Efektivitas manajemen e-system dalam pelayanan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt
(e-filing). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 23–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jmdk.v4i2.656>
12
- Gunawan, T. (2016). Praktek monopoli dan persaingan usaha terlarang
dalam hukum positif menurut uu no. 5 tahun 1999. *Lex Crimen*,
1(6), 88–96.
- Gill, Stephen (1995). “Globalisation, Market Civilisation, and
Disciplinary Neoliberalism,” *Millennium: Journal of
International Studies*, 24 (3). Harnes, Adam (2006).
Neoliberalism and Multilevel Governance. London: Routledge
Publisher.
204
- Hairunnisa. (2019). Dampak utang luar negeri indonesia ditinjau dari
perspektif ekonomi islam. *La Riba Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1),
1–19.
81
- Hakim, A. (2012). Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno
Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). *Jurnal
Ekonomika Bisnis*, 03(02), 161–180.
<https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v3i2.2238>
210
- Hall, G. J., & Sargent, T. J. (2015). A History of U. S. Debt Limits. In
NBER Working Paper Series (21799, Issue November).
[https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21799/
w21799.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21799/w21799.pdf)
191
- Hall, R. (1992). Plato and Personhood. *The Personalist Forum*, 8(2), 88–
100.
60
- Hardinanto, A. (2017). Otentisitas sumber sejarah pancasila dalam
masa sidang pertama badan untuk menyelidiki usaha-usaha
persiapan kemerdekaan tanggal 29 mei-1 juni 1945. *Veritas et*

- Justitia*, 3(1), 43–64.
 129 <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2524>
 Hejeebu, S., & McCloskey, D. (2004). Polanyi and the history of capitalism: Rejoinder to Blyth. *Critical Review*, 16(1), 135–142.
 145 <https://doi.org/10.1080/08913810408443602>
 Hilm, M. Z. (2019). Dominasi Soeharto , Monopoli Usaha Oleh Birokrat Dan Pengusaha. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5), 364–373.
- Hilt, E. (2017). Economic History, Historical Analysis, and the“New History of Capitalism.” *The Journal of Economic History*, 77(2), 511–536.
 40 <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002205071700016X>
 Hopkins, K. (1980). Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B . C . -A . D . 400). *Journal of Roman Studies*, 70, 101–125.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/299558>
- Hudon, P. J. (1939). The concept of revolutionary class among french 216 alists, babeuf to proudhon [Georgetown]. In *Georgetown University*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>
- Halim, Abdul (2014). Politik Lokal. Yogyakarta: LP2B.
- Iqbal, M., & Verdaningrum, A. (2016). Pengaruh Culture Shock Dan Adversity Quotient Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Hongkong. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2), 101.
<https://doi.org/10.14203/jkw.v7i2.745>
- Iryana, W. (2017). Protes 29 Ssial Petani Indramayu Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 8(3), 285. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i3.10>
- 36 Ismail, A. G., & Jaafar, A. B. (2015). Government Revenue in the Eyes of Abu Ubaid - An Analysis. *International Journal of Asian Social Science*, 5(1), 1–17.
<https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17> 47
- Ismulyadi. (2016). Kapitalisme suara hati. *Jurnal Humanika*, 16(1), 33–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v16i1.12142>

- Jahri, S. (2012). *Implementasi bnp2tki dalam permasalahan pengiriman tenaga kerja indonesia ke arab saudi 2006-2011* [Universitas Riau]. <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/475?show=full>
- Jalaludin, & Suriadi, I. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). *Ekonobis*, 5(1), 52–66. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v5i1.28>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Dan Ketahanan: Komparasi Antar Rezim Anggaran di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariaab*, 1(2), 98–118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.11>
- Juniantara, I. P. K., & Budhi, M. K. S. (2012). Pengaruh Ekspor, Impor Dan Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 53(9), 32–38.
- Kadarukmi, M. E. R. (2013). Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 79–89.
- Kaminsky, G. L., & Pereira, A. (1996). The debt crisis: Lessons of the 1980s for the 1990s. *Journal of Development Economics*, 50(1), 1–24. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(96\)00002-8](https://doi.org/10.1016/0304-3878(96)00002-8)
- Khadafi, A. (2015). Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Indonesia di Sektor Pertanian. *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional*, 3(1), 70–81.
- Kolodko, G. W. (2018). Socialism, capitalism, or Chinism? *Communist and Post-Communist Studies*, 51(4), 285–298. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.10.002>
- Kusumawati, M. P. (2016). Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 155. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a6296>
- Karimi, Ahmad Faizin (2012). *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: Muhi Press.

- Kartasmita, Ginandjar (1995). *Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas P₂₀₂ vijaya.
- Keban, Yeremias (2015). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Ladurie, E. L. R. (1959). Histoire et Climat. *Annales. Histoire, Sciences*
 41 *Sociales*, 14(1), 3–34. <https://doi.org/10.3406/ahess.1959.2795>
- Levy, J. (2017). Capital as Process and the History of Capitalism. *Business History Review*, 91(3), 483–510.
 66 <https://doi.org/10.1017/S0007680517001064>
- Li, X., Jin, L., & Kan, H. (2019). Air pollution: a global problem needs
 local fixe₆₆ *Nature*, 570, 437–439.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1038/d41586-019-01960-7>
- Lidwina, A. (2021, June 24). Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 6 .418
 Triliun pada Mei 2021. *Databoks*, 1.
[ht₂₀://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/24/utang-pemerintah-turun-jadi-rp-6418-triliun-pada-mei-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/24/utang-pemerintah-turun-jadi-rp-6418-triliun-pada-mei-2021)
- Lina, N., Hadara, A., & Hayari. (2020). Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi terhadap Kebijakan Penarikan Pajak Pemerintah Hindia Belanda pada Awal Abad XX. *Idea of History*, 03(3), 1–11.
 108 <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/history.v3i2.1116>
- Lisdiyono, E. (2014). penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 11(2), 67–76.
- Locke, J. (1887). Of the State of Nature. In Robert Filmer (Ed.), *Second Treatise on Government* (2nd ed.). G. Routledge and sons, limited. cybersism₂₁.com
- Lowenthal, D. (2000). Nature and morality from George Perkins Marsh to the millennium. *Journal of Historical Geography*, 26(1), 3–23.
 75 <https://doi.org/10.1006/jhge.1999.0188>
- Lubis, A. I. F., & Riva'i, M. R. (2016). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Periode 2005-2014. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 19–27.

- 65 Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.43-53>
- Manoppo, V. (2007). Utang luar negeri indonesia (perspektif ekonomi politik). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1(1), 36–45. <http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/183/165>
- Manurung, R. D. P., & Santosa, A. B. (2019). Akar yang menjalar: Peran emil salim dalam kementerian pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup di indonesia 1972-1983. *Factum*, 8(2), 199–212.
- Masikome, M. J., Kindangen, P., & Engka, D. S. . (2020). Pengaruh Bantuan Modal, Pendidikan dan PELatihan Serta Kredit Bank Terhadap Perkembangan Koperasi Aktif Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 117–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32817.21.1.2020>
- 22 Masngudi. (1990). *Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di indonesia*. Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Mill, J. S. (2009). Principles Of Political Economy. In *The Cambridge Companion to Hume: Second Edition*. <https://doi.org/10.1017/CCOL9780521859868.012>
- 186 Moran, J. (1998). Two Conceptions of State: Antonio Gramsci and Michael Mann. *Politics*, 18(3), 159–164. <https://doi.org/10.1111/1467-9256.00073>
- Muldoon, J. (2019). A socialist republican theory of freedom and government. *European Journal of Political Theory*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1177/1474885119847606>
- 89 Muryanti, E. (2011). Muncul Dan Pecahnya Sarekat Islam Di Semarang 1913-1920. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v20i1.1056>
- 19 Mussadun, & Nurpratiwi, P. (2016). Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. *Journal of*

- Regional and City Planning*, 27(1), 49–67.
<https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.5>
- 136 Muthmainnah, L. (2011). State of nature j.j. rousseau dan implikasinya terhadap bentuk ideal negara. *Jurnal Filsafat*, 21(1), 73–86.
https://doi.org/10.1057/9781137535290_2
- Mahi, Ali Kabul (2016). Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- 7 Mills, Nicolaus (2008). Winning the Peace: The Marshall Plan and America's Coming of Age as a Superpower. Wiley.
- 3 Merkl, Peter (1967). Continuity and Change. New York: Harper and Row.
- 119 Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- 116 Nee, V. (2013). A Theory of Market Transition: From Redistribution to Market in State Socialism. *American Sociological Review*, 54(5), 663–681.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2117747>
- 70 Nizar, S. (2003). Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Demokrasi*, 2(1), 95–108.
- Noor, Firman (2007). “Demokrasi Mati Suri” Jurnal Penelitian Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Vol. 4 (1).
- 209 Ngusmanto (2015). Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pardi, I. W. (2019). Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam Perspektif Sejarah. *HISTORLA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 97–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15775>
- 58 Parlaungan, Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Pemikiran ibnu sina dalam bidang filsafat. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 79–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.51>
- 94 Pender, J. (2002). Empowering the Poorest? The World Bank and the ‘Voices of the Poor.’ In C. D (Ed.), *Rethinking Human Rights* (pp. 97–114). Palgrave Macmillan.

- 218 https://doi.org/10.1057/9781403914262_6
 Picon, A. (2003). Utopian socialism and social science. *The Cambridge History of Science: The Modern Social Sciences*, 71–82.
- 8 <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521594424.006>
 Pirenne, H. (1914). The Stages in the Social History of Capitalism. *The American Historical Review*, 19(3), 494–515.
- 77 <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/1835075>
 Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neoliberal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11>
- Prihandoko, H. (2017). Percepatan pembangunan infrastruktur dan penambahan utang luar negeri pemerintah: potensi manfaat vs potensi risiko. *Indonesian Treasury Review*, 2(3), 81–99.
- Pudihang, S., Morasa, J., & Gamaliel, H. (2017). Mekanisme pemungutan pajak atas pemindahan hak pada jual beli tanah dan bangunan di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 272–283.
- 5 Purnawan, A. (2011). Rekonstruksi sistem pemungutan pajak penghasilan (pph) badan berbasis nilai keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Februari), 36–46.
- 241 Putra, M. R. E., Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2020). Strategi unit pelaksana teknis pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal MODERAT*, 6(4), 714–727.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3601>
- Philipus & Aini, Nurul (2004). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnaya, Gusti Ketut (2016). *Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- 158 Rahardjo, M. D. (2011). Koperasi Sukses Indonesia. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 1(1), 1.

- <https://doi.org/10.20588/jmp.v1i1.61>
- Rajan, S. R., & Cruz, S. (1997). The Ends of Environmental History: Some Questions. *Environment And History*, 3, 245–252.
- Ramdani, M. (2015). Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14803>
- Rasmini, S. N. M. (2011). Sejarah dan Definisi Pajak. In *Dasar Dasar Perpajakan* (Modul 1). Universitas Terbuka. <https://doi.org/KDPT>
- Ratih Lestarini. (2013). Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 86–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.29>
- RatnaSari, E., & Firdayetti, F. (2019). Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Dan Ushr (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(1), 39–46. <https://doi.org/10.25105/me.v26i1.5161>
- Ratnawaty, Sari, A. A., Widiastri, H., Pradana, M., & Yuhertiana, I. (2016). Luder’S Contingency Model Dalam Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dan Filipina. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–30.
- Ricardo, D. (2005). From The Principles of Political Economy and Taxation. *Readings in the Economics of the Division of Labor*, 127–130. https://doi.org/https://doi.org/10.1142/9789812701275_0014
- Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 185–196. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>
- Rochwulaningsih, Y. (2012). Pendekatan Sosiologi Sejarah Pada Komoditas Garam Rakyat: Dari Ekspor Menjadi Impor. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1).

- <https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1840>
- Rohmah, O. S., & Sulistiyono, S. T. (2021). Perkembangan Bongkar Muat Barang dan Ekspor Impor di Pelabuhan. *Historiografi*, 2(1), 42–49.
- Rohmawati, E. (2012). Pemanfaatan Remitan dan Alasan Melakukan Mobilitas Internasional Menurut Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Bhumi*, 064274055. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/475>
- Rothermund, D. (1985). The State of India's Environment. *New Delhi Center for Science and Environment*, 43, 108–110.
- Rumbadi, R. (2017). Peran Dan Tanggungjawab Kementerian Luar Negeri Melindungi Wni Dan Tki Di Luar Negeri. *Jurnal Dimensi*, 6(2), 291–308. <https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1052>
- Rahman, Mariati (2017). Ilmu Administrasi. Makassar: Sah Media.
- Sakwa, R. (2013). The Soviet collapse: Contradictions and neo-modernisation. *Journal of Eurasian Studies*, 4(1), 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2012.07.003>
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Salles-Djelic, M.-L., & Quack, S. (2003). Globalization and Institutions. In *Globalization and Institutions*. IDEAS. <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01892012>
- Santoso, F. S. (2011). Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.193-207>
- Sary, M. P., Wijayanti, V., & Larasati, M. (2013). Jurnalisme berperspektif gender di surat kabar nasional (analisis framing terhadap pemberitaan kasus hukum pancung tki arab saudi di

- republika). *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/communicology.011.07>
- 40 Sassen, S. (2003). Globalization or denationalization? *Review of International Political Economy*, 10(1), 1.
<https://doi.org/10.1080/0969229032000048853>
- 102 Schelling, T. C. (1992). Some Economics of Global Warming. *The American Economic Review*, 80(1), 1–14.
<https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/2117599>
- 87 Schlumberger, O. (2008). Structural reform, economic order, and development: Patrimonial capitalism. *Review of International Political Economy*, 15(4), 622–649.
<https://doi.org/10.1080/09692290802260670>
- 115 Scott, A. J., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. *Regional Studies*, 37(6–7), 549–578.
<https://doi.org/10.1080/0034340032000108697a>
- 178 Sholehuddin, A. (2015). Jargon politik masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. *AL-TARAJA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 69–81.
- 64 Sholikah dan Ismail. (2019). Pemikiran politik ibnu khaldun (732 h-808 h/1332-1406 m). *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 65–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjks.v9i1.3426>
- 237 Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2), 156–167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- 155 Smith, A. (2005). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith. *The Two Narratives of Political Economy*, 109–160.
<https://doi.org/10.1002/9781118011690.ch9>
- 184 Smith, R. S. (1948). Sales Taxes in New Spain, 1575-1770. *The Hispanic American Historical Review*, 28(1), 2–37.
<https://doi.org/10.2307/2508188>
- 99 Soekarnoputri, D. P. M. S. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. *Jurnal Pertahanan &*

- Bela Negara*, 11(1), 49–66.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v11i1.1211>
- 181 Soleh, A. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, 6(2), 1–22.
- Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober Nawacita: superior strategy of Jokowi. *Politik Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 13(1), 1961–1975.
- Solihin, A., & Lestari, E. P. (2018). Sejarah Koperasi. In *Ekonomi Koperasi* (pp. 1–39). Universitas Terbuka. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4323-M1.pdf>
- 117 Sengler, O. (1928). Prussianism and Socialism. *History*, 46(1), 1–3.
- Stasavage, D. (2016). What we can learn from the early history of sovereign debt. *Explorations in Economic History*, 59, 1–16.
 86 <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2015.09.005>
- Steinberger, P. J. (2008). Hobbes, Rousseau and the modern conception of the state. *Journal of Politics*, 70(3), 595–611.
 179 <https://doi.org/10.1017/S002238160808064X>
- Stuart, M. H. (2015). “Julius Caesar” Again. *The English Journal*, 32(4), 216–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/806010>
- Subagiyo, R., & Budiman, A. (2020). Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2811>
- 165 Suprpto, S. J. (2008). Potensi, Prospek Dan Pengusahaan Timah Putih Di Indonesia. *Buletin Sumber Daya Geologi*, 3(2), 4–15. <https://doi.org/10.47599/bsdg.v3i2.158>
- 180 Surajiyo, & Wiyanto, A. (2006). Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila Dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. *Lex Jurnal*, 3(3), 168–184.
- Susilo, S. (2015). Tingkat Pendapatan dan Sebaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Negara Tujuan, Studi di Desa

- Aryojeding Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.17977/um017v20i12015p001>
- Swastika, D. K. S. (2011). Pangan Untuk Mengentaskan Petani miskin. *Pembangunan Inovasi Pertanian*, 4(2), 103–117.
- 255 Sardjono, Sigit (2017). *Ekonomi Mikro-Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- 39 Sholahuddin, M (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang (1978). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- (2009). *Administrasi Pembangunan*. Semarang: Bumi Aksara.
- Sukoco, Badri (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- 3 Sumbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- 122 Taylor, F. M. (1929). The Guidance of Production in a Socialist State. *The American Economic Review*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/1809581>
- 92 Thirgood, J. . V. . (1985). Global Deforestation and the Nineteenth-Century World Economy. by Richard P. Tucker; J. F. Richards. *The Journal of Asian Studies*, 44(4), 801–803. <http://www.jstor.org/stable/2056455>
- 139 Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154–171.
- 152 Tjokroamidjojo, Bintoro (1984). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Utomo, Tri Widodo (1998). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat.
- 80 Veblen, T. (1906). The socialist economics of Karl Marx and his followers. *Quarterly Journal of Economics*, 20(4), 575–595. <https://doi.org/10.2307/1882722>
- 33 Verdery, K. (1991). Theorizing socialism: a prologue to the “transition.” *American Ethnologist*, 18(3), 419–439.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1525/ae.1991.18.3.02a00010>

- Verster, P. (1999). Sending in die nabloei van die Marxisme-Leninisme. *Verbum et Ecclesia*, 20(1), 207–218. <https://doi.org/10.4102/ve.v20i1.1175>
- Wauran, M. (2009). Peta Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Dunia dan Prospeknya. *Jurnal Ilmiah Teknologi Energi*, 1(9), 83–91.
- Western, B. (1993). Postwar Unionization in Eighteen Advanced Capitalist Countries. *American Sociological Review*, 58(2), 266. <https://doi.org/10.2307/2095970>
- Wibawa, I. P. S. (2016). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51–68.
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1–24.
- Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie dan Megawati di Indonesia Achievement of the President's Governance Period BJ . Habibie and Megawati in Indonesia. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, 12(2), 196–207. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>
- Wijayati, P. A. (2010). model pungutan pajak pada mumpuni kumpeni di jawa timur. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2), 145–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v20i2.1045>
- Wikandaru, R., & Cahyo, B. (2016). Landasan Ontologis Sosialisme. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jf.12627>
- Woldring, K. (2010). Ethnic minorities in Holland today: The South Moluccans and the Suriname people Ethnic Minorities in Holland Today: The South Moluccans and the Suriname People. *Journal of Intercultural Studies*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/07256868.1980.9963150>
- Wong, S. (2015). The wealth of nations. *London Business School Review*, 26(3), 46–49. <https://doi.org/10.1111/2057-1615.12058>

DAFTAR PUSTAKA

- Yeldan, E. (2009). *On the Nature and Causes of the Collapse of the Wealth of Nations, 2007/2008: The End of a Façade Called Globalization* (197, Issue 159).
- Yusuf, M. F. (2020). Citra Inferioritas Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Saluran Berita Sabq.Org Saudi Arabia. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(2), 1–16. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.2909>
- Zain, M. A. (2015). Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 160–177.

GLOSARIUM

- Ekonomi : Aktivitas yang berkaitan dengan ³⁹ cara-cara untuk menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat, maupun negara, sehingga kebutuhan materi masyarakat atau rakyat dalam sebuah negara, atau di sebuah wilayah dapat terpenuhi dengan baik.
- Ekonomi politik : Hubungan atau keterkaitan berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi dan politik. Artinya, setiap aspek yang ada di dalam ekonomi dan politik selalu memiliki keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa setiap proses di dalam ekonomi memiliki hubungan dengan proses politik. Begitu pula proses politik memiliki hubungan dengan ekonomi. Proses politik berpengaruh kepada proses ekonomi, dan proses ekonomi berpengaruh terhadap proses politik.
- Ekonomi Politik Campuran : Ekonomi politik yang tidak murni lagi menerapkan pemikiran, sistem dan gerakan, dari dua ekonomi politik paling besar, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Yang terjadi malah sebaliknya berusaha untuk menggabungkan dua ekonomi politik tersebut, bisa dalam

- keseluruhan atau bisa untuk sebagai⁵²
- Ekonomi Politik Islam : Pemikiran ekonomi politik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang meliputi perkataan, perbuatan Nabi SAW, atau perkataan dan perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan praktik para sahabat Nabi SAW yang pernah¹⁹⁴ menjadi pemimpin, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, meliputi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
- Ekonomi Politik Pancasila : Pemikiran ekonomi dan politik yang sumber dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima.⁵
- Eksport : Kegiatan pengeluaran barang-barang dari peredaran masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing.
- Globalisasi : Proses perubahan institusional di tingkat lokal atau nasional yang dilebarkan menjadi perubahan bersifat transnasional atau lintas negara.¹⁴³
- Import : Kegiatan pengiriman barang dari satu negara ke negara lain dengan cara yang legal, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terhadap barang-barang yang halal untuk diperdagangkan.¹⁴¹
- Kapitalisme : Sistem perekonomian yang mengunggulkan faktor modal di dalam menggerakkan roda perekonomian secara nasional maupun global.

- Kemiskinan** : Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- Koperasi** : Suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan, yang berusaha menggerakkan potensi sumberdaya ekonomi demi majukan kesejahteraan anggota.
- Lingkungan hidup** : Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Negara** : Kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai suatu yang mereka anggap baik.
- Pajak** : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pembangunan** : Suatu proses yang dilakukan terus-menerus, usaha yang dilaksanakan secara sadar dan berencana yang mengarah kepada modernitas yang multidimensional ditujukan untuk membangun bangsa (*nation building*) secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara.

GLOSARIUM

- Politik : Tindakan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.
- Sosialisme : Ideologi ekonomi politik yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan di kalangan masyarakat secara merata, tidak hanya di tangan segelintir orang. Pemerataan kesejahteraan diperoleh dengan cara evolusi, tanpa kekerasan, persuasif, dan konstitusional.
- ⁵⁴ Tenaga kerja : Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/ atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Utang dalam negeri : Pinjaman yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang berkuasa untuk mendapat dana dari sumber dalam negeri, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lainnya.
- ²⁸ Utang luar negeri : Pinjaman yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang berkuasa kepada lembaga-lembaga pemberi pinjaman, atau yang biasa disebut lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan lain-lain. Untuk selanjutnya, dana pinjaman tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara
- Utang negara : Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan peruntukannya dilaksanakan oleh pemerintah.

INDEX

E

Ekonomi, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 111, 114, 115, 121, 123, 124, 126, 127, 134, 137, 13, 140, 148, 150

Ekonomi politik, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 73, 77, 82, 111, 127

Ekonomi Politik Campuran, 60, 61, 62, 63, 66

Ekonomi Politik Islam, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57

Ekonomi Politik Pancasila, 70, 71, 72, 73, 77

Eksport, 2, 80, 83, 86, 89

G

Globalisasi, 63, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 113

I

Import, 2, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

K

Kapitalisme, 21, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 82

INDEX

Kemiskinan, 24, 87, 121, 122, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

Koperasi, 64, 74, 75, 76, 112

L

Lingkungan hidup, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

N

Negara, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

P

Pajak, 44, 46, 87, 94, 105, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 152

Pembangunan, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 72, 75, 86, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 122, 124, 127, 129, 133, 134, 137, 139, 144, 145, 147, 151, 152, 153, 155

Politik, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 77, 82, 85, 87, 95, 97, 98, 99, 103, 105, 111, 114, 115, 126, 127, 139, 140, 145, 151

S

Sosialisme, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 66

T

Tenaga kerja, 23, 41, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

U

Utang dalam negeri, 103

Utang luar negeri, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106

Utang negara, 94, 95, 100, 102, 103

INDEX



TENTANG PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom
Tempat/ tgl lahir	: Sumenep, 15 Januari 1977
Alamat	: Sumenep, Jawa Timur
Telepon & WA	: 0823 3292 0307
Email	: hidayatullah@wiraraja.ac.id
Website	: www.mohammadhidayatullah.com

PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.
3. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Akidah, Jakarta, lulus tahun 2002.

PUBLIKASI JURNAL

1. "Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education." Terbit di Jurnal Al-Ta'lim, Volume 28, No. 1, 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
2. "Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic." Terbit di Jurnal Al Adabiya, Volume 16, No. 1, Juni 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
3. "Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19." Terbit di Jurnal Ijtimaiyya, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).

4. "The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia." Terbit di *Technology and Society*, Volume 63, November 2020, (Science Direct, terindeks Internasional, Scopus Q1).
5. "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia." Terbit di *Asian Journal of Comparative Politics*, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
6. "Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom." Terbit di *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
7. "Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep." Terbit di *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
8. "Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep." Terbit di *Jurnal Sospol*, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
9. "COVID-19: Public support to handle economic challenges." Terbit di *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
10. "The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig." Terbit di *Jurnal DINIKA*, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
11. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia." Terbit di *Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo*, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
12. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
13. "Integration Of Islam and Local Culture: *Tandbe'* in Madura." Terbit di *Jurnal Miqot*, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).

14. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

PUBLIKASI PROSIDING

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.*
2. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thompson Reuters).*
3. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thompson Reuters).*
4. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." *International Conferences Sdgs 2030 Challenges And Solutions, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).*

PUBLIKASI BUKU

1. *Perilaku Voters pada Masyarakat Multikultural*, diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2021.
2. *Kutukan Demokrasi*, diterbitkan oleh Edulitera Malang, 2021.
3. *Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
4. "Participation in building human resources: Independent

strategies for facing demographic expansion in remote island.” Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, Nopember 2020. (terindeks Internasional Scopus).

5. Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019.
6. Teori Sosial dan Pertentangannya. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018.
7. Media dan Pelayanan Publik. Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

PUBLIKASI DI MEDIA

1. “Kerikil Sepatu Kekuasaan,” Terbit di www.bermedia.id, 12 April 2021.
2. “Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims.” Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. “COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity.” Terbit di ISA Social Tranformations and Sociology of Development, Edisi 09, Agustus 2020.
4. “Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World.” terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. “Melawan Covid-19 Dengan Cinta.” Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.
6. “Tak Ada (Salahnya) Madura Propinsi.” Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. “UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA.” Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. “Rekonsiliasi PascaPilkada.” Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

SPEAKERS

1. Pembicara pada acara "Literasi Digital Nasional" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi "Mendeteksi Ancaman Keamanan Digital di Media Sosial."
2. Pembicara pada Diskusi Publik dengan topik "Demokrasi Kita Mau Kemana?" yang digelar oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bekerja sama dengan Data Sight pada tanggal 19 Juni 2021 secara daring via zoom. Judul Materi "Mengapa demokrasi mengutuk, dan bagaimana keluar dari kutukan demokrasi?"
3. Pembicara pada "Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?" Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
4. Pembicara pada "Seminar Nasional Public Speaking." Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
5. Pembicara pada "Transintegration on Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
6. Pembicara pada "Pelatihan Menjadi Jurnalis." Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
7. Pembicara pada "Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
8. Pembicara "Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi." Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
9. Pembicara "Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.

TENTANG PENULIS

10. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
11. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
12. Pembicara “Bedah Buku, Menegosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

PRESENTERS

1. Presenter pada Konferensi Internasional Da'wah dan Komunikasi yang digelar oleh UIN Walingoso Semarang, pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring, via zoom meeting. Materi presentasi dengan judul "Failure of State Communication in Countering Terrorism to Muslim and Islamic Mass Organizations".
2. Presenter pada International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 (ICHSoS) diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang digelar secara daring, pada tanggal 18-19 Juni 2021. Judul artikel yang dipresentasikan "Covid 19 and Medical Personnel in Social Choice Theory."
3. Presenter pada “1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People’s Representative.” Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
4. Presenter pada “Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
5. Presenter pada “The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the

- Disruptive Era.” Diselenggarakan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.
6. Presenter pada “The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era.” Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
 7. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title “Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources.”
 8. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
 9. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
 10. Presenter pada “The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS).” Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
 11. Presenter pada “Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur).” Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
 12. Presenter “Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik.” Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
 13. Presenter pada “International Islamic Research Forum (IIRF).” Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 Nopember 2017.
 14. Presenter pada “Seminar Internasional Studi Islam, Islam a

TENTANG PENULIS

- Friendly Cultural Relegion.” Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.
15. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

REVIEWER

1. Jurnal E-Saintika, Undikma, Nusa Tenggara Barat, 2021-sekarang.
2. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
3. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang. 264
4. Journal of Governenance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
5. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
6. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

PENGALAMAN TUGAS

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

AWARD

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta²² 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
3. Pemenang ke tiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007

Ekonomi mengurus pasar, transaksi jual-beli, tukar-menukar barang, dan jasa, secara daring maupun luring. Orang mengurus ekonomi tempatnya di pasar, di pusat perbelanjaan, di bursa saham, di aplikasi atau platform digital. Seperti tidak ada hubungan urusan politik yang membahas urusan meraih, membagi, mempertahankan kekuasaan, yang berada di gedung parlemen, kantor pemerintah, di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan umum berlangsung.

Ekonomi memiliki hubungan yang intens dengan politik. Bila diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama-sama bernilai, saling memberi nilai yang hanya ada pada saat keduanya ada secara bersamaan. Nyaris tidak ada keputusan politik yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Begitu pula bidang ekonomi, tidak dapat berjalan, bila tidak ada keputusan politik. Malah ada persoalan ekonomi yang kemudian terhenti karena kebijakan politik. Proses ekspor dan import barang dari satu negara ke negara lain, butuh kebijakan politik. Berapa banyak tahun ini misalnya Indonesia akan mengimpor beras dari Vietnam adalah keputusan politik. Meski beras adalah urusan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan makan.

Apakah politik harus dipisah dengan ekonomi? Atau apakah politik harus selalu berhubungan dengan ekonomi? Kedua pertanyaan itu akan dijelaskan di dalam buku ini. Buku ini berkaitan dengan "Ekonomi Politik Pembangunan." Selamat membaca.



Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya 60283
Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp. (031) 592 5970
Fax. (031) 593 8955

EKONOMI

ISBN 978-602-714236-6



Harga P. Jawa
Rp. 97.000

PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1%
2	bookskart.net Internet Source	<1%
3	fis.um.ac.id Internet Source	<1%
4	lukmanairfan.wordpress.com Internet Source	<1%
5	123dok.com Internet Source	<1%
6	fikom.gunadarma.ac.id Internet Source	<1%
7	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
8	archive.org Internet Source	<1%
9	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1%
10	id.scribd.com Internet Source	<1%
11	repository.uniga.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
13	www.kompasiana.com Internet Source	<1%

14	adoc.tips Internet Source	<1 %
15	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
17	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
18	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	ijicc.net Internet Source	<1 %
20	databoks.katadata.co.id Internet Source	<1 %
21	ebin.pub Internet Source	<1 %
22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	dddhouse.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	muhammadyazid02.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	repository.untan.ac.id Internet Source	<1 %
26	newyunissia.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	windygabriellss.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %

ejournal.undiksha.ac.id

29	Internet Source	<1 %
30	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
32	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to University of Sussex Student Paper	<1 %
34	header.kaputama.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
36	archive.aessweb.com Internet Source	<1 %
37	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
39	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
41	files.osf.io Internet Source	<1 %
42	es.scribd.com Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
44	digilib.uns.ac.id	

Internet Source

<1 %

45

doaj.org

Internet Source

<1 %

46

ejournal.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

47

repositorium.sdum.uminho.pt

Internet Source

<1 %

48

www.katapena.info

Internet Source

<1 %

49

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

50

izzamafruhah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

ojs.mahadewa.ac.id

Internet Source

<1 %

52

tulisan-ku-com.over-blog.com

Internet Source

<1 %

53

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

54

cdn.undiknas.ac.id

Internet Source

<1 %

55

halfofvisilsworld.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

zenodo.org

Internet Source

<1 %

57

fr.slideshare.net

Internet Source

<1 %

58

jurnal.syntaxtransformation.co.id

Internet Source

<1 %

59

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

60

www.journal.uad.ac.id

Internet Source

<1 %

61

www.jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

62

alkitab.sabda.org

Internet Source

<1 %

63

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

64

ejournal.kopertais4.or.id

Internet Source

<1 %

65

www.owner.polgan.ac.id

Internet Source

<1 %

66

coek.info

Internet Source

<1 %

67

ejournal.kemensos.go.id

Internet Source

<1 %

68

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

69

bphtb-hukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

70

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

71

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

72

Submitted to Monash University

Student Paper

<1 %

73

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

74

Submitted to University of Dundee

<1 %

75

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

76

journals.sagepub.com

Internet Source

<1 %

77

ojs.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

78

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

79

Sela Pudiang, Jenny Morasa, Hendrik Gamaliel. "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PEMINDAHAN HAK PADA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

80

[Submitted to University of the West Indies](#)

Student Paper

<1 %

81

ejournal.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

82

journal.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

83

malangreview.blogspot.com

Internet Source

<1 %

84

tugaskuliah0601.blogspot.com

Internet Source

<1 %

85

upcommons.upc.edu

Internet Source

<1 %

86

www.cepc.es

Internet Source

<1 %

87	www.econstor.eu Internet Source	<1 %
88	Submitted to University of Huddersfield Student Paper	<1 %
89	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
90	repository.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
91	audiayu.wordpress.com Internet Source	<1 %
92	openresearch-repository.anu.edu.au Internet Source	<1 %
93	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
94	www.acarindex.com Internet Source	<1 %
95	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
96	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %
97	boankagaints.wordpress.com Internet Source	<1 %
98	cios.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
99	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
100	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %
101	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

Submitted to University of Lincoln

102

Student Paper

<1 %

103

Yoserwan - Yoserwan. "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

104

Young - Kyu Shin, Petri Böckerman. "Precarious workers' choices about unemployment insurance membership after the Ghent system reform: The Finnish experience", Social Policy & Administration, 2019

Publication

<1 %

105

bibliotecadigital.fgv.br

Internet Source

<1 %

106

journal.stiem.ac.id

Internet Source

<1 %

107

krex.k-state.edu

Internet Source

<1 %

108

ojs.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

109

serisc.org

Internet Source

<1 %

110

www.anahuul.blogspot.com

Internet Source

<1 %

111

NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO. "KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2018

Publication

<1 %

112

e-journal.unipma.ac.id

Internet Source

<1 %

113	peskano.wordpress.com Internet Source	<1 %
114	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
115	www.australianpopulationstudies.org Internet Source	<1 %
116	www.springerprofessional.de Internet Source	<1 %
117	www.tek.org.tr Internet Source	<1 %
118	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
119	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
120	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %
121	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	<1 %
122	brill.com Internet Source	<1 %
123	denanang.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
125	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
126	muhaminkhair.wordpress.com Internet Source	<1 %
127	scielo.senescyt.gob.ec Internet Source	<1 %

www.kaskus.co.id

128	Internet Source	<1 %
129	Submitted to King's College Student Paper	<1 %
130	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
131	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
132	scriptiebank.be Internet Source	<1 %
133	www.journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
134	"Szabadság, demokrácia és politikai közösség : A republikánus-liberális vita", Corvinus University of Budapest, 2022 Publication	<1 %
135	Submitted to Liberty University Student Paper	<1 %
136	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
137	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
138	nasional.tempo.co Internet Source	<1 %
139	repo.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
140	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
141	www.bongkar.co.id Internet Source	<1 %
142	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

143	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
144	dokumen.tips Internet Source	<1 %
145	eprints.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
146	eudl.eu Internet Source	<1 %
147	hikmahyoso.blogspot.com Internet Source	<1 %
148	itrev.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
149	journal.undiknas.ac.id Internet Source	<1 %
150	journalstories.ai Internet Source	<1 %
151	psdg.bgl.esdm.go.id Internet Source	<1 %
152	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
153	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
154	syariah-iain-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
155	www.socialistworld.ru Internet Source	<1 %
156	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
157	Andrew S. Skinner. "12 Hume's Principles of Political Economy", Cambridge University Press (CUP), 2008 Publication	<1 %

158	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	<1 %
159	Submitted to University of Kent at Canterbury Student Paper	<1 %
160	Yeni Rachmawati. "Pengembangan Model Etnoparenting Indonesia pada Pengasuhan Anak", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020 Publication	<1 %
161	feb.unila.ac.id Internet Source	<1 %
162	intelektualmuda99.blogspot.com Internet Source	<1 %
163	jamberita.com Internet Source	<1 %
164	jom.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
165	jurnal.tekmira.esdm.go.id Internet Source	<1 %
166	pajakonline.com Internet Source	<1 %
167	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
168	www.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
169	www.upi-yptk.ac.id Internet Source	<1 %
170	www.zbw.eu Internet Source	<1 %
171	Submitted to American Public University System Student Paper	<1 %

172	Herdy L. N Pihang. "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA", LEX ET SOCIETATIS, 2012 Publication	<1 %
173	Submitted to Queen Mary and Westfield College Student Paper	<1 %
174	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
175	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %
176	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
177	repo.unima.ac.id Internet Source	<1 %
178	sejarahkita.com Internet Source	<1 %
179	Submitted to The College of New Jersey Student Paper	<1 %
180	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
181	d.researchbib.com Internet Source	<1 %
182	ensikloditya.blogspot.com Internet Source	<1 %
183	fryzho.blogspot.com Internet Source	<1 %
184	iis-db.stanford.edu Internet Source	<1 %
185	jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

186 ocs.sfu.ca
Internet Source

<1 %

187 postinganpuput.blogspot.com
Internet Source

<1 %

188 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

189 telemetr.io
Internet Source

<1 %

190 Submitted to Universitas Pelita Harapan
Student Paper

<1 %

191 Submitted to University of Newcastle upon
Tyne
Student Paper

<1 %

192 Vo, X.V.. "The determinants of international
financial integration", Global Finance Journal,
2007
Publication

<1 %

193 aryosangpenggoda.blogspot.com
Internet Source

<1 %

194 bukharawrite.wordpress.com
Internet Source

<1 %

195 garuda.ristekbrin.go.id
Internet Source

<1 %

196 ilham2606.blogspot.com
Internet Source

<1 %

197 jamal.ub.ac.id
Internet Source

<1 %

198 kneks.go.id
Internet Source

<1 %

linter.untar.ac.id

199	Internet Source	<1 %
200	mukhdarmustafa.wordpress.com Internet Source	<1 %
201	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
202	sbr.journals.unisel.edu.my Internet Source	<1 %
203	seminar.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
204	sinta.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
205	webdataskripsiyangbenar.blogspot.com Internet Source	<1 %
206	www.polsis.uq.edu.au Internet Source	<1 %
207	2cahya.blogspot.com Internet Source	<1 %
208	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
209	Submitted to University College London Student Paper	<1 %
210	Submitted to University of Worcester Student Paper	<1 %
211	apiar.org.au Internet Source	<1 %
212	core.ac.uk Internet Source	<1 %
213	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
214	etheses.uin-malang.ac.id	

Internet Source

<1 %

215 fh.unram.ac.id
Internet Source

<1 %

216 journals.umkt.ac.id
Internet Source

<1 %

217 juliaacitraa.wordpress.com
Internet Source

<1 %

218 link.springer.com
Internet Source

<1 %

219 media.proquest.com
Internet Source

<1 %

220 qdoc.tips
Internet Source

<1 %

221 rendratopan.com
Internet Source

<1 %

222 safiyyra.blogspot.com
Internet Source

<1 %

223 www.encyclopedia.com
Internet Source

<1 %

224 www.journals.uchicago.edu
Internet Source

<1 %

225 www.mitrariset.com
Internet Source

<1 %

226 Submitted to The American School in
Switzerland
Student Paper

<1 %

227 Submitted to University of Wales Swansea
Student Paper

<1 %

228 Willie Esterhuyse. "Van Kautsky tot Gramsci:
die marxistiese debat in die weste oor
politieke strategie", Politikon, 1989

<1 %

229	ahmadyoto.blogspot.com Internet Source	<1 %
230	aljurem.wordpress.com Internet Source	<1 %
231	androsfebtryto.blogspot.com Internet Source	<1 %
232	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
233	elearningsensasi.blogspot.com Internet Source	<1 %
234	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
235	nbasis.wordpress.com Internet Source	<1 %
236	negarasejutaperkara.blogspot.com Internet Source	<1 %
237	ojs.udb.ac.id Internet Source	<1 %
238	pendidikangeosains.id Internet Source	<1 %
239	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
240	www.alikanews.com Internet Source	<1 %
241	www.bircu-journal.com Internet Source	<1 %
242	www.materikita.com Internet Source	<1 %
243	125sigideologi.blogspot.com Internet Source	<1 %

244	Saskia Sassen. "Globalization or denationalization?", Review of International Political Economy, 2003 Publication	<1 %
245	axiku.wordpress.com Internet Source	<1 %
246	backupkuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
247	biografi-tokoh-ternama.blogspot.com Internet Source	<1 %
248	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
249	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	<1 %
250	eprints.lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
251	faceblog-riekha.blogspot.com Internet Source	<1 %
252	frontiersinzooology.biomedcentral.com Internet Source	<1 %
253	ipsgampang.blogspot.com Internet Source	<1 %
254	jom.fti.budiluhur.ac.id Internet Source	<1 %
255	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
256	jurnal.polibatam.ac.id Internet Source	<1 %
257	jurnaltoddoppuli.wordpress.com Internet Source	<1 %
258	koreanfirst.net Internet Source	<1 %

259	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	<1 %
260	lukipower.blogspot.com Internet Source	<1 %
261	mardiya.wordpress.com Internet Source	<1 %
262	mayangrisqi.blogspot.com Internet Source	<1 %
263	nurkholisgravelious.blogspot.com Internet Source	<1 %
264	onesearch.id Internet Source	<1 %
265	or.pubs.informs.org Internet Source	<1 %
266	putrakaranganyar.blogspot.com Internet Source	<1 %
267	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
268	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
269	serambiwacana.wordpress.com Internet Source	<1 %
270	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
271	sociologica.unibo.it Internet Source	<1 %
272	viewhidden.blogspot.com Internet Source	<1 %
273	wartasejarah.blogspot.com Internet Source	<1 %

www.citethisforme.com

274

Internet Source

<1 %

275

www.memoonlines.com

Internet Source

<1 %

276

www.spell.org.br

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On